

PENGALAMAN  
BERHARGA  
DARI TESLA

2023 SUMSEL  
PUNYA TOL LAUT

PANDEMI &  
KONEKSI  
KEKUASAAN  
DALAM BISNIS

HENDY SISWANTO  
DAN RANTIS MAUNG  
BUATAN PINDAD

SIAP-SIAP TILANG  
ELEKTRONIK

# **CARA ERICK THOHIR MEMAINKAN EKONOMI DIGITAL**



# info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

**RP 75.000.000**

IKLAN 1 HALAMAN

**RP 50.000.000**

IKLAN ADVERTORIAL

**RP 50.000.000**

CENTER SPREAD

**RP 80.000.000**



*Kami Hadir  
Memberikan  
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN  
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET  
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH  
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON  
UNTUK PARA PELANGGAN**



**PENDIRI**

Waherman St. Mangkuto, H. Zainuddin

**DIREKTUR**

Usman Rizal

**PEMIMPIN REDAKSI**

Gunawan Effendi

**REDAKTUR PELAKSANA**

Rio Taufiq Adam, Andika Salahudin

**REDAKTUR**

Andyanto

**REPORTER**

Dian Taressa, Desi Wulandari, Anugrah Dany,  
Abu Bakar Usman

**EDITOR & GRAFIS**

Al Amin

**TATA LETAK**

Sujatmiko

**MEDIA SOSIAL**

Hesti Dimalia

**KEUANGAN**

Dra Nurhamida

**SEKRETARIS REDAKSI**

Niken Sri Astuti

**PENGEMBANGAN BISNIS**

Kiki Ibrahim

**DISTRIBUSI**

Abdul Muchtar

**BANK ACCOUNT**

A/N : PT. Wahana Multimedia  
BCA : No Rek : 553-014-4321  
KCP Otista Jakarta Timur

## BERGERAK

Tiarap tapi bergerak. Itu diksi yang sengaja menjadi pilihan Info Indonesia kali ini. Bagi yang mendalami strategi dan taktik militer, tiarap dan bergerak adalah keniscayaan untuk menghindari sambaran peluru.

Namun, tiarap dan bergerak pun masih relevan dalam konteks ekonomi. Terlebih ketika pandemi global Covid-19 bagaikan peperangan yang paling menjadi ancaman bagi umat manusia saat ini.

Maka di edisi kali ini pun, Info Indonesia membuka mata selebar mungkin untuk memahami dampak global Covid-19 terhadap perekonomian di berbagai belahan dunia. Pada Info khusus kali ini, antara lain, membahas soal sederhana mengenai kemungkinan komunitas bisnis melanggar protokol kesehatan Covid-19 karena memiliki koneksi politik sehingga menguasai pasar secara oligo malah monopoli.

Masalahnya memang bukan komunitas bisnis yang berkoneksi dengan politik. Di mana-mana di seluruh dunia, komunitas bisnis dan koneksi politik adalah kelaziman. Bahkan dalam sebuah contoh kasus, program pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk menangani Covid-19 di AS menunjukkan hal itu.

Persoalannya, bagaimana komunitas bisnis dan politik itu tidak bermuara pada korupsi. Ini juga bukan soal mustahil. Sebagai contoh kasus, adalah pasangan suami-istri Lee Hsien Loong dan Ho Ching. Dua tokoh terkemuka ini tampaknya tak perlu penjelasan lain kecuali bahwa Lee adalah Perdana Menteri Singapura dan Ho Ching istrinya adalah CEO Temasek Holding, Badan Usaha Milik Negara di negara tetangga kita itu.

Pasangan paling terkemuka di Singapura itu menikah pada 1985. Lee, putra pendiri Singapura Lee Kuan Yew, mulai menjabat pada 2004. Pada tahun yang sama, Ho Ching juga mulai menjabat sebagai CEO Temasek Holding. Kabar terakhir Ho Ching akan mundur dari Temasek pada Oktober 2021 mendatang.

Yang mungkin menggemaskan, Singapura selama ini selalu saja berada di peringkat atas pelaksanaan *good corporate governance*, atau tata kelola pemerintahan yang baik. Begitu pula Temasek Holding merupakan korporasi negara yang performanya luar biasa. Singapura menjadi negara kecil makmur sejahtera dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Juga menjadi salah satu negara yang paling bebas dari korupsi.

Jadi, sekali lagi, bukan komunitas bisnis dan koneksi politiknya yang menjadi masalah, melainkan bagaimana menerapkan prinsip atau asas yang luhur dalam politik maupun bisnis. Hal seperti ini tentu saja sangat baik untuk melangkah ke depan.

Atau, kita hanya ingin menonton Singapura berhasil menerapkan program bantuan sosial, mengendalikan pandemi Covid-19, dan menjadi tuan rumah World Economic Forum pada Mei 2021 nanti? Tiarap sambil bergerak bukanlah hanya menonton. ●

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:**

JL. Raya Kalibata No. 8, Jakarta Selatan 12750  
Telp / Fax : 021-79196781 / 021-79196786

**Twitter** : @1nfoindonesia  
**Facebook** : infoindonesia.id  
**Instagram** : @infoindonesia.idn  
**Email** : redaksi@infoindonesia.id



# DAFTAR ISI

EDISI  
BULAN  
FEBRUARI  
2021



## 06 INFO UTAMA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 ibarat tiarap untuk menghindari dampak negatif pandemi global Covid-19. Upaya untuk tetap bergerak sangat kelihatan agar semua bisa bertahan.



## 18 INFO SUMSEL

Bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan itu, produsen karet nomor satu di Indonesia. Sawit tercatat nomor empat. Hampir separuh cadangan emas hitam alias batu bara nasional, terpendam pula di sana. Tapi Sumsel belum memiliki pelabuhan samudera. Harapan muncul dari Tanjung Carat.



## 24 INFO OTONOMI

Rangkaian Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2020 memasuki babak baru dengan pelantikan mereka yang terpilih untuk mengemban amanah di daerahnya masing-masing. Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara mendapat giliran pertama bersama-sama.

## 86 INFO SELEBRITI

Ashanty menjadi pesohor yang banyak menjadi perbincangan di awal Februari 2021 lantaran tertular Covid-19 sekaligus juga menyandang autoimun. Beberapa pesohor lainnya mulai sembuh dan menjalani pemulihan.







## 48 INFO PROFIL

Sudah punya lima mobil, kemudian terpilih menjadi Bupati. Selanjutnya? Tambah satu mobil lagi untuk kendaraan operasional namun dari dana pribadi.



## 52 INFO EKONOMI

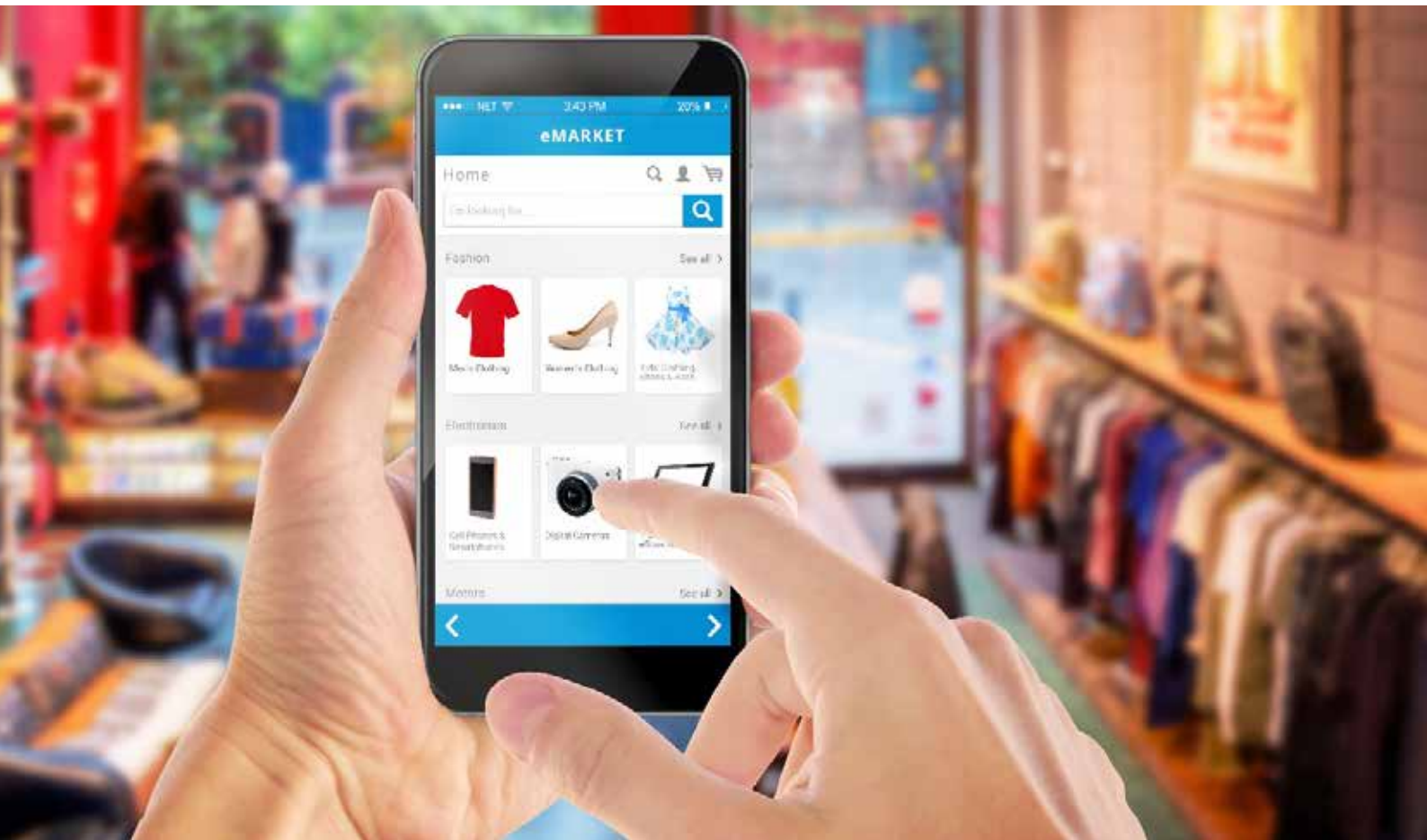
Dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru menjadi harapan membangkitkan ekonomi saat dan pasca pandemi. Masing-masing adalah KEK Pariwisata Lido, Bogor, Jawa Barat dan KEK Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE), Gresik, Jawa Timur.



## 84 INFO WISATA

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berada di Dairi, Sumatera Utara. Sedangkan wakilnya, Angela Tanoesoedibjo berada di Jakarta. Masih dalam konteks Beli Kreatif Danau Toba.

- 3 DARI REDAKSI
- 26 INFO KALTARA
- 30 INFO SULUT
- 32 INFO SUMBAR
- 34 INFO BENGKULU
- 38 INFO PILKADA
- 44 INFONUSANTARA
- 68 INFO ISTANA
- 72 INFO TEKNOLOGI
- 76 INFO SPORT
- 88 INFO KHUSUS
- 98 KAJI



# EKONOMI TIARAP TAPI TETAP HARUS BERGERAK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 ibarat tiarap untuk menghindari dampak negatif pandemi global Covid-19. Upaya untuk tetap bergerak sangat kelihatan agar semua bisa bertahan.

**D**i Indonesia, ekonomi mencatat sejarahnya sendiri. "Untuk pertama kalinya Indonesia mengalami kontraksi sejak 1998. Pada 1998 karena krisis moneter dan 2020 mengalami pandemi," ujar Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam temu media secara virtual, Jumat, 5 Februari 2021.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi, penyusutan pertumbuhan, hingga 2,07 persen. Kontraksi berarti negatif atau minus.

Ini terlihat dari data resmi Badan Pusat Statistik yang keluar pada 5 Februari 2021 yang merinci bidang usaha apa saja yang terdampak oleh wabah sepanjang setahun terakhir.

BPS mencatat, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdapat antara lain Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Menyusul kemudian Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen. Selanjutnya, Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen; Jasa





Lainnya sebesar 4,10 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,72 persen.

Toh ada juga yang tetap tumbuh di kala wabah. Antara lain Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen; Real Estat sebesar 2,32 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen.

Sedangkan dilihat dari wilayah pertumbuhan, masih ada yang positif di kala wabah melanda: Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sepanjang 2020, kawasan Sulawesi tumbuh sebesar 0,23 persen dan kawasan Maluku serta Papua mencapai 1,44 persen.

Kawasan pulau-pulau lainnya mengalami penyusutan bervariasi. Kelompok pulau yang mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan dengan tahun lalu menunjukkan kawasan Bali dan Nusa Tenggara paling tertekan

dengan penyusutan ekonomi hingga sebesar 5,01 persen. Menyusul kemudian Pulau Jawa sebesar 2,51 persen, kawasan Kalimantan sebesar 2,27 persen; dan kawasan Sumatera sebesar 1,19 persen.

Toh di masa wabah Covid-19 sepanjang 2020, Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tetap memberikan kontribusi terbesar dalam terhadap produk domestik Bruto (PDB) sebesar 58,75 persen. Selanjutnya, kawasan Sumatera sebesar 21,36 persen, Kalimantan sebesar 7,94 persen; kawasan Sulawesi sebesar 6,66 persen; Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94, persen; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35 persen.

Meski demikian, Suhariyanto menyebut Indonesia tak sendiri. Sejumlah negara juga mengalami kondisi serupa, bahkan kontraksinya lebih dalam. Amerika Serikat misalnya, mengalami kontraksi hingga minus 3,5 persen. Tak beda dengan Uni Eropa. Lembaga resmi negara setempat mengumumkan Uni Eropa mengalami kontraksi minus

6,4 persen.

Asia rupanya masih lebih baik. Negara-negara Asia seperti Hong Kong mengalami kontraksi dalam mencapai minus 6,1 persen; Singapura minus 5,8 persen; dan Korea Selatan minus 1,01 persen. Namun, tercatat ada dua negara yang saat ini mengumumkan pertumbuhan positif: Cina dan Vietnam.

"Kalau kita lihat perekonomian di berbagai negara pada triwulan atau kuartal IV (Oktober-November 2020) membaik dibandingkan dengan sebelumnya meski harus kita akui perkembangannya masih lemah. Banyak indikator yang bisa dilihat, salah satunya indeks Purchasing Managers Index atau PMI yang menunjukkan penguatan di Oktober, namun kembali melemah November dan Desember," sambung Suhariyanto.

Pada kuartal IV, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV tercatat minus 2,19 persen secara year on year. Sedangkan pertumbuhan di kuartal IV secara q to q mengalami kon-

## • INFO UTAMA

traksi minus 0,42 persen.

Suhariyanto mengungkapkan, pada kuartal IV, penyebaran Covid-19 masih tinggi dan sulit diturunkan. "Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di hampir seluruh negara," ucapnya.

Pada kuartal IV, Suhariyanto menjelaskan, ada sepuluh sektor yang masih mengalami kontraksi, meski tak sedalam pada kuartal sebelumnya. Ia mencontohkan sektor transportasi dan perdagangan. Pada triwulan II, sektor ini mengalami kontraksi 30,80. "Namun pada triwulan IV terlihat arah pemulihan dengan minus 13,42 persen," katanya.

Suhariyanto bahwa dalam menghadapi wabah Covid-19 bahwa masyarakat dan pemerintah harus kompak. Misalnya mengenai gerakan 3M dan 3T: menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan; dan testing, tracing, treatment, untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Peran pemerintah adalah menggalakkan 3T, sedangkan 3M merupakan peran masyarakat.

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 melaporkan, 74 persen masyarakat sudah mematuhi hal tersebut. Toh pada awal 2021, kecenderungan penularan tetap mening-

tetapi hal tersebut patut disyukuri.

"Tidak terbayangkan kalau sektor pertanian ini mengalami kontraksi yang sangat dalam karena besarnya kontribusi pertanian terhadap ekonomi," jelasnya.

Dilihat dari subsektornya, ada dua dari tujuh pertanian yang mengalami kontraksi. Keduanya adalah peternakan (minus 0,33 persen) serta kehutanan dan pennebangan kayu (minus 0,03 persen).

Sisanya yang berada di jalur positif yaitu tanaman pangan (3,54 persen), tanaman hortikultura (4,17 persen), tanaman perkebunan (1,33 persen),

### Bentuk Transformasi dan Pemanfaatan Ekonomi Digital



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Sedangkan sektor yang mengalami pergerakan positif salah satunya adalah pertanian.

Sedangkan pada kuartal III (Juli-September 2020) lalu, pertumbuhan Indonesia menurun hingga minus 3,49 persen. Kondisi di kuartal III lebih baik dari kontraksi terdalam kuartal II yang mencapai minus 5,32 persen.

"Kalau patuh protokol kesehatan dan vaksinasi lancar, sektor seperti transportasi bisa kembali seperti semula. Ini perlu kerja sama erat pemerintah dan masyarakat. Kalau masyarakat tidak patuh protokol, ini akan jadi hambatan besar," tandasnya.

Tersirat dari pernyataan Kepala BPS

kat, bahkan setelah ada vaksinasi.

Jelas ekonomi memiliki dinamikanya sendiri. Tetap ada sektor yang masih ekspansif, salah satunya adalah pertanian. Suhariyanto mengatakan bahwa pertanian tumbuh 1,75 persen. Pertanian merupakan 7 dari 17 sektor yang positif.

"Struktur PDB [produk domestik bruto] 2020 Indonesia tidak berubah berubah, yaitu industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Dengan catatan pertanian kontribusinya 13,7 persen," katanya.

Ia menjelaskan bahwa realisasi tersebut cukup menggembirakan meski pertumbuhan pertanian 2020 lebih lambat dari tahun sebelumnya. Akan

jasa pertanian dan perkebunan (1,60 persen), dan perikanan (0,73 persen).

"Ada catatan khusus mengenai peternakan. Selama 2020 mengalami kontraksi karena beberapa hal yaitu permintaan yang sangat melemah. Kita tahu banyak hotel dan restoran tutup karena pandemi. Pendapatan masyarakat juga turun tajam sehingga produk peternakan melemah. Jadi bisa disadari negatif," ucap Kecuk.

Apapun, sebagian sektor ekonomi telah terkulai sebagai dampak wabah global. Namun, beberapa sektor masih sanggup bertahan, bahkan mengalami kemajuan. Semoga makin banyak harapan. ●



# EKONOMI DIGITAL SALAH SATU JALAN KELUAR

**E**konomi digital, sederhananya jual-beli dan transaksi melalui jaringan internet, merupakan salah satu pilihan agar ekonomi tetap berjalan. Dinamika pasar telah menunjukkan kecenderungan itu.

Laporan e-Conomy SEA 2020 mengungkapkan, 40 juta orang online untuk pertama kalinya pada 2020. Lebih dari separuhnya, sekitar 25,5 juta pengguna berada di Indonesia sebagai pasar terbesar ekonomi digital.

Entah bagaimana tahun ini. Namun, pada tahun lalu saja, ekonomi digital di Indonesia secara keseluruhan diperkirakan mencapai 44 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan Rp624,2 triliun.

Proyeksi hasil kajian kolaborasi raksasa digital Google bersama Temasek (induk perusahaan-perusahaan BUMN Singapura) dan, Bain & Company (perusahaan konsultan manajemen global yang berpusat di Boston, Massachusetts, AS, memperkirakan, angka per 2020 itu akan melesat hampir tiga kali lipat pada 2025 mencapai sekitar 124 miliar dolar AS.

Dalam laporan yang berjudul "At full velocity: Resilient and Racing Ahead" (Dengan Kecepatan Penuh: Tangguh dan Melaju ke Depan), Direktur Pegelola Google Indonesia, Randy Jusuf, turut angkat bicara. Ia mengatakan, sektor perdagangan elektronik digital (dagang el) tumbuh 54 persen menjadi 32 miliar dolar AS pada 2020, setelah tercatat baru mencapai 21 miliar pada 2019.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh aktivitas masyarakat Indonesia yang mencoba berjualan di kanal digital. Google

mencatat terdapat pertumbuhan hingga lima kali lipat jumlah supplier lokal yang berjualan daring setelah wabah melanda.

Toh tetap ada sektor bisnis digital yang terdampak oleh wabah, Antara lain pariwisata dan transportasi. Secara berurutan, kedua sektor itu mengalami penyusutan pada kuartal II (April-Juni) 2020 secara tahunan masing-masing sebesar 18 persen dan 24 persen. Dengan total gross merchandise value, nilai perdagangan kotor, masing-masing sebesar lima miliar dan tiga miliar dolar AS.

"Memang terhambat tetapi, seperti yang ditunjukkan laporan ini, hingga 2025 keduanya diperkirakan akan bangkit dalam jangka pendek hingga menengah," kata Randy dalam konferensi virtual, akhir tahun lalu.

Dari sisi konsumen, pada 2020, lebih dari sepertiga konsumen layanan digital di Asia Tenggara mulai menggunakan layanan online baru karena COVID-19. Di Indonesia pun, 37 persen konsumen digital menggunakan layanan baru karena wabah.

Lebih dari setengah konsumen digital baru di Tanah Air (56 persen) berasal dari daerah non-metro (di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Dari jumlah itu, 93 persen antaranya mengaku akan terus menggunakan setidaknya satu layanan digital setelah wabah berakhir.

Di samping itu, waktu pemanfaatan digital rata-rata per hari selama pandemi untuk tujuan pribadi tercatat meningkat, dari 3,6 jam sebelum pandemi menjadi 4,7 jam selama PSBB dan kemudian 4,3 jam setelah PSBB. •



# CARA ERICK THOHIR MEMAINKAN EKONOMI DIGITAL

Erick Thohir sukses meluncurkan aplikasi Pasar Digital ( PaDi) UMKM. Dalam satu semester, transaksinya mencapai Rp11,4 triliun.

Virtual Expo PaDi UMKM  
menjadi sarana meningkat-  
kan perannya.

Masih penasaran? Buka saja laman web [padiumkm.id](http://padiumkm.id). Semuanya akan lebih jelas. Terlebih lagi, PaDi UMKM keluaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini menggelar expo secara virtual, yang berarti menggunakan jaringan internet melalui laman web tadi.

PaDi UMKM Virtual Expo 2021 digelar pada 15-22 Februari 2021 pada pukul 10.00 sampai 19.00 WIB. Tercatat lebih dari 2.000 buyer group (pengunjung) BUMN yang siap mengunjungi 244 lapak UMKM dalam kegiatan ini.

"Semoga melalui virtual expo ini, buyer group BUMN semakin mengenal produk yang ditampilkan dalam pameran ini, dan akhirnya dapat mening-

katkan belanjanya pada UMKM binaan organisasi maupun instansi," kata Ketua Panitia Pelaksana PaDi Virtual Expo 2021, Loto Srinaita Ginting.

Acara Expo ini diharapkan dapat memperkuat sinergi kemitraan BUMN dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BUMN), serta menumbuhkan jumlah transaksi di platform PaDi UMKM. PaDi atau Pasar Digital UMKM dibentuk dengan tujuan membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya BUMN.

Dalam acara pembukaan, Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, mengatakan dengan membangun ekosistem rantai nilai dan pasokan

# OPENING CEREMONY

## VIRTUAL EXPO 2021

Pasar Digital UMKM Indonesia

15 - 22 FEBRUARI

Oleh :

## ERICK THOHIR

Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

15 FEBRUARI 2021

Pukul 12:00 WIB Hanya di [padiumkm.id](https://padiumkm.id)

## UMKM TANGGUH, INDONESIA MAJU!

DIDUKUNG OLEH:

DIDUKUNG OLEH:



kan berkelanjutan antara BUMN dan UMKM, maka akan sekaligus dapat mendorong peningkatan dan daya saing beragam produk karya anak bangsa. Sinergi melalui PaDi UMKM ini pun diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

"Selaras dgn arahan kebijakan Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi, maka kemitraan antara BUMN dengan UMKM menjadi semakin penting karena punya peran strategi untuk kita tingkatkan dalam satu ekosistem ekonomi yang saling mendukung dan menguntungkan secara berkelanjutan," ungkap Pahala dalam Peresmian Pembukaan PaDi UMKM Virtual Expo 2021 pada Senin, 15 Februari 2021.

Pahala berharap interaksi bisnis yang terjadi selama acara virtual ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi kemitraan usaha antara perusahaan BUMN dan UMKM. "Kemitraan bisnis BUMN dengan UMKM akan semakin memperkuat ekosistem perekonomian nasional ke depan menuju Indonesia maju," tuturnya.

Ia mengatakan upaya ini merupakan bagian dari peningkatan ketahanan dan daya saing produk UMKM dengan mengintegrasikannya dengan BUMN. Upaya ini diharapkan memberikan multiplier effect dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

"Telah kita ketahui bersama bahwa mulai dari tahun lalu di Agustus 2020 sampai saat ini, kita sudah melakukan sinergi tersebut melalui launching PaDi UMKM dan diawali oleh sembilan BUMN di mana total transaksi yang dilakukan melalui padi UMKM saat ini sampai akhir Januari 2021 sudah bisa mencapai sebesar Rp 11,4 triliun," kata Pahala.

Dia menyebutkan, kemitraan BUMN dengan UMKM ini memiliki peran strategis untuk bisa saling mendukung dan menguntungkan sehingga bisa tercipta ekosistem rantai nilai (*value chain*) dan rantai pasok (*supply chain*) yang berkelanjutan. "Nah kita tentunya berharap bahwa dari 9 BUMN yang sudah melaksanakan pengadaan melalui

padi UMKM ini bisa terus meningkat ke depannya," imbuhnya.

Pahala mengatakan PaDi UMKM Virtual Expo 2021 merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai pengadaan BUMN dari UMKM. "Di mana penyelenggaraan padi UMKM Virtual Expo 2021 ini kita harapkan akan bisa menjadi bagian penting dari berbagai kebijakan dan program serta kegiatan di Kementerian BUMN untuk bisa mendorong peningkatan value creation.

"Sehingga BUMN dapat digunakan lebih banyak lagi pengadaan melalui

efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan.

Di samping itu bagi Kementerian BUMN, platform ini membantu me-monitoring belanja BUMN pada UMKM. Dalam PaDi UMKM, Telkom berperan sebagai Data Centralized Agregator termasuk B2B PaDi UMKM. Sementara itu, 8 BUMN yakni PT PP Tbk (PTPP), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT



berbagai macam produk UMKM untuk kebutuhan proses produksi dan proses kerja dengan modal bisnis yang saling memberikan manfaat dan nilai tambah secara berkelanjutan," kata mantan Dirut PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) ini.

Terlebih lagi, Menteri BUMN Erick Thohir sejak tahun lalu telah mengeluarkan mandat untuk pengadaan barang-barang di BUMN dengan nilai kontrak di bawah Rp 14 miliar harus dilakukan melalui UMKM. Maka, jadilah PaDi UMKM sebagai platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong

Pegadaian, dan PT PNM akan bertindak sebagai Top Pilot.

Top pilot ini untuk delapan kelompok kegiatan UMKM, termasuk Rumah Kreatif BUMN (RKB) dan Community Development Center (CDC) masing-masing BUMN. Selanjutnya tiga BUMN akan bertindak sebagai lembaga pembiayaan, yakni BRI, Pegadaian, dan PNM.

Sedangkan PaDi UMKM Virtual Expo 2021 menghadirkan produk vendor UMKM terpilih yang telah dihimpun oleh tujuh organisasi atau instansi pengampu UMKM yaitu HIPMI, IWAPI, NU, Muhammadiyah, Dekranas, Bhayangkari, dan Kementerian

## • INFO UTAMA

Koperasi & UKM. Mengutip laman PaDi UMKM, Kementerian BUMN melalui platform ini memberikan peluang dan ruang yang besar kepada pelaku UMKM untuk menjadi pemasok dan vendor BUMN selain sebagai sarana monitoring belanja pengadaan barang dan jasa BUMN kepada UMKM.

Saat peresmian Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah, PaDi UMKM, ikrarnya adalah tetap menggerakkan ekonomi di masa pandemi dengan belanja konsumsi. Menteri BUMN Erick Thohir menilai, peningkatan belanja khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan mendorong bergeraknya perekonomian masyarakat.

"Dengan begitu, diharapkan perekonomian masyarakat dapat pulih lebih cepat," ujarnya saat meresmikan platform Pasar Digital (PaDi) UMKM melalui *video conference*, Senin, 17 Agustus 2020. Menurut dia, peran BUMN dalam mewujudkan upaya pemulihan ekonomi itu salah satunya diwujudkan melalui PaDi UMKM.

"Ditambah lagi jika PaDi UMKM dikoneksikan dengan bela pengadaan

dan laman Usaha Kecil Menengah (UKM), maka saya yakin akan semakin memperluas ekosistem bagi UMKM," imbuhnya.

Selain itu, Erick menilai, kehadiran PaDi UMKM memberikan beragam keuntungan baik bagi UMKM, BUMN maupun pemerintah. "Bagi UMKM, kemudahan yang diperoleh, antara lain akses pasar yang lebih luas hingga BUMN, e-commerce skala lokal dan global, pembiayaan atau permodalan, dan insight bagi UMKM untuk peningkatan kualitas produk," jelasnya.

Bagi BUMN, Erick mengatakan, PaDi UMKM memudahkan pembelanjaan kebutuhan kantor dengan *seller* atau penjual yang terverifikasi dan monitoring procurement yang jelas. Di samping itu, dengan adanya PaDi UMKM, Kementerian BUMN juga dapat memonitor kontribusi belanja BUMN terhadap UMKM seluruh Indonesia.

"Sedangkan bagi pemerintah, adanya PaDi UMKM dapat menjadi dasar yang kuat untuk program peningkatan ekonomi rakyat dengan memberikan data valid terkait profil UMKM dan pemetaan usaha rakyat,"

sambung Erick.

Nah, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menyatakan, salah satu target program itu adalah keberlangsungan dan peningkatan penyerapan produk UMKM oleh BUMN. "Dalam hal ini, Telkom berperan aktif sebagai salah satu pelopor penting pembinaan UMKM di rumah BUMN," imbuhnya.

Ia menambahkan, Telkom sendiri, telah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam pemberdayaan UMKM melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Menurut dia, Telkom melalui infrastruktur dan layanan Information and Communication Technologies (ICT) yang dimiliki, siap memastikan kesuksesan PaDi UMKM. "Telkom berkomitmen terus memberikan kontribusi terbaik demi dapat memajukan pelaku UMKM dan tentunya roda perekonomian Indonesia ke depan," tegasnya.

Ririek juga mengatakan, di Indonesia saat ini terdapat lebih dari 60 juta pelaku UMKM, sedangkan UMKM yang bergabung dalam PaDi UMKM mencapai 56.000. "Secara bertahap pelaku UMKM lainnya dapat bergabung di platform PaDi UMKM," ujarnya. ●







# SILAKAN UMKM YANG BERMINAT

**K**ementerian BUMN segera memberdayakan lagi marketplace [padiumkm.id](https://padiumkm.id) atau Pasar Digital (PaDi) UMKM. Setelah meraup Rp 11,4 triliun dalam 5,5 bulan peluncuran, PaDi UMKM akan menambah jumlah perusahaan pelat merah yang terlibat.

"Saat ini kami sedang dalam proses perluasan implementasi ke-47 BUMN lainnya," kata Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, Senin, 16 Februari 2021.

Inisiator PaDi UMKM adalah Kementerian BUMN pimpinan Erick Thohir bersama Kementerian Koperasi dan UKM, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Sementara ini ada sembilan BUMN yang terlibat. Mereka adalah Telkom, BRI, PT, Waskita, Wijaya Karya, Pupuk Indonesia, Pertamina, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani.

Berbeda dengan yang lain, marketplace ini bertujuan untuk membuka akses pasar bagi UMKM untuk masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya BUMN. Sehingga dalam situs resmi mereka, [padiumkm.id](https://padiumkm.id), salah satu fitur yang tersedia yaitu e-procurement alias pengadaan elektronik.

Menurut Loto, penambahan jumlah BUMN ini sudah mempertimbangkan hasil evaluasi pada 9 perusahaan negara yang ikut di tahap awal. Sehingga targetnya, 47 BUMN baru ini bisa masuk pada kuartal II 2021.

Jika UMKM berminat menjadi mitra atau pemasok BUMN,

berikut caranya:

Klik "Daftar" di pojok kanan atas halaman utama PaDi UMKM B2B.

Isi Kelengkapan data pada step 1 (Nama Perusahaan, NPWP, SIUP, TDP, NIB, Jenis Kegiatan Usaha dan BUMN Pengampu), kemudian klik "BERIKUTNYA".

Pada step 2, isi alamat perusahaan dan informasi pembayaran, kemudian klik "BERIKUTNYA".

Berikutnya, pada step 3 masukkan data Person in Charge (PIC) Perusahaan, kemudian Klik "BERIKUTNYA".

Pada step 4, upload kelengkapan dokumen dengan format JPG. atau PNG. dengan ukuran maksimal 1MB, Kemudian klik "DAFTAR".

Setelah klik daftar, maka toko yang didaftarkan akan masuk ke verifikasi tim PaDi UMKM. Apabila sudah diverifikasi, akan masuk email ke yang didaftarkan dan mohon untuk melakukan aktivasi serta membuat password.

Setelah mengirimkan permohonan registrasi, mohon tunggu paling lambat tiga hari kerja untuk proses review dan verifikasi.

Jika belum lolos verifikasi, silakan mendaftar kembali dan pastikan untuk melengkapi semua informasi yang dibutuhkan.

Jika berhasil terverifikasi, Anda akan mendapatkan email notifikasi untuk melakukan aktivasi akun. Segera aktivasi akun Anda, buat password baru dan Anda telah bergabung dengan PaDi UMKM B2B!

Semoga sukses!!! •

# PENGALAMAN BERHARGA DARI TESLA

Tesla Inc. lebih memilih berinvestasi di India untuk pabrik mobil bertenaga baterai. Namun, Indonesia sebenarnya lebih berpotensi mengembangkan industri sepeda motor bertenaga baterai. Jadi, belum harus putus asa sambil meningkatkan kepastian kita sebagai bangsa.

Perusahaan pengembang mobil bertenaga listrik paling terkemuka, Tesla Inc., memang sudah mengumumkan rencana investasinya di India. Dari India, Kepala Menteri Negara bagian Barat Daya M.B.S. Yediyurappa juga mengakui bahwa perusahaan penjual pengembangan mobil listrik tersebut, akan membuka lebih dulu pusat penelitian dan pengembangan.

Pemilihan lokasi di India sangat beralasan, mengingat Bengaluru merupakan tempat pabrik otomotif lainnya seperti Mercedes-Benz, Great Wall Motors, General Motors, Continental, Mahindra & Mahindra, Bosch, Delphi, sampai Volvo membuka pusat penelitian dan pengembangan di sana. Bengaluru juga dikenal sebagai 'Silicon Valley Asia' atau pusat teknologi informasi India. Serta tempat tinggal para jutawan di India.

India memang telah selangkah lebih jauh dibandingkan dengan Indonesia. Pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi bahkan be-

rani memberi insentif sebesar 4,6 miliar dolar AS (setara Rp64,5 triliun) kepada perusahaan yang membuat fasilitas pembuatan baterai mobil listrik. Sebagai negara berpenduduk terbanyak kedua di dunia, maka wajar saja India memiliki potensi besar sebagai pasar pengguna kendaraan listrik. Ditambah pemerintahnya juga telah berkomitmen untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto enggan berkomentar banyak. "Maaf, saya ada non-disclosure agreement (perjanjian tak terbuka ke publik). Tidak bisa disclose (membuka) apa-apa," ujarnya.

Anak buah Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan itu menjelaskan bahwa, proposal yang disorongan Tesla ke pemerintah adalah pembangunan energy storage system (ESS). Yakni semacam penyimpanan listrik ekstra besar. Namun, belum jelas lokasi, hing-







ga teknis berinvestasi di tanah air.

Sebagai perusahaan, Tesla Inc. tumbuh sangat pesat. Sahamnya meroket tajam di transaksi perdagangan bursa. Bahkan pada tahun lalu, saham Tesla tercatat naik sebesar 743 persen. Kapitalisasinya mencapai USD744 miliar atau setara Rp 10.800 triliun.

Dengan kapital keuangan segemuk itu, maka wajar saja pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ingin sekali perusahaan otomotif paling inovatif di dunia itu masuk ke Indonesia.

Apalagi, pemerintah sedang mengupayakan hilirisasi kendaraan listrik di tanah air. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan pemerintah mengakselerasi pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri seiring dengan tren dunia yang bergerak ke arah penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan.

"Pemerintah telah menetapkan target bahwa pada 2025 produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) mencapai 400 ribu unit untuk roda empat dan 1,76 juta unit roda dua.

Target produksi ini akan terus meningkat hingga pada 2030 yang akan mencapai 600 ribu unit roda empat dan 2,45 juta unit roda dua," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (IL-MATE) Kemenperin Taufiek Bawazier di Jakarta, Kamis, 18 Februari 2021.

Ia menjelaskan sasaran tersebut ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian target pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030 dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama produsen otomotif dunia. "Pengembangan kendaraan listrik bahkan diyakini dapat menarik investasi di sektor industri komponen utama seperti baterai, motor listrik dan power control unit (PCU) yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi," kata Taufiek.

Pemerintah, kata dia, juga telah mengeluarkan beleid untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 terkait percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

untuk transportasi jalan yang diselenggarakan melalui percepatan pengembangan industri KBLBB dalam negeri, pemberian insentif, penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBLBB, pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBLBB, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Selain itu Kemenperin telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) serta Permenperin Nomor 28 Tahun 2020 terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap (CKD) dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (IKD).

Taufiek menegaskan akselerasi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri juga dilakukan dengan meningkatkan awareness masyarakat, antara lain melalui kerja sama antara Kemenperin dengan New Energy and Industrial Technology Development

## • INFO UTAMA

Organization (NEDO) untuk melaksanakan pilot project *"The Demonstration Project To Increase Energy Efficiency Through Utilization Of Electric Vehicle And Mobile Battery Sharing"*.

"Proyek demonstrasi kendaraan listrik hasil kerja sama dengan NEDO Jepang ini bertujuan untuk menge-

Kemenperin, Restu Yuni Widayati.

Proyek tersebut tidak hanya berupa uji coba kendaraan listrik yang akan dilaksanakan di Kota Bandung dan Provinsi Bali. Namun juga dilakukan studi kendaraan listrik oleh Konsorsium Institusi R&D Indonesia yang terdiri dari Asosiasi Industri Sepeda Mo-

seperti penggunaan sepeda motor listrik oleh konsumen langsung (skema B to C), pegawai instansi pemerintah (skema B to B to C), pelaku bisnis (B to B), dan melibatkan sebanyak 300 unit kendaraan roda dua (EV bike), 1000 unit baterai, 40 unit baterai exchanger station (BEx Station) dan 4 unit kendaraan roda empat (Mikro EV).

"Pengguna akan merasakan pengalaman baru mengendarai sepeda motor listrik dan teknologi battery sharing yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan penukaran baterai secara langsung pada baterai exchanger station tanpa waktu tunggu," tutup dia.

Kembali ke soal Tesla, hendaknya jangan kecewa dulu. Membangun pabrik mobil di India bukan berarti Tesla mengucapkan good bye Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, sasaran investasi Tesla di Indonesia saat ini bukanlah hendak membangun pabrik mobil listrik atau baterenya.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR pada Selasa, 9 Februari 2021 lalu, Nicke mengatakan bahwa rencana investasi ke Indonesia adalah untuk mengembangkan sistem penyimpanan energi (energy storage system, ESS). "Tesla minat di energy storage, bukan di electric vehicle battery, dia datang ke Indonesia lihat potensi menjaga keandalan suplai dari PLTS [pembangkit listrik tenaga surya] adalah ESS, ini pasar besar. Pertamina pun masuk ke sana," ujarnya.

Nicke juga menjelaskan bahwa Indonesia lebih berpeluang untuk mengembangkan otomotif roda dua atau sepeda motor bertenaga batere dibandingkan dengan roda empat. Potensi itu lebih besar lima kali lipat dibandingkan dengan roda empat. "Pada 2021 yang kita lakukan JV [joint venture] establishing, lalu berpartner dengan tiga global player," ungkap Nicke.

Jadi, bagaimana dengan kesiapan industri sepeda motor bertenaga batere lithium. Kesempatan masih terbuka. Mobil bisa menyusul kemudian jika memang layak dari berbagai segi. Investasi bidang industri mobil atau motor bertenaga batere memiliki logikanya sendiri-sendiri. ●



nalkan kendaraan listrik dan teknologi battery sharing, dan tentu saja akan mendorong tumbuhnya pasar sebagai basis pembangunan industri kendaraan listrik di dalam negeri," kata Plt Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP)

tor Indonesia (AISII), Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kemenperin, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Udayana, serta Universitas Indonesia.

Proyek kendaraan listrik itu, kata dia, dilakukan melalui beberapa skema





# ANTARA POTENSI DAN REALISASI INVESTASI

**K**ecenderungan perubahan industri otomotif berbahan bakar minyak (BBM) ke energi baterai sebenarnya bukan sekadar soal mobil listrik. Belajar dari pengalaman mobil ber-BBM yang memiliki lebih dari 16 ribu komponen saja sudah terlihat potensi bisnis dan kerumitannya.

Nah, untuk kendaraan bertenaga listrik, Direktur Utama Pertamina menjelaskan, salah satu peluangnya adalah industri baterai untuk kendaraan (electric vehicle (EV) battery. Yang ini saja belum tergarap optimal jika melihat potensi bahan baku baterai nikel yang menjadi andalan Indonesia.

Nicke mengungkapkan, secara umum Indonesia akan melalui tujuh tahap untuk bisa masuk ke bisnis EV battery. Mulai dari tahap penambangan hingga tahap daur ulang baterai.

"Tahapan sekarang EV battery, yang mau kita bangun ada tujuh step. Dari mulai mining, refining, kemudian, membangun precursor plant, cathode plant, battery cell, battery pack, hingga recycling," papar Nicke dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, 9 Februari 2021.

Pertamina, menurut Nicke akan masuk di salah satu dari tujuh proses tersebut. Dia mengatakan Pertamina akan masuk dalam pembuatan pabrik precursor, katode, sel baterai, kemasan baterai, hingga daur ulang baterai.

Hal itu akan dilakukan Pertamina bersama PLN. Sementara untuk proses hulunya akan dilakukan oleh Antam dan Inalum. "Nah kita akan masuk di empat yang tengah. Mulai dari precursor, katode, battery cell, battery pack, dan juga recycling dengan PLN. Kalau di hulu ada Antam dan Inalum," ujar Nicke.

Tahun ini dia juga mengungkapkan akan ada pembentukan perusahaan patungan alias joint venture (JV). Kemudian perusahaan patungan itu akan bermitra dengan beberapa pemain baterai global.

Dia mengungkapkan sudah ada kesepakatan dengan salah satu perusahaan China, kemudian perusahaan asal Korea Selatan akan menyusul. "Di 2021 yang kita lakukan JV establishing, lalu berpartner dengan tiga global player. Sudah ada tanda tangan dengan Chinese company. Kemudian kita sedang dalam program insyaallah minggu ini atau minggu depan dengan Korean company," ujar Nicke.

Sejak tahun lalu, memang sudah terdengar dua raksasa global baterai, yakni Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) dari China dan LG Chem Ltd asal Korea Selatan akan masuk ke Indonesia. Yang ketiga adalah Panasonic Jepang yang menjadi pemasok baterai untuk mobil Tesla. Persoalan kembali pada potensi dan realisasi investasi di negeri kita. ●

# JOKOWI TARGETKAN PELABUHAN TANJUNG CARAT SELESAI 2023



Bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan itu, produsen karet nomor satu di Indonesia. Sawit tercatat nomor empat. Hampir separuh cadangan emas hitam alias batu bara nasional, terpendam pula di sana. Tapi Sumsel belum memiliki pelabuhan samudera. Harapan muncul dari Tanjung Carat.

**M**enteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi menegaskan, Pemerintah Pusat akan segera melakukan pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat yang akan ditandai dengan ground breaking pada akhir tahun 2021.

"Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi layak tidaknya dibangun pelabuhan. Tadi saat meninjau lokasi kita sudah ketemu satu titik dengan kedalaman kurang lebih 12 hingga 18 meter. Kedua adalah jangkauan, ketiga adalah tanahnya bisa dimungkinkan untuk dibangun pelabuhan. Nah se-

muanya itu sudah memungkinkan oleh karenanya kita sampaikan, *Insha Allah* bisa dilaksanakan," tegas Menhub Budi Karya Sumadi yang didampingi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru saat meninjau lokasi Pelabuhan laut dalam (*deep sea port*) Tanjung Carat di Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (20/2).

Dalam pengerjaannya proyek ini dikatakan Menhub, akan dilakukan investasi oleh pemerintah maupun swasta.

"Tentu dalam minggu-minggu ini bersama pak Kemenko, nanti akan di koordinasikan dengan Bapenas apakah pemerintah yang membiayainya, atau



swasta. Kita ingin memastikan dibangun mulai 2021 ini selesai tahun 2023, oleh sebab itu pula kita harus merapatkan ini lagi," pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Herman Deru menyebut pada saat peninjauannya dilokasi bersama Menhub Budi Karya Sumadi telah ditemukan titik yang paling ideal untuk dibangun Pelabuhan Tanjung Carat.

### **Sumsel Sambut Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat**

Bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan itu, produsen karet nomor satu di Indonesia. Sawit tercatat nomor empat. Hampir separuh cadangan emas hitam alias batu bara nasional,

terpendam pula di sana. Tapi Sumsel belum memiliki pelabuhan samudera. Harapan muncul dari Tanjung Carat.

Berlokasi di sebelah timur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung-Api-api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, terbentang wilayah Tanjung Carat. Nah, di Tanjung Carat ini rencana pengembangan pelabuhan laut dalam (deep sea port) menunggu realisasi.

Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) rupanya hendak mempercepat realisasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Harap maklum, sementara kawasan Tanjung Api-api adalah proyek nasional, pelabuhan laut dalam Tanjung Carat yang melekat dengan KEK itu merupakan kawasan strategis provinsi (KSP) di Sumsel.

Kehendak itu rupanya mendapat tanggapan positif dari pemerintah pusat. Tanggapan positif itu terungkap dalam rapat

Gubernur HD secara virtual bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Dr Suharso Monoarfa dan sejumlah pihak terkait di Command Centre Gubernuran Sumsel, Kamis, 11 Februari 2021 petang.

Alhasil, pemerintah pusat memastikan persetujuannya untuk membangun Pelabuhan Tanjung Carat. Menurut rencana, peletakan batu pertama pengembangan pelabuhan ini akan berlangsung pada akhir tahun ini juga.

Maka Gubernur HD pun tersenyum menyambut tanggapan Menhub dan Menteri PPN/Bappenas itu. "Kita sangat menanti-



kan keputusan ini. Harapan masyarakat untuk pembangunan pelabuhan ini akhirnya akan segera terwujud. *Ground-breaking* pada akhir 2021 mendatang,” kata Herman Deru dengan senyum ber-seri-seri usai rapat.

Dia menuturkan, pembangunan pelabuhan Tanjung Carat ini memang sudah menjadi harapan terpendam. Terlebih keberadaan pelabuhan tersebut memang menjadi kebutuhan mendasak. “Bukan untuk tambahan fasilitas, memang sudah menjadi kebutuhan. Puluhan tahun kita nantikan keputusan pembangunan pelabuhan ini dengan melalui proses yang panjang,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, keberadaan pelabuhan tersebut tentu akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Sumsel. Sebab, pelabuhan tersebut akan mempercepat distribusi

tentu akan menjadi tujuan utama para investor untuk berinvestasi di segala bidang,” tambahnya.

HD juga melihat pelabuhan itu akan berimbas pada sektor lainnya, seperti perikanan. Ingat-ingat saja, Tanjung Carat itu dekat dengan Kampung Nelayan Sungsang yang sudah menjadi objek wisata lumayan ramai sebelum wabah Covid-19 melanda.

“Pemanfaatan pelabuhan ini terintegrasi. Bukan hanya hasil bumi, tapi juga akan berdampak ekonomi untuk hasil laut. Kita sendiri juga akan menjadikan kawasan itu sebagai tempat pelelangan ikan terbesar. Termasuk juga imbas pada lalu lintas. Kemacetan juga bisa ditekan dengan adanya pelabuhan ini,” ungkapnya.

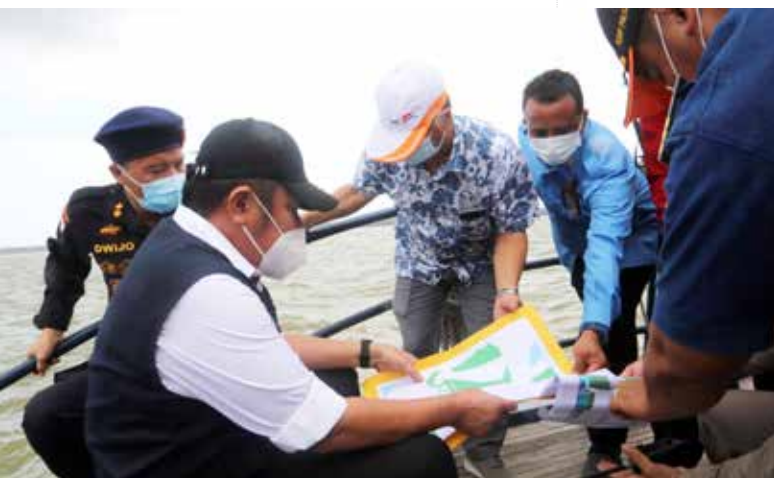
Pengembangan pelabuhan Samudera Tanjung Carat ini melengkapi rencana pembangunan infrastruktur sejenis

pihak-pihak terkait atas keputusan ini. “Keputusan ini sangat menggembirakan bagi masyarakat Sumsel,” tandasnya.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Menteri Suharso Monoarfa memastikan, pembangunan pelabuhan tersebut akan mulai pada akhir 2021. “Diharapkan ini bisa selesai pada 2023,” tambahnya.

Sedangkan Menhub Budi Karya berharap pembangunan pelabuhan Tanjung Carat akan berdampak ganda selain di bidang transportasi sehingga akan mendongkrak perekonomian secara keseluruhan. “Saya harapkan ini bisa berjalan sesuai rencana, karena ini dapat menjadi sarana untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Pembangunan pelabuhan Tanjung Carat Sumsel juga mendapatkan dukungan dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Ke-



berbagai produksi hasil Sumsel seperti sawit, karet hingga batu bara.

Sekadar info, saja, produksi sawit Sumsel berada di urutan ke-empat nasional. Karet malah nomor satu. Batu bara? Bukan sombong, hampir separuh cadangan nasional batu bara itu berada di bumi Sriwijaya.

“Selama ini kita belum memiliki pelabuhan samudera. Kita harapkan pelabuhan ini dapat mempercepat distribusi berbagai hasil produksi kita. Dengan begitu, ekonomi Sumsel akan semakin baik. Satu kelebihan Sumsel adalah pasarnya sudah tersedia,” terangnya.

Tidak hanya itu lanjut HD, pelabuhan Tanjung Carat tersebut nantinya juga akan semakin menarik minat investor untuk berinvestasi di Sumsel. “Sumsel

di kawasan timur Indonesia, tepatnya di Ambon, Maluku. Untuk pembangunannya, pemerintah pusat menyiapkan anggaran awal 69 juta dolar AS. Sedangkan untuk tahap awal pasca *ground-breaking* pada akhir 2021 mendatang, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk masing-masing proyek pelabuhan itu.

“Saya harapkan ini dapat menjadi semangat baru bagi kita. Saya instruksikan jajaran untuk mempersiapkan semua kebutuhan mulai dari administrasinya hingga aksi di lapangan. Termasuk juga untuk Kabupaten Banyuasin agar mempersiapkan diri. Ini berdampak luas bagi kemajuan seluruh Sumsel,” tegasnya.

Tak lupa, Gubernur HD mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Menhub, Menteri PPN dan segenap

menko Marinvest Septian Harjo Seto. Ia berharap pelabuhan Tanjung Carat melebarkan peluang Sumsel menjadi daerah yang sangat maju dengan pertumbuhan ekonomi yang baik.

“Apalagi Sumsel memiliki hasil bumi seperti batubara. Ini harus mendapatkan dorongan. Dengan pelabuhan itu, produksi dan permintaan batubara akan semakin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi semakin pesat,” ungkapnya.

### Sosialisasi dan Kunjungan Lokasi

Bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan itu, produsen karet nomor satu di Indonesia. Sawit tercatat nomor empat. Hampir separuh cadangan emas hitam alias batu bara nasional, terpendam pula di sana. Tapi Sumsel belum



memiliki pelabuhan samudera. Harapan muncul dari Tanjung Carat.

Berlokasi di sebelah timur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung-Api-api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, terbentang wilayah Tanjung Carat. Nah, di Tanjung Carat ini rencana pengembangan pelabuhan laut dalam (*deep sea port*) menunggu realisasi.

Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) rupanya hendak mempercepat realisasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Harap maklum, sementara kawasan Tanjung Api-api adalah proyek nasional, pelabuhan laut dalam Tanjung Carat yang melekat dengan KEK itu merupakan kawasan strategis provinsi (KSP) di Sumsel.

Kehendak itu rupanya mendapat tanggapan positif dari pemerintah pusat. Tanggapan positif itu terungkap dalam rapat Gubernur HD secara virtual bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas Dr Suharso Monoarfa dan sejumlah pihak terkait di Command Centre Gubernur Sumsel, Kamis, 11 Februari 2021 petang.

Alhasil, pemerintah pusat memastikan persetujuannya untuk membangun Pelabuhan Tanjung Carat. Menurut rencana, peletakan batu pertama pengembangan pelabuhan ini akan berlangsung pada akhir tahun ini juga.

Maka Gubernur HD pun tersenyum menyambut tanggapan Menhub dan Menteri PPN/Bappenas itu. "Kita sangat menantikan keputusan ini. Harapan masyarakat untuk pembangunan pelabuhan ini akhirnya akan segera terwujud. Groundbreaking pada akhir 2021 mendatang," kata Herman Deru dengan senyum bersemi-seri usai rapat.

Dia menuturkan, pembangunan pelabuhan Tanjung Carat ini memang sudah menjadi harapan terpendam. Terlebih keberadaan pelabuhan tersebut memang menjadi kebutuhan mendesak. "Bukan untuk tambahan fasilitas, memang sudah menjadi kebutuhan. Puluh tahun kita nantikan keputusan pembangunan pelabuhan ini dengan melalui proses yang panjang," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, keberadaan pelabuhan tersebut tentu akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Sumsel.

Sebab, pelabuhan tersebut akan mempercepat distribusi berbagai produksi hasil Sumsel seperti sawit, karet hingga batu bara.

Sekadar info, saja, produksi sawit Sumsel berada di urutan ke-empat nasional. Karet malah nomor satu. Batu bara? Bukan sombong, hampir separuh cadangan nasional batu bara itu berada di bumi Sriwijaya.

"Selama ini kita belum memiliki pelabuhan samudera. Kita harap-

kan pelabuhan ini dapat mempercepat distribusi berbagai hasil produksi kita. Dengan begitu, ekonomi Sumsel akan semakin baik. Satu kelebihan Sumsel adalah pasarnya sudah tersedia," terangnya.

Tidak hanya itu lanjut HD, pelabuhan Tanjung Carat tersebut nantinya juga akan semakin menarik minat investor untuk berinvestasi di Sumsel. "Sumsel tentu akan menjadi tujuan utama para investor untuk berinvestasi di segala bidang," tambahnya.

HD juga melihat pelabuhan itu akan berimbas pada sektor lainnya, seperti perikanan. Ingat-ingat saja, Tanjung Carat itu dekat dengan Kampung Nelayan Sungsang yang sudah menjadi objek wisata lumayan ramai sebelum wabah Covid-19 melanda.

"Pemanfaatan pelabuhan ini terintegrasi. Bukan hanya hasil bumi, tapi juga akan berdampak ekonomi untuk hasil laut. Kita sendiri juga akan menjadikan kawasan itu sebagai tempat pelelangan ikan terbesar. Termasuk juga imbas pada lalu lintas. Kemacetan juga bisa ditekan dengan adanya pelabuhan ini," ungkapnya.

Pengembangan pelabuhan Samudera Tanjung Carat ini melengkapi rencana pembangunan infrastruktur sejenis di kawasan timur Indonesia, tepatnya di Ambon, Maluku. Untuk pembangunannya, pemerintah pusat menyiapkan anggaran awal 69 juta dolar AS. Sedangkan untuk tahap awal pasca groundbreaking pada akhir 2021 mendatang, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk masing-masing proyek pelabuhan itu.

"Saya harapkan ini dapat menjadi semangat baru bagi kita. Saya instruksikan jajaran untuk mempersiapkan semua kebutuhan mulai dari administrasi hingga aksi di lapangan. Termasuk juga untuk Kabupaten Banyuasin agar mempersiapkan diri. Ini berdampak luas bagi kemajuan seluruh Sumsel," tegasnya.

Tak lupa, Gubernur HD mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Menhub, Menteri PPN dan segenap pihak-pihak terkait atas keputusan ini. "Keputusan ini sangat menggembirakan bagi masyarakat Sumsel," tandasnya. •





# MENYONGSONG NEW PALEMBANG PORT OF TANJUNG CARAT

**M**enyebut New Palembang Port of Tanjung Carat menunjukkan pelabuhan ini berorientasi perdagangan internasional. Dampak rentetannya (multiplier effect) pun layak untuk menjadi bahan pertimbangan: menggerakkan ekonomi lokal berorientasi ekspor: batu bara, pupuk, sawit, karet, juga industri hilirnya. Tambahan pula sektor perikanan dan pariwisata. Kelak, ketika pandemi Covid-19 berlalu, semoga saja wilayah pelabuhan yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir Sumatera Selatan yang menopang ekonomi berkelanjutan hingga ke pedalaman.

Simak saja pandangan sejumlah pemangku kepentingan terkait rencana pengembangan pelabuhan samudera di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api, Banyuasin Sumatera Selatan itu.

## Rizal Ariansyah

**Eksekutif Senior di Badan Usaha Milik Negara**



Baru saja beralih jabatan dari Direktur Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Indonesia II atau Indonesia Port Corporation menjadi Direktur Keuangan dan

Umum di holding BUMN Asuransi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Rizal Ariansyah sempat mendalami potensi Tanjung Carat. Menurut dia, pelabuhan yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini dinilai sangat baik karena berada di laut lepas.

"Potensinya bagus karena Tanjung carat berada di laut hingga kedalaman air juga bagus dan sangat mendukung untuk taraf pelabuhan internasional," kata Rizal di Palembang, akhir 2020 lalu. Jika Pelindo II ditunjuk sebagai operator, sambungannya, BUMN bidang pelabuhan ini akan mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoperasikannya.

## Novita Wijayanti

**Anggota Komisi V DPR**



Saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Sumatera Selatan, Senin, 15 Februari 2021, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra alas Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII, Novita Wijayanti, mengungkapkan akan men-support pembangunan pelabuhan samudera di Tanjung Carat, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia berharap, Pelabuhan Tan-



jang Carat dapat menggantikan Boom Baru di tepi Sungai Musi yang selama ini menjadi pelabuhan utama di Sumatera Selatan. "Pelabuhan Boom Baru ini letaknya di pusat kota, kemudian sering menyebabkan kemacetan atau crowded. Jadi kita berpendapat akan semakin baik jika dipindahkan ke KEK Tanjung Api-api," ungkap Novi.

Menurut dia, Boom Baru tetap akan berfungsi untuk keperluan lainnya seperti angkutan penyeberangan penumpang. Sedangkan yang berskala ekonomi lebih besar dapat memanfaatkan Pelabuhan Tanjung Carat. "Sayang juga kalau perusahaan-perusahaan besar yang ada di sini, harus pindah ke provinsi lain (cuma) karena pelabuhan yang kurang layak," ujar Novi

## AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Ketua DPD RI



Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti optimistik pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat akan membantu menghidupkan iklim investasi di Sumatera Selatan (Sumsel). Ia pun mendukung pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat berlanjut setelah sempat tersendat-sendat.

"Pembangunan pelabuhan diproyeksikan akan mampu menghidupkan ekonomi yang lebih besar lagi, khususnya untuk kawasan Sumatera Selatan. Dengan adanya pelabuhan, distribusi barang dan jasa akan meningkat. Dengan demikian akan tumbuh aktivitas ekonomi," ungkap LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu juga optimis keberadaan pelabuhan ini akan meningkatkan daya tarik investasi. LaNyalla pun mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. "Pelabuhan ini adalah obyek ini sangat vital keberadaannya. Objek yang penting untuk meningkatkan perekonomian, sehingga realisasi pembangunan harus dilakukan," ujar LaNyalla.

Lewat Pelabuhan Tanjung Carat, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu juga yakin banyak investor yang akan hadir di Sumatera Selatan. Sumsel maju, Indonesia maju.

## Budi Karya Sumadi

Menteri Perhubungan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, Pemerintah Pusat akan segera melakukan pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat. Dari berbagai kajian, kata Menhub Budi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi



layak tidaknya membangun pelabuhan.

"Saat meninjau lokasi kita sudah ketemu satu titik dengan kedalaman kurang lebih 12 hingga 18 meter. Kedua adalah jangkauan, ketiga adalah tanahnya bisa dimungkinkan untuk dibangun pelabuhan. Nah semuanya itu sudah memungkinkan oleh karenanya kita sampaikan, Insya Allah bisa dilaksanakan," tegas Menhub Budi Karya Sumadi yang didampingi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru saat meninjau lokasi Pelabuhan laut dalam (deep sea port) Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sabtu, 20 Februari 2021.

Menurut Menhub Budi, investasi dalam pengembangan pelabuhan ini akan melibatkan pemerintah maupun swasta. "Tentu dalam minggu-minggu ini bersama pak Kemenko, nanti akan dikoordinasikan dengan Bappenas apakah pemerintah yang membiayainya, atau swasta," tandasnya.

## Suharso Monoarfa

Menteri PPN/Bappenas

Dalam rapat virtual atau *video conference* pada Kamis, 11 Februari 2021, pembahasan mengenai pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api Banyuasin melibatkan diskusi antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Alhasil, salah satu simpulan *video conference* itu menghasilkan kesepakatan penentuan waktu peletakan batu pertama (*ground breaking*) pengembangan satu pelabuhan di barat, yaitu Tanjung Carat, Sumatera Selatan dan satu di timur, Pelabuhan Ambon Baru di Maluku "Kita sepakati bersama bahwa pada akhir 2021 ini direncanakan November dapat dilakukan *Ground Breaking* pembangunan dua pelabuhan ini," tandas Monoarfa. •





# PELANTIKAN PERDANA PASCA PILKADA 2020

Rangkaian Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2020 memasuki babak baru dengan pelantikan mereka yang terpilih untuk mengemban amanah di daerahnya masing-masing. Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara mendapat giliran pertama bersama-sama.

**Y**ang dari Kalimantan Utara baru menjabat periode pertama. Sedangkan yang dari Sulawesi Utara memasuki jabatan periode kedua. Presiden melantik keduanya di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Februari 2021 dalam acara yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Zainal Arifin Paliwang dan Yansen T.P. masing-masing dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan Olly Dondokambey dan Steven O.E. Kandouw masing-masing dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

Sejatinya, pergantian akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Kaltara adalah 12 Februari 2021. Namun berkenaan libur Imlek, pemerintah (pusat) mengundur jadwal pelanti-

kan ke tanggal 15 Februari 2021.

"Insyaallah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilaksanakan besok 09.00 WIB," kata Asisten Bidang Pemerintahan Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, Minggu, 14 Februari 2020. Pada hari yang sama, Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan beserta keluarga sudah berada di Jakarta.

Sesuai standar keprotokolan, prosesi pelantikan di dalam Istana Negara, juga akan dihadiri oleh istri gubernur dan wakil gubernur terpilih serta masing-masing dua orang anaknya. "Masing-masing hanya boleh dihadiri dua orang anak. Ketua DPRD juga akan akan menghadiri pelantikan. Karena berkenaan pandemi Covid-19, prosesi akan melalui standar protokol kesehatan yang sangat ketat," ujarnya.

Pasca pelantikani, Datu Iqro memastikan tidak ada perayaan seperti hajatan atau s y -

ukuran di Jakarta. "Karena di Jakarta ada PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) skala mikro. Setiap pertemuan hanya dihadiri maksimal 20 orang," sebutnya sambil menginformasikan acara pelantikan juga menyediakan tayangan langsung secara virtual melalui jaringan internet.

Maka, berlangsunglah acara pelantikan diawali dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden oleh Presiden Joko Widodo kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih tersebut di Istana Merdeka. Selanjutnya, para gubernur dan wakil gubernur terpilih menjalani prosesi kirab menuju tempat pelantikan di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kirab diiringi oleh pasukan kehormatan Pas-pampres yang di-





batasi hanya sejumlah empat orang. Selama prosesi kirab, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mendampingi. Sedangkan di ruang pelantikan, undangan terbatas hanya mencakup 20 orang termasuk Mendagri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta pejabat terkait lainnya.

Pelantikan Zainal Arifin Paliwang dan Yansen T.P. dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2024.

Sementara Olly Dondokambey dan

“  
Pasangan Kepala  
Daerah Kaltara dan  
Sulut ini merupakan  
hasil Pilkada 2020  
yang tak berseng-  
keta di Mahkamah  
Konstitusi.

Steven O.E. Kandouw dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2024.

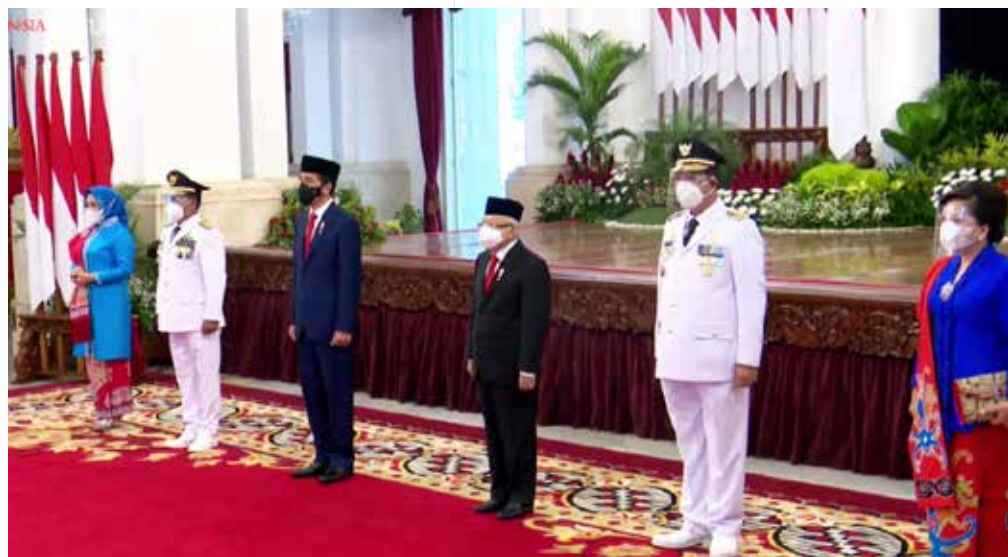
Dalam acara pelantikan tersebut, Kepala Negara mengambil sumpah jabatan bagi para gubernur dan wakil gubernur terpilih yang dilantik. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan

penggalan sumpah jabatan kepada masing-masing pasangan gubernur dan wakil gubernur.

Dengan demikian, Zainal Arifin Paliwang dan Yansen T.P. serta Olly Dondokambey dan Steven O.E. Kandouw telah resmi mengemban amanah masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Guber-

Pilkada di Sulawesi Tengah yang memilih pasangan Rusdi Mastura-Ma'mur Amin.

Sedangkan MK masih menyidangkan perkara perselisihan Pilkada 2020. Putusan awalnya sudah keluar pada hari yang sama dengan pelantikan pertama Gubernur-Wakil Gubernur hasil Pilkada 2020.



nur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Pasangan Kepala Daerah Kaltara dan Sulut ini merupakan hasil Pilkada 2020 yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Dari sembilan pemilihan Gubernur, tiga antaranya bebas dari sengketa atau perselisihan hasil Pilkada 2020 di MK. Satu Pilgub lain yang tanpa sengketa adalah

Dengan begitu, rangkaian pelantikan para kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan berlanjut sesuai dengan tahapannya. Yang pertama sudah, kita tunggu pelantikan para kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang mencakup 270 wilayah terdiri dari sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten seluruh Indonesia. ●

# GUBERNUR DAN WAGUB KALTARA TANPA EUFORIA

Sudah banyak kepala daerah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka perbuatan melanggar amanahnya. Tapi, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang justru mengunjungi KPK sehari setelah Presiden Joko Widodo melantiknya. Gubernur dan Wagub Kaltara ini tampak menghindari euforia, gembira berlebihan.

Bukan merayakan pelantikan sebagai Gubernur agenda pertama Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., di hari pertama kerjanya. Mantan Wakapolda Kaltara yang kini menjadi Gubernur itu malah menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sudah banyak menindak kepala daerah korup dan masuk penjara lantaran melanggar amanah jabatannya.

Begitulah, Gubernur Zainal berharap KPK dapat mendampingi dalam mengawal program pembangunan di provinsinya. Termasuk juga melindungi potensi alam seperti sumber daya laut yang menjanjikan kesejahteraan

aan rakyat.

Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang beserta jajarannya mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa, 16 Februari 2021, sehari setelah pelantikan di Istana Negara dalam rangka melakukan audiensi. Sedangkan pimpinan KPK mengingatkan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang beserta jajarannya agar memenuhi janji kampanye untuk mewujudkan pemerintahan Kaltara yang baik.

"Pimpinan KPK mengingatkan sekurangnya mengenai empat hal terkait pembangunan aparatur pemerintahan yang baik, kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan komitmen antikorupsi





yang diwujudkan dalam program-program pembangunan Kaltara,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding. KPK juga mengingatkan pentingnya memegang teguh integritas, tertib administrasi, dan mencegah potensi penyimpangan berujung korupsi.

Pencegahan korupsi di mata KPK, akan menjadi salah satu langkah untuk melahirkan pemerintahan yang baik. Terlebih di masa Pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan berat bagi pemerintah.

Ketua Tim Sinkronisasi, Transisi dan Percepatan Program Gubernur-Wagub Kaltara, Zainal-Yansen, Ari Junaedi mengungkapkan, pertemuan tersebut merupakan penegasan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara terhadap integritas dan perang melawan korupsi. “Gubernur dan Wagub ingin mewujudkan lingkup kedinasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, sebagai zona integritas dan antipungutan liar,” ujarnya.

Sebagai provinsi termuda di Indone-

sia, Ari mengungkapkan, Kaltara ingin memastikan pencegahan dini praktik korupsi. “Jadi, Pak Gubernur dalam kesempatan tersebut juga meminta bantuan kepada KPK untuk mensupervisi dan melakukan pembimbingan teknis terhadap setiap kegiatan pembangunan di Kaltara,” sambungnya.

Alasannya, korupsi muncul karena ada kesempatan dan tidak berjalannya fungsi pengawasan. “Maka inilah upaya awal untuk memastikan segala kegiatan pembangunan di Kaltara berjalan dengan baik dan tidak ada praktik korupsi,” tandasnya.

Terkait kehadiran Tim Sinkronisasi, Transisi dan Percepatan Program Gubernur-Wagub Kaltara, yang beranggotakan Datu Iman Suramenggala sebagai sekretaris, ditambah Rukisah Saleh, Samuel, Peter Pulungan, dan Yusuf Ramlan, Ari sebagai Ketua mengungkapkan, fungsi tim ini adalah memperlulus transisi pemerintahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara 2016-2021, Dr H Irianto Lambrie dan H. Udin Hianggio kepada Zainal Arifin Pali-

wang dan Yansen TP.

“Seperti yang saya sampaikan dalam konferensi pers sebelumnya, kita akan mengawal proses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah diketuk, selain itu di APBD 2021 kita ingin membawa semangat kerakyatan. Kami akan mengawal dan kami akan sesuaikan dengan program-program utama dari Ziyap,” tandasnya.

Akan halnya Wagub Yansen TP, ia langsung kembali ke Malinau, tempat ia menjadi Bupati. Sejak keluar dari pesawat di Bandara Kolonel RA Bessing Malinau, sambutan meriah langsung menyergapnya. Begitulah ungkapan suka cita dan rasa hormat serta rasa bangga masyarakat atas dilantiknya putra terbaik Malinau menjadi wakil gubernur (wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) oleh Presiden RI Joko Widodo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama para ketua lembaga adat dan paguyuban menyambut kedatangan Wakil Gubernur Kaltara Dr. Yansen TP, M.Si.

Kedatangan Yansen TP bersama istrinya di Bandara Kolonel RA Bessing



## • INFO KALTARA

Malinau langsung disambut oleh Wakil Bupati Malinau Dr. Topan Amrullah, S.Pd, M.Si, bersama istri dan langsung dikalungi bunga. Sedangkan Ketua Lembaga Adat Dayak Lundayeh Malinau Paul Belapang didapuk untuk mewakili para ketua lembaga adat dan paguyuban untuk menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga masyarakat terhadap Yansen TP.

“Selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur Kaltara beserta Ibu Ping Ding Yansen. Rasa bangga, syukur dan suka cita kami bahwa Bapak Dr. Yansen TP, M.Si telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara seba-

bingkai “Kaltara Rumah Kita”.

Sebagai tokoh adat, iya mengajak semua elemen masyarakat Malinau untuk bergandeng tangan membantu pemerintahan Provinsi Kaltara yang dipimpin oleh pemimpin baru, yaitu Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si, sebagai wakilnya. “Tuhan senantiasa selalu menyertai Bapak dalam segala langkah pekerjaan Bapak ke depannya,” ucapnya mendoakan dan diaminan oleh yang hadir menjemput.

Soal penyambutan tersebut, Wagub Kaltara Yansen TP mengungkapkan bahwa apa yang masyarakat Malinau

gun Malinau, hal positif seperti inilah merupakan sebuah hasil yang dirinya dambakan supaya menjadi ciri khas dari masyarakat dalam menghargai, menghormati dan mensyukuri segala sesuatu. Dengan tampilan tradisi adat juga merupakan suatu upaya menghidupkan budaya bangsa. “Keberagaman yang ada ini kan diperlihatkan, ditampilkan menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Jadi untuk itu saya bersyukur atas semuanya sudah bisa mencapai hasil seperti ini dan menjadi kebanggaan kita ke depan,” katanya.

Kepulangan ke Malinau juga dalam rangka menyelesaikan tugas dia se-



gai Wakil Gubernur Kaltara,” ucap Paul Belapang, Selasa, 16 Februari 2021.

Yansen, kata Paul Belapang, merupakan putra Malinau yang pertama dan patut dicatat dalam sejarah Negara Republik Indonesia karena menjabat sebagai wagub dan dilantik langsung oleh presiden. Dengan dilantiknya putra terbaik Malinau ini menjadi awal yang baik untuk Malinau dan tentunya juga seluruh masyarakat Kaltara.

Untuk itu, Yansen yang merupakan Bupati Malinau dua periode ini diharapkan tetap membimbing dan terus menatap ke depan dengan juga membangun Malinau lebih baik lagi dalam

lakukan menjadi sebuah kebanggaan dia karena masyarakat Malinau berbudaya dan selalu mensyukuri segala sesuatu. “Bagi saya penyambutan ini bukan sekadar sebuah euforia karena kebanggaan, tetapi rasa syukur dan budaya menghormati,” ungkapnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan para tokoh masyarakat, adat dan paguyuban serta lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya itu merupakan sebuah teladan yang baik dan menjadi ciri khas bagi Malinau ke depan. Ia pun yakin generasi muda pasti akan belajar dari teladan seperti yang dilakukan oleh mereka.

Sebagai bagian dalam memban-

belumnya sebagai Bupati Malinau untuk proses transisi di mana nantinya kepemimpinan Malinau akan dilanjutkan oleh Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah untuk menyelesaikan kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Malinau periode 2016-2021 hingga bulan April nanti sebelum pelantikan bupati dan wakil bupati Malinau yang baru.

“Kemudian di provinsi ya tentu saya harus melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban saya sebagai Wagub. Saya belum bisa bicara substansinya apa, tapi saatnya ya tugas-tugas yang melekat pada kedudukan tugas pokok seorang wakil gubernur,” ucapnya. ●



# TANTANGAN DI DEPAN MATA

**S**eiring dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, kabar pencemaran Sungai Malinau menjadi salah satu tantangan di depan mata. Warga yang tinggal di sekitar Sungai Malinau, seperti di Desa Langap Sengayan, Malinau Selatan, terkejut karena ikan-ikan mengambang, mati, Senin, 8 Februari lalu.

Rupanya tanggul penampung limbah batubara diduga dari kolam Tuyak milik PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) jebol pada Minggu, 7 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 waktu setempat. Limbah tambang itupun mengalir dan mencemari Sungai Malinau. Akibat, air sungai pun keruh kecoklatan. Ikan mati pun mengambang pertanda ekosistem sungai terganggu.

Bupati Malinau Yansen TP langsung menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 660.5/K.86/2021, tentang sanksi paksaan Pemerintah kepada penanggungjawab usaha PT. KPUC, tertanggal 10 Februari 2021. Bupati Yansen menandatangani sebelum terbang ke Jakarta untuk dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Gubernur Kaltara.

Sejauh ini Manajemen KPUC sudah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Malinau dan siap bertanggungjawab. "Saya mewakili manajemen KPUC, khususnya di Batu Lidung meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat yang terdampak limbah ini," ujar Irwansyah dari perwakilan Manajemen KPUC, Kamis, 11 Februari 2021.

Tak urung beberapa warga sudah mengabadikan foto sungai dengan air keruh, berwarna coklat kental bahkan berlumpur itu. Ikan-ikan mati mereka kumpulkan di perahu sampan. Foto-foto ini pun menyebar di media sosial dan menuai banyak tanggapan.

Rosiena Kila, warga Malinau membagikan foto-foto Sungai Malinau tercemar berikut ikan-ikan mati. Hampir 1.000-an akun ikut membagikan postingan Rosi ini. "Kasihannya masyarakat Malinau yang bergantung pada air dan hasil alam," kata Rosi dalam postingan yang juga meminta tindakan dari

aparatus hukum dan pihak terkait.

Gangguan ekosistem ini pun berdampak pada warga yang tersebar di 14 desa sekitar DAS Malinau: Desa Sengayan, Langap, Long Loreh, Gong-solok, Batu Kajang, Setarap, Setulang, Setaban). Juga DAS Mentarang (Lidung Keminci dan Pulau Sapi) dan DAS Sesayap (Desa Tanjung Lapang, Kuala Lapang, Malinau Hulu, dan Malinau Kota).

dalam aliansi menyetop truk hauling batu bara KPUC.

Aksi tutup jalan merupakan reaksi spontan Aliansi Pemuda Peduli Sungai Malinau yang muncul karena kegeraman pada KPUC yang menjadi biang pencemara dahsyat Sungai Malinau. Aliansi Pemuda kemudian menuntut KPUC bertanggung jawab secara moral dan materil pada masyarakat. "Kami menuntut KPUC bertanggung jawab



Bahkan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Apa' Mening menghentikan layanan air bersih sejak Senin, 8 Februari 2021 karena sumber air baku PDAM dari Sungai Malinau tercemar. "Kemarin air PDAM mati total dua hari," kata Rosi.

Sedangkan Aliansi Pemuda Peduli Sungai Malinau memblokir jalan hauling (angkutan) batu bara PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC). Pada Rabu tengah malam, 10 Februari 2021 itu aksi blokir jalan berlangsung antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 04.00 dini hari Kamis, 11 Februari 2021. Puluhan pemuda yang tergabung

atas dampak yang derita masyarakat," tegas Vicky Kurniawan, Ketua Aliansi.

Selanjutnya Aliansi menuntut KPUC untuk memulihkan ekosistem sungai dengan penaburan benih ikan dan udang. Kemudian memberi kompensasi pada nelayan serta penyediaan air bersih untuk masyarakat sepanjang aliran sungai terdampak. Aliansi Pemuda juga menuntut KPUC untuk merealisasikan penyambungan pipa dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sungai hingga ke Kecamatan Malinau Barat. Juga merealisasikan penyambungan pipa dari IPA Tanjung Lima hingga Malinau Kota. ●



Olly Dondokambey dan Steven Kandouw

# MEMULAI PERIODE KEDUA DI SULAWESI UTARA

Mulus tanpa sengketa perselisihan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi, pasangan Olly Dondokambey- Steven Kandouw (ODSK) resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Presiden Joko Widodo melantik pasangan ini di Istana Negara Jakarta, Senin, 15 Februari 2021.

**P**akatuan wo pakalawiren, semoga panjang usia dan lestari. Untuk Olly dan Steven, inilah pelantikan kedua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Setibanya di Kota Manado, ibu kota provinsi, Olly berkisah tentang momen spesial saat pelantikan sebagai Gubernur Sulut oleh Presiden Jokowi. "Kalian sudah saksikan sendiri secara langsung kemarin di televisi bagaimana sambutan Bapak Presiden terhadap terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada saat pelantikan, Bapak Presiden mengacungkan dua jempol," ujar Olly.

Ia menafsirkan isyarat jempol Presiden Jokowi sebagai bentuk dukungan. "Itu berarti bapak presiden merestui apa yang sudah menjadi pilihan masyarakat

Sulawesi Utara," tutur Gubernur Dondokambey.

Dari sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada serentak 2020, ODSK dilantik paling pertama oleh Presiden Jokowi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan. Sebelum dilantik, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw terlebih dahulu mengikuti kirab yang dipimpin langsung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kirab itu juga diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Prosesi ini berlangsung dengan berjalan kaki dari Istana Merdeka menuju Istana Negara tempat berlangsungnya prosesi pelantikan.

Gubernur dan Wagub Sulut itu ber-



jalan kaki dengan membawa surat petikan dari Kepala Negara. Pelantikan itu berdasarkan Keppres dengan Nomor Nomor 19/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut masa jabatan 2021-2024. Seusai pembacaan Keppres, Jokowi langsung mengambil sumpah jabatan Kepala daerah Sulut dan Kaltara itu mengenakan pakaian putih lengkap.

Prosesi pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah janji sebagai kepala daerah didampingi rohaniawan. Mereka meletakkan tangan kiri di atas kitab suci, kemudian mengangkat tangan kanan mengacungkan jari telunjuk dan tengah ke atas sambil mengucapkan sumpah janji.

Presiden Joko Widodo membacakan sumpah janji diikuti oleh Gubernur dan Wagub yang dilantik "Demi Tuhan saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-sebaiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," ujar Jokowi yang diikuti Olly dan Steven.

Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti tes swab PCR sebelum hari H, memakai masker, menjaga jarak. Undangan yang hadir pun sangat terbatas. Gubernur Sulut, Olly Dondokambey menyatakan, prosesi pelantikan yang dijalannya bersama Steven Kandouw bisa terlaksana berkat anugerah Tuhan.

"Semua hanya karena AnugerahNya. Terima kasih banyak semua warga Sulawesi Utara. Mari jo torang sama-sama menjadi bagian dalam pembangunan Sulawesi Utara untuk tambah hebat dan maju," lanjutnya

Rasa syukur pun diungkap Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw atas proses pelantikan telah dilalui. Ia mengucapkan terima kasih ke masyarakat Sulut sudah memberi kepercayaan kembali mendampingi Gubernur Olly Dondokambey di periode kedua.

"Terima Kasih untuk masyarakat Sulawesi Utara yang saya cintai atas kepercayaan untuk mengemban tang-



gung jawab sebagai Wakil Gubernur Sulut periode yang ke-2 ini. penyertaan Tuhan di periode pertama saya dan Pak Gubernur pasti juga akan tetap demikian di periode kami yang ke-2," ungkap mantan Ketua DPRD Sulut ini lewat postingan media sosial miliknya.

Nah, ke DPRD sulut pula langkah pertama Gubernur Olly pasca pelantikan. Dalam rapat paripurna DPRD Sulut di Gedung Cengkih, Rabu, 17 Februari 2021 itu Olly menyampaikan pidato perdana sebagai Gubernur periode 2021-2024.

Sedangkan Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Silangen, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok, serta Anggota DPRD yang hadir. Tentu saja Wakil Gubernur Steven Kandouw hadir di bekas kantornya itu. Tampak pula Ketua Tim Penggerak PKK Sulut Rita Tamuntuan dan Wakil Ketua TP PKK Kartika Devi Tanos. Ikut hadir Forum komunikasi Pimpinan Daerah, Wali kota Manado terpilih Andrei Angouw, serta jajaran eselon II.

Dalam pidatonya, Gubernur Olly optimis mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab, menjawab amanah rakyat dengan optimal serta memberikan pembangunan yang signifikan di Bumi Nyiur Melambai dengan sinergitas dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat Sulut. "Momentum ini ada-

lah momentum sukacita tidak saja bagi saya dan Steven yang kembali dipercayakan masyarakat Sulut untuk melanjutkan kepemimpinan tiga tahun mendatang tapi juga oleh kita semua," katanya.

Untuk itu, Gubernur Olly mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Sulut untuk bersama-sama menjawab tantangan ini demi kesejahteraan bersama. "Ini menjadi tantangan bagi kita semua dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan proyek-proyek nasional yang sedang dilaksanakan di Sulut maupun bantuan-bantuan dari pemerintah pusat bagi pembangunan Sulut, Gubernur Olly mengingatkan semua pihak agar jangan sampai disalahgunakan. "Kita harus waspada bukan sebagai euforia. Jangan sampai kita terlibat pada hal-hal yang mengakibatkan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang melanggar sumpah janji jabatan kita," tandasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa selang tahun 2016 hingga tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 berbagai capaian dan progres positif berhasil diwujudkan di Sulut yakni meningkatnya perekonomian masyarakat, kualitas pembangunan manusia serta aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. ●



# MAHYELDI-AUDY JOINALDY MENUNGGU PELANTIKAN

Jadi juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat menetapkan pasangan calon nomor urut 4 Mahyeldi-Audy Joinaldy sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 2020. Sebelumnya penetapan tertunda lantaran pasangan pesaingnya mengajukan perselisihan hasil pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi.

Rapat pleno terbuka KPU untuk menetapkan pemenang Pilkada 2020 itu berlangsung di Inna Muara Hotel, Padang, Jumat, 19 Februari 2021. Agenda rapat hanya satu-satunya, dan berakhir sesuai dengan rencana.

Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani dalam rapat pleno mengatakan, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), dinyatakan permohonan tidak diterima atas dua permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Permohonan yang diajukan dua pasangan calon lainnya yakni Nasrul Abit- Indra Catri dan Mulyadi- Ali Mukhni telah diputus MK.

Sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan MK, maka selaras aturan, KPU Sumbar wajib menetapkan pasangan

terpilih ini maksimal lima hari setelah keluarnya keputusan MK. "Maka sesuai keputusan, hari ini kita gelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan terpilih gubernur dan wakil gubernur Sumbar dalam pemilihan 2020," katanya.

Dia menjelaskan, sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu Sumbar yang telah dilakukan, menyatakan pasangan nomor urut 4 Mahyeldi-Audy Joinaldy sebagai pasangan terpilih dengan perolehan suara terbanyak, yakni 726.853 suara atau 32,4 persen dari total suara yang masuk penghitungan. "Kita menetapkan pasangan Mahyeldi dan Audy Joinaldy sebagai pasangan terpilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020," katanya.

Berita acara pun ditandatangani.



Berita acara kegiatan ini akan diberikan kepada DPRD Sumbar, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon. "Selanjutnya berita acara ini diberikan kepada pasangan calon, KPU RI, Bawaslu Sumbar dan arsip bagi KPU Sumbar," tuturnya menambahkan penetapan itu ditegaskan dalam surat keputusan (SK) nomor 36/PL.02.7-BA/13/KPU-Prov/II/2021.

Sebelumnya, Majelis Hakim MK menolak permohonan sengketa pemilihan hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Mulyadi dan Ali Mukhni. Keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa, 16 Februari 2021. "Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Anwar Usman.

Dalam kesempatan yang sama, hakim konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan alasan mengapa permohonan ini tidak diterima. Ia mengatakan, hal itu disebabkan tidak ada bukti yang meyakinkan majelis bahwa ada korelasi antara hasil pemilihan dengan penetapan Mulyadi sebagai tersangka pelanggaran pemilu.

"Lagipula, sebagaimana terungkap dalam persidangan, saksi-saksi pemohon di tingkat kabupaten/kota menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota Sumatera Barat," ujar Wahiduddin. Ia menambahkan, jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon suara terbanyak adalah pal-

ing banyak 1,5 persen x 2.241.292 total suara sah, sehingga totalnya menjadi 33.619 suara.

Sementara perolehan suara pemohon adalah 614.477 suara. Adapun, perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 726.853 suara.

Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 726.853 suara dikurang 614.477 suara sama dengan 112.376 suara (5,01 persen) atau lebih banyak dari 33.619 suara. Oleh sebab itu, MK menilai Mulyadi-Mukhni tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa.

"Menurut mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum," ucap Wahiduddin.

Pihak

Mulyadi dan Mukhni yang diwakili kuasa hukumnya, Veri Junaidi menilai, Pemilihan Gubernur Sumatera Barat telah berjalan dengan tidak adil. "Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tidak berjalan secara demokratis, serta tidak berlandaskan pada asas pemilu yang jujur dan adil," kata Veri dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa, 26 Januari 2021.

"Khususnya dalam proses penegakan hukum yang tidak adil serta dipaksakan," ucap dia. Menurut pemohon, telah terjadi upaya penggebsan perolehan suara dengan penetapan tersangka tindak pidana pemilu pada Mulyadi, tepatnya lima hari sebelum pemungutan suara.

Namun, kemudian, proses penyidikan terhadap kasus Mulyadi tidak dilanjutkan aparat penegak hukum dengan alasan tidak adanya bukti yang kuat. "Ada upaya nyata yang dilakukan baik oleh kandidat lain maupun oleh penyelenggara pemilihan, dalam hal ini sentra penegakan hukum terpadu yang telah memaksakan penetapan tersangka terhadap pemohon," ujar dia.

Menurut Veri, penetapan tersangka itu berpengaruh terhadap perolehan suara

Mulyadi dan Ali Mukhni dan membuat pilihannya tidak menggunakan hak suara ataupun beralih ke pilihan lain. Pergerakan pemilih itu juga dinilai terjadi karena ada pemberitaan masif soal penetapan Mulyadi sebagai tersangka tindak pidana pemilu.

Apapun, MK sudah memutus perkara. Final dan mengikat. Mahyeldi-Audy Joinaldy menunggu saat pelantikan tiba. •





# GERAK CEPAT KPU BENGKULU SAMBUT ROHIDIN-ROSJONSYAH

Bengkulu memiliki riwayat beberapa perselisihan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang memakan waktu sehingga mengganggu jalannya pemerintahan setempat. Boleh jadi, karena itu Komisi Pemilihan Umum Bengkulu bergerak cepat menetapkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada 2020.

Setelah putusan MK menolak gugatan Agusrin-Imron Rosyadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu mengagendakan rapat pleno penetapan pemenang Pilgub pada Jumat, 19 Februari 2020. "Setelah putusan MK, KPU Agendakan Pleno Penetapan Rohidin-Rosjonsyah Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih, soal pelantikan itu urusan Kemendagri, rencananya pleno Jumat nanti," kata Komisiner KPU Darlinsyah, Selasa, 16 Februari 2021.

Nyatanya, rapat pleno berlangsung sehari lebih cepat menjadi Kamis, 18 Februari 2021. Rapat pleno akhirnya menetapkan pasangan Rohidin Mersyah-Rosjonsyah sebagai pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih dalam Pilkada

serentak pada 9 Desember 2020 lalu.

Penetapan paslon berlangsung di Hotel Santika Kota Bengkulu, dipimpin Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra dan didampingi empat komisiner KPU Provinsi. Penetapan tersebut juga dihadiri Asisten 1 Setda Provinsi Supran, Ketua Bawaslu Provinsi Parsadaan Harahap, perwakilan parpol pengusung paslon, calon Wakil Gubernur terpilih Rosjonsyah, Forkopimda, perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta para ketua dan komisiner KPU Kabupaten serta Kota se Provinsi Bengkulu.

Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengatakan, setelah melalui proses yang cukup panjang dengan diawali pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi





keputusan MK sudah ada dan sempat dibacakan salinan keputusannya dalam rapat Pleno Terbuka ini, sehingga untuk rangkaian akhir tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu hasil Pilkada serentak tahun 2020 lalu, sudah selesai dilaksanakan, dan telah ditetapkan paslon terpilihnya.

"Untuk berita acara dan keputusan pleno terbuka penetapan paslon ini, besok akan disampaikan ke DPRD Provinsi sebagai bahan proses selanjutnya, pelaksanaan rapat paripurna untuk mengusulkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," kata Irwan.

Irwan mengungkapkan, tingkat partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada tahun 2020 lalu sebesar 77,73 persen atau melampaui target partisipasi pemilihan nasional

ial yaitu 77,5 persen. "Capaian ini patut untuk disyukuri dan pihaknya selaku penyelenggara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas pencapaian partisipasi yang tinggi ini. Bahkan menempatkan Bengkulu di peringkat dua nasional, setelah Sulawesi Utara dengan tingkat partisipasinya 78,72 persen," jelasnya.

Sementara itu, calon Wakil Gubernur Bengkulu terpilih, Rosjonsyah menyampaikan rasa syukur, apalagi waktu penetapan ini juga bertepatan dengan waktu hari lahirnya. Untuk

itu mantan Bupati Lebong ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu yang telah menggunakan hak suaranya sekaligus mensukseskan Pilkada serentak tahun 2020 lalu.

"Setelah dilantik nanti, doakan pasangan Rohidin-Rosjonsyah agar sehat dan selalu amanah, sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi Provinsi Bengkulu, sesuai visi dan misi waktu kampanye lalu," tukasnya.

Tanda-tanda perselisihan hasil Pilgub Bengkulu akan gugur sudah tampak di sidang MK pada awal Februari 2021 lalu. Dalam salah satu sesi sidang, KPU Bengkulu menyangkal tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh calon gubernur Agusrin Najamudin di Mahkamah Konstitusi (MK). Agusrin mendalilkan terjadi kecurangan yang dilakukan KPU Bengkulu secara terstruktur, sistematis,



dan masif (TSM).

"Dalil pemohon yang menyatakan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Bengkulu kepada Pemohon dengan pertimbangan yang sangat dangkal adalah tidak benar," kata kuasa hukum KPU Bengkulu, A Amin

Agusrin M Najamudin, yang berpasangan dengan Imron Rosyadi, menggugat KPU Bengkulu yang menetapkan pasangan Rohidin Mersyah-Rosjonsyah meraih 41,2 persen suara, Helmi Hasan-Muslimin Diding memperoleh 32,36 suara, dan Agusrin-Imron 24,4 suara. Versi Agusrin-Imron, dirinya adalah pemenang pilgub dengan mendapatkan 979.759 suara atau

baik pelanggaran administratif dan pidana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020, tanpa fakta hukum.

"Andaikata berbagai dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana yang didalilkan oleh pemohon tersebut benar, namun kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi dan pidana bukan domain Mahkamah Konstitusi melainkan yurisdiksi Bawaslu," tegas kuasa Rohidin, Arkan Cikwan.

Alhasil, sidang putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, majelis hakim menolak gugatan Agusrin-Imron pada Selasa, 16 Februari 2021. Anwar Usman menyatakan berdasarkan pe-

dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, "Menyatakan Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," jelas Anwar Usman yang dikutip dalam live Youtube MK.

Menyikapi hal itu, Tim kuasa hukum paslon Agusrin-Imron Zetriansyah, SH mengatakan, Agusrin berpesan untuk menghormati putusan MK. Dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf kepada pendukung, simpatisan dan masyarakat Bengkulu karena tidak dapat mewujudkan impian dan visi-misi Agusrin-Imron.

"Bapak Agusrin mengucapkan terima kasih kepada pendukung, simpatisan dan masyarakat yang selama ini mendukung. Jadi Agusrin dalam hal ini untuk mendukung kepemimpinan gubernur terpilih R ohidin-Rosjonsyah," kata Zetriansyah, Selasa, 16 Februari 2021.

Zetrianayah mengatakan, Agusrin mengajak masyarakat Bengkulu untuk berbuat semaksimal mungkin yang baik untuk kemajuan Bengkulu. Beliau akan mensupport gubernur Bengkulu dengan jaringan beliau di nasional untuk kemajuan Bengkulu.

Sedangkan Gubernur terpilih Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan alhamdulillah, artinya MK sudah menguatkan apa yang disuarakan oleh masyarakat dulu. Tentu selanjutnya ia berharap ini menjadi momentum untuk menyatukan semua kekuatan dan semua elemen masyarakat Bengkulu untuk kemajuan Bengkulu.

"Pemikiran dan saran-saran dari semua pihak yang positif untuk kemajuan Bengkulu yang kita nantikan. Tentu saya mengajak bersama-sama dalam memajukan Bengkulu ke depan," tandasnya.

Tanda-tanda kelancaran jalannya pemerintahan di Bengkulu mulai tampak. Riwayat perselisihan yang memakan waktu agaknya menjadi pengalaman berharga. Semoga Bengkulu lebih maju!!! ●



34,03 persen suara.

"Termohon menerima berkas bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur atas nama pemohon pada 6 September 2020. Pada 7 September 2020, Termohon bersama kelompok kerja, pendaftaran dan penetapan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 telah melakukan penelitian terhadap dokumen mengenai keabsahan data pasangan calon. Namun pada 9-10 September 2020, Termohon melakukan klarifikasi dokumen yang disampaikan oleh Pemohon terkait status bakal calon pemohon sebagai tersangka Lapas Kelas 1 Sukamiskin," papar A Amin.

Adapun pasangan yang mendapatkan suara terbanyak versi KPU, Rohidin Mersyah-Rosjonsyah, menyatakan permohonan Agusrin hanya bersifat opini,

nilai atas fakta hukum sebagaimana diuraikan, MK berkesimpulan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum, mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Eksepsi termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Eksepsi termohon dan Eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum.

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau mengajukan permohonan a quo. Andaiapun pemohon memiliki kedudukan hukum quod non, Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum Eksepsi lain dari termohon



# BENGKULU MULAI MENEKAN KEMISKINAN

**M**eski masih berada di peringkat 10 besar provinsi termiskin di Indonesia, Bengkulu perlahan mulai menekan angka kemiskinan. Jika pada 2020 lalu, masih sekitar 15,41 persen warga Bengkulu tergolong fakir-miskin, pada tahun ini angkanya menurun tipis menjadi 15,30 persen.

Tiga provinsi di Sumatera masuk di daftar 10 daerah dengan persentase warga miskin tertinggi menurut data Badan Pusat Statistik yang keluar pada Februari 2021. Masing-masing ada-

menjadi wilayah termiskin.

Posisi pertama wilayah paling miskin adalah Kabupaten Kaur, Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Tiga kabupaten ini masuk pada wilayah Semaku. Tidak hanya tiga kabupaten itu, untuk urutan ke-4 termiskin di Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu. "Tiga kabupaten dan satu kota ini, angka kemiskinannya masih membebani angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu," ujar Rohidin.

Menurut dia, meski ada tiga dan satu kota masuk wilayah termiskin di

nan ini harus dilakukan. Tentunya melalui komitmen oleh bupati dan walikota yang ada di Provinsi Bengkulu. Mengingat kondisi saat ini tidak hanya masuk urutan 28 provinsi termiskin, Provinsi Bengkulu juga masih menduduki posisi nomor 2 termiskin di Pulau Sumatera. "Kita butuh komitmen bersama semua kepala daerah. Bagaimana upaya kita untuk menurunkan angka ini," beber Rohidin.

Program penurunan angka kemiskinan tentunya harus sama-sama disinkronisasikan. Termasuk bantuan ke-



lah Aceh dengan 15,43 persen warga tergolong miskin, menyusul Bengkulu 15,30 persen, dan Sumatera Selatan mencapai 12,56 persen.

Data BPS secara nasional per 2020, Provinsi Bengkulu masih berada di urutan ke-6 provinsi termiskin dari 34 provinsi di Indonesia. Rata-rata kemiskinan Provinsi Bengkulu berada di angka 15,41 persen. Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan, angka kemiskinan yang masih tinggi itu lantaran ada empat kabupaten/kota

Provinsi Bengkulu, namun beberapa kabupaten juga sudah berupaya untuk melakukan angka penurunan kemiskinan itu sampai satu persen. Daerah yang paling signifikan menurunkan angka kemiskinan itu adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

Kabupaten Bengkulu Utara mampu menembus angka kemiskinan hanya 10,9 persen. "Penurunan sangat progresif juga dilakukan oleh beberapa daerah lainnya," paparnya.

Upaya penurunan angka kemiski-

pada warga miskin harus benar-benar tepat sasaran. Rohidin menargetkan, dalam setiap tahun penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu bisa turun satu persen. Bahkan sampai tahun 2021 nanti angka kemiskinan turun signifikan sampai 13,41 persen. "Target kita turun setiap tahunnya satu persen dan bahkan bisa lebih," ungkapnya.

Lajulah Bengkulu. Menurunkan 15,30 persen warga miskin menjadi 13,41 persen semoga tak terlalu jauh. •



# TINGGAL PILGUB KALSEL DAN JAMBI BERSENGKETA DI MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 32 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Serentak 2020 berlanjut ke sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan. Dua antaranya adalah Pilgub Kalimantan Selatan dan Jambi.

Laman web resmi MK menyebutkan, perkara Pilgub Kalsel dan Jambi akan berlanjut pada 22 Februari hingga 4 Maret 2020 mendatang. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Divisi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asy'ari mengkonfirmasi soal ini.

"Ya masih ada 32 perkara," kata Hasyim, Kamis, 18 Februari 2021. Menurut Hasyim, pemeriksaan 32 perkara itu selanjutnya mengagendakan agenda pembuktian dalam sidang lanjutan di MK.

Berdasarkan data KPU, 100 perkara yang kandas di MK ini terdiri dari 90 perkara permohonannya tidak dapat diterima, enam permohonan ditarik kembali, dua permohonan gugur, serta dua perkara lainnya MK menyatakan tidak berwenang mengadili.

Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan mahkamah sudah meregistrasi 132 permohonan gugatan hasil sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 per 18 Januari 2021. "Pada 18 Januari 2021 yang lalu,

MK hanya meregistrasi sebanyak 132 permohonan. Awalnya ada 136, namun satu permohonan ditarik kembali, dan tiga permohonan ganda," kata Anwar dalam keterangannya di kanal YouTube MK, Kamis, 21 Januari 2021.

Anwar mencatat dari 132 gugatan yang telah diregistrasi, terdapat tujuh permohonan perkara sengketa pilkada level gubernur/wakil gubernur. Lalu, 112 permohonan gugatan hasil Pilkada Bupati/Wakil Bupati dan 13 permohonan perselisihan Pilkada Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Rentetan putusan awal akhirnya pada 14-17 Februari 2021 memutuskan 100 perkara antaranya sudah putus dengan berbagai amar. Yang terbanyak adalah perkara tak dapat diterima karena kurang syarat.

Pada Pilkada 2020 lalu, terdapat sembilan Pilgub. Selain Pilgub Jambi dan Kalsel, tujuh Pilgub lainnya berlangsung di Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.



Tiga dari sembilan Pilgub itu bebas dari sengketa di MK, yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Dua daerah antaranya malah sudah resmi memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2024





setelah Presiden melantiknya pada Senin, 15 Februari 2021.

Sebagian yang bersengketa di MK sudah tak berlanjut sehingga perhitungan rekapitulasi KPU diterima sebagai hasil Pilkada. Sedangkan yang

berlanjut di MK, proses sengketa akan menerima putusan akhir ketetapan mahkamah pada pertengahan Maret 2021. Salinan putusan ketetapan kemudian akan diserahkan kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan

Bawaslu. Salinan putusan juga diserahkan kepada pemerintah dan DPRD daerah penyelenggara.

Khusus untuk Pilgub, perkara pertama yang berlanjut adalah Pilgub Provinsi Kalimantan Selatan. Perkara

## • INFO PILKADA

ini dimohonkan oleh pasangan calon (Paslon) Denny Indrayana-Difriadi. Bertindak sebagai kuasa antara lain sejumlah nama-nama terkemuka seperti mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah hingga peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz. MK akan menggelar perkara ini pada hari Senin (22/2/2021) mendatang.

Di hari berikutnya, Selasa, 23 Februari 2021 MK mengagendakan pemeriksaan dan pembuktian perkara Pilgub Provinsi Jambi. Perkara dengan nomor 130/PHP. GUB-XIX/2021 ini dimohonkan juga oleh pasangan calon

Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 Februari 2021.

Denny-Difriadi, kata dia, juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon sehingga pemohon sesungguhnya tidak mempersoalkan hasil rekapitulasi suara. Kemudian KPU Kalimantan Selatan menilai permohonan itu tidak jelas karena Denny-Difriadi mengajukan variasi permintaan hingga empat alternatif yang dimintakan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam alternatif permohonan itu, termohon menilai terdapat inkonsistensi, yakni meminta Mahkamah Konstitusi

atau 50,24 persen. Sementara total perolehan suara pasangan Denny-Difri 843.695 suara atau 49,76 persen.

KPU menetapkan total perolehan suara pasangan Sahbirin-Muhidin yang diusung partai Golkar, PAN, PDIP, Nasdem, PKS, PKB, serta didukung PSI, PKPI dan Perindo sebanyak 851.822 suara atau 50,24 persen. Sementara itu, total perolehan suara pasangan Denny-Difri yang diusung Partai Gerindra, Demokrat, dan PPP sebanyak 843.695 suara atau 49,76 persen, dari total surat suara pemilih yang sah pada pencoblosan 9 Desember 2020, sebanyak 1.695.517 suara.

### Pilgub Jambi

Akan halnya sengketa Pilgub Jambi, KPU Provinsi Jambi (Termohon) yang diwakili tim kuasa hukumnya menolak dengan tegas dalil permohonan Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 1 Cek Endra dan Ratu Munawaroh, selaku Pemohon perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021. Pada persidangan sebelumnya, pasangan ini mendalilkan seluruh proses Pilkada Jambi 2020 diwarnai dengan banyaknya pelanggaran dan kecurangan.

"Dalil tersebut sangat tidak mendasar dan bersifat menduga-duga. Seluruh masyarakat ikut menyaksikan proses pilkada," kata Muhammad Syahlan Samosir, salah seorang kuasa hukum KPU Provinsi Jambi dalam sidang yang berlangsung di MK pada Senin, 1 Februari 2021.

Berikutnya, Termohon menanggapi dalil soal laporan Pemohon mengenai pelanggaran pilkada tidak pernah ditanggapi Bawaslu Provinsi Jambi. "Bawaslu tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon soal pelanggaran pilkada yang didalilkan Pemohon," jelas Muhammad Syahlan.

Sementara itu, berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Provinsi Jambi terkait hasil Pilkada Jambi Tahun 2020, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Meskipun ada keberatan dari semua paslon peserta pilkada, Bawaslu sudah menyampaikan sejumlah perbaikan dan sudah ditindaklanjuti.

Dengan begitu, pleno KPU Jambi menetapkan rekapitulasi hasil Pilkada.



yakni Cek Endra-Ratu Munawaroh. Kuasa pemohon dalam perselisihan Pilgub Jambi adalah mantan kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu, yakni Yusril Ihza Mahendra.

### Pilgub Kalsel

Pada sidang sebelumnya, Kuasa KPU Kalsel menyangkal gugatan pasangan Denny-Difriadi. Antara lain soal beberapa pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan 2020.

"Tetapi dalam permohonan pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan termohon," ujar kuasa hukum KPU Kalimantan Selatan Ali Nurdin dalam sidang sengketa pilkada di Gedung

menihilkan perolehan suara di Kecamatan Binuang dan Hatungun, Kabupaten Tapin, tetapi dalam alternatif lain meminta dilakukan pemungutan suara ulang di antaranya seluruh TPS di Binuang.

Berkaitan dengan dalil pemohon yang menuduh pasangan calon petahana menyalahgunakan bantuan sosial Covid-19 dan program tandon air, KPU Kalimantan Selatan mengaku tidak pernah menerima rekomendasi atas pelanggaran yang didalilkan pemohon. "Pemohon pun menang di delapan kabupaten dari 13 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan," ujar Ali Nurdin.

Dalam Pilkada Kalimantan Selatan, KPU menetapkan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin sebanyak 851.822 suara



Hasil perolehan suara Pilkada Jambi, Paslon Nomor Urut 1 Cek Endra dan Ratu Munawaroh mendapatkan 585.203 suara, Paslon Nomor Urut 2 Fachrori Umar dan Syafril Nursal meraih 385.388 suara, Paslon Nomor Urut 3 Al Haris dan Abdullah Sani memperoleh 596.621 suara.

Selanjutnya, pihak Terkait PHP Gubernur Jambi melalui kuasa hukum Heru Widodo menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang dijadikan dalil dan dasar permohonan pembatalan

resmi Termohon, pihak Pemohon berada di posisi kedua. Sedangkan Pihak Terkait berada di posisi pertama,” jelas Heru yang mewakili pasangan Al Haris - Abdullah Sani (Haris-Sani)..

Toh Cagub Cek Endra tetap optimistik. Setelah mengikuti sidang di MK dengan agenda jawaban dari KPU Provinsi Jambi yang menolak seluruh dalil permohonan, ia mengungkapkan, justru jawaban KPU dan pihak terkait yang menyentuh substansi penghitungan suara.

Kabupaten/Kota karena itu data pendahuluan. Dan kita sudah menambah data baru, hampir di semua kabupaten termasuk Sarolangun,” beber Cek Endra.

Pada sidang sebelumnya KPU juga membantah dalil pasangan Cek Endra-Ratu Munawaroh mengenai pemilihan yang tidak berhak ikut memilih, tapi menggunakan hak pilihnya. “Semua kita bantah by name by address,” ujar Syahlan Samosir kuasa hukum termohon KPU.



hasil Pilkada, telah diselesaikan penegekan hukumnya di Bawaslu Provinsi. Dengan demikian, ungkap Heru, penegakan hukum terhadap permasalahan dalam permohonan a quo telah selesai dengan tuntas.

Atas dasar itulah, maka beralasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal lain, Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilkada Jambi Tahun 2020 dengan mendasarkan data hasil survei independen. Hal ini menurut Pihak Terkait, tidak bisa menjadi dasar untuk mengklaim pilkada curang. “Berdasarkan penghitungan

“Kalau kami menilai jawaban dari pihak KPU masih normatiflah, dan data yang kami pegang tentunya tidak sembarangan. Kita meminta MK memberikan keputusan seadil-adilnya. Optimis untuk diskualifikasi dan melakukan pemungutan suara ulang,” kata Cek Endra.

Cek Endra juga membeberkan memenuhi tuntutan dan diskualifikasi pada Pilkada 2020 baru baru ini. Ia menilai, bahwa dari banyak bukti yang dia kumpulkan, bukan salah dari kandidat maupun.

“Tuntutan kita jelas, yakni pemilihan suara ulang (PSU), kita inventarisir lebih dari 236 TPS tersebar di sembilan Kabupaten/Kota, kemarin baru di lima

Menurut Syahlan, semua nama-nama yang dicantumkan dalam gugatan yang dinyatakan sebagai pemilih tidak sah, ternyata tidak bisa dibuktikan. Berdasarkan daftar hadir saat di TPS, nama-nama tersebut kebanyakan tidak datang. Sementara jika ada yang datang, mereka sah sebagai pemilih dan memiliki e-KTP.

“Sehingga adanya pelanggaran yang diklaim terjadi di lima kabupaten, 15 kecamatan, 41 kelurahan/desa, 88 TPS tidak terbukti, dan tidak memiliki alasan hukum untuk diadakan pemilihan suara ulang,” tandasnya.

Namun, MK memutuskan akan melihat bukti-bukti untuk mengambil putusan, bukan sekadar dalil-dalil. Kita nantikan saja sidang MK berikutnya. •



# TERSISA 30 SENGKETA PILKADA BUPATI DAN WALI KOTA

Masih ada 30 sengketa Pilkada 2020 untuk tingkat kabupaten dan kota di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua antaranya adalah sengketa Pemilihan Wali Kota di Ternate, Maluku Utara, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sisanya 28 perkara di 27 kabupaten.

**A**da 28 sengketa Pemilihan Bupati (Pilbup) di 27 kabupaten tersisa di MK. Bagaimana bisa? Ya karena ada dua perkara untuk Pilbup Nabire yang berlanjut ke sidang pembuktian.

Semula memang ada tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Nabire 2020 yang terdaftar di MK. Pertama, permohonan yang diregistrasi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dia-

jukan Fransiscus Xaverius dan Tabroni bin M Cahya. Kedua, permohonan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Yufinia Mote dan Muhammad Darwis. Ketiga, permohonan Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Deki Kayame dan Yunus Pakopa.

Yang menjadi objek perselisihan PHP Bupati Nabire 2020 yaitu permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire (Ter-

mohon) Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020. Pada rekapitulasi tersebut dinyatakan bahwa Paslon Yufinia Mote dan Muhammad Darwis (Paslon Nomor Urut 1) memperoleh 61.423 suara, Mesak Magai dan Ismail Djamaludin (Paslon Nomor Urut 2) memperoleh 61.729 suara dan dinyatakan sebagai Paslon dengan perolehan suara terbanyak, dan Fransiscus Xaverius dan Tabroni Bin M Cahya (Paslon Nomor Urut 3) memperoleh 46.224 suara.

Heru Widodo selaku kuasa hukum Paslon Nomor Urut 1 Yufinia-Muham-



mad dalam persidangan menyatakan bahwa hasil rekapitulasi hasil Pilkada Kabupaten Nabire tidak sah. Heru pun menjelaskan latar belakang Pasangan Yufinia-Muhammad menolak hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU Widodo Kabupaten Nabire.

"Ada dua hal yang melatarbelakangi Paslon Nomor 1 menolak hasil rekapitulasi KPU yaitu adanya rekomendasi Bawaslu Nabire untuk pemungutan suara ulang di 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kampung Distrik Dipa dan rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan 423 sisa suara yang dibagi-bagi ke Paslon pada TPS 01 dan 02 yang belum dilaksanakan oleh Termohon," kata Heru Widodo sebagaimana tayangan sidang MK pada akhir Januari 2021 lalu.

Di waktu dan tempat yang sama, Eddy C Wabes selaku kuasa hukum Paslon Nomor Urut 3 Fransiscus-Tabroni memaparkan dalil permohonan. Eddy mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasar dan krusial seperti permasalahan penetapan DPT, ketidakprofesionalan penyelenggara, dan pemilih ganda. "Hal tersebut yang menyebabkan perolehan suara klien kami berada di bawah Paslon Nomor Urut 1 dan 2," kata Eddy.

Lebih lanjut Eddy menerangkan bahwa pada proses penetapan DPT yang dilakukan Termohon, validitasnya tidak dapat diterima karena banyak kejanggalan seperti ketidaksesuaian antara jumlah DPT dengan jumlah penduduk Kabupaten Nabire pada website Kemendagri. Hal tersebut disebabkan karena terdapat data pemilih ganda di beberapa TPS.

Sedangkan putusan awal MK pada Rabu, 17 Februari 2021 menetapkan permohonan yang diajukan oleh Deki Kayame dan Yunus Pakopa tidak dapat diterima. Jadi, masih ada dua permohonan dari pasangan Fransiscus Xaverius dan Tabroni bin M Cahya serta Yufinia Mote dan Muhammad Darwis yang berlanjut ke sidang pembuktian.

Dari sisi jumlah perkara perselisihan Pilbup yang berlanjut, Sumatera mencatat paling banyak dengan jumlah 11 perkara. Dari 11 perkara itu, Sumatera Utara mencatat paling banyak sengketa, meliputi lima perkara. Masing-masing Pilbup Labuhanbatu, Pilbup Labuhanbatu Selatan, Pilbup Mandailing Natal, Pilbup Nias, dan Pilbup Samosir.

Enam sengketa perselisihan Pilbup lainnya di Sumatera tercatat di Lampung, Sumsel, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau. Masing-masing Pilbup Pesisir Barat, Lampung; Pilbup Penukal Abab Lematang Ilir, Sumsel; Pilbup Solok, Sumbar; Pilbup Indragiri, Riau; Pilbup Rokan Hulu, Riau; dan Pilbup Karimun, Kepulauan Riau.

Untuk perselisihan Pilbup Pesisir Barat, pada Jumat, 29 Januari 2021, MK menyidangkan perkara dengan pemohon Paslon Nomor Urut 2 Aria Lukita Budiwan dan Erlina. Pemohon mendalilkan adanya pemilih fiktif di TPS 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa atas nama Devi Handayani. Pada hari pencoblosan, Devi berada di Bandar Lampung. Dia tidak berada di TPS 05 tersebut. Namun, nama Devi Handayani ada dalam absen kehadiran di TPS 05 dan menandatangani.

Berikutnya, Pemohon mendalilkan terjadinya pembagian uang atau politik uang oleh tim paslon nomor urut 3

## Daftar 30 Perselisihan Pilbup dan Pilwako di MK Pasca Putusan Awal

- ▶ Pilwako Ternate, Maluku Utara
- ▶ Pilwako Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- ▶ Pilbup Boven Digoel, Papua
- ▶ Pilbup Nabire, Papua (dua perkara)
- ▶ Pilbup Yalimo, Papua
- ▶ Pilbup Teluk Wondama, Papua Barat
- ▶ Pilbup Halmahera Utara, Maluku Utara
- ▶ Pilbup Belu, NTT
- ▶ Pilbup Malaka, NTT
- ▶ Pilbup Sumba Barat, NTT
- ▶ Pilbup Sumbawa, NTB
- ▶ Pilbup Morowali Utara, Sulteng
- ▶ Pilbup Tojo Una-Una, Sulteng
- ▶ Pilbup Konawe Selatan, Sultra
- ▶ Pilbup Kotabaru, Kalimantan Selatan
- ▶ Pilbup Sekadau, Kalimantan Barat
- ▶ Pilbup Bandung, Jawa Barat
- ▶ Pilbup Tasikmalaya, Jawa Barat
- ▶ Pilbup Pesisir Barat, Lampung
- ▶ Pilbup Penukal Abab Lematang Ilir, Sumsel
- ▶ Pilbup Solok, Sumbar
- ▶ Pilbup Indragiri Hulu, Riau
- ▶ Pilbup Rokan Hulu, Riau
- ▶ Pilbup Karimun, Kepulauan Riau
- ▶ Pilbup Labuhanbatu, Sumut
- ▶ Pilbup Labuhanbatu Selatan, Sumut
- ▶ Pilbup Mandailing Natal, Sumut
- ▶ Pilbup Nias, Sumut
- ▶ Pilbup Samosir, Sumut.

yang bertujuan memengaruhi suara pemilih dengan cara pemilih dijadikan relawan dan diberikan sejumlah uang. Relawan tersebut juga diberikan Surat Keputusan sebagai relawan yang ditandatangani langsung oleh paslon nomor urut 3.

Selain itu, menurut Pemohon, ada keterlibatan aparatur Pekon berupa penggunaan dana desa untuk memenangkan paslon nomor urut 3. Termasuk juga adanya aparat tidak netral dalam bentuk keterlibatan aparatur Pekon yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih paslon nomor urut 3.

Khusus perselisihan Pemilihan Wali Kota, masih ada dua yang tersisa di MK. Masing-masing Pilwako Ternate, Maluku Utara, dan Pilwako Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Banyak yang menunggu hasil putusan MK. Boleh kecewa dengan hasilnya, namun tetap berdemokrasi sesuai dengan konstitusi. ●





# SIAP-SIAP TILANG ELEKTRONIK

Salah satu program 100 hari Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo adalah penerapan tilang elektronik. Lengkapnya, Electronic Traffic Law Enforcement atau penegakan aturan lalu-lintas secara elektronik. Ada 10 provinsi yang menjadi target penerapannya.

Penerapan tilang elektronik sejauh ini baru di Ibu Kota Jakarta saja. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menargetkan 10 Polda di Indonesia, harus bisa melayani tilang elektronik (ETLE) dalam 100 hari kerja pertamanya.

Kapolri Sigit mengungkapkan telah berkoordinasi dengan jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk mewujudkan sarana dan prasarana penunjang. "Di tingkat Polda, dalam

waktu 100 hari ini saya sudah meminta kepada Bapak Kakorlantas untuk segera mengembangkan masalah tilang elektronik yang biasa disebut dengan ETLE," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Februari 2021.

Ia berharap dalam 100 hari kerja sebagai Kapolri, setidaknya 10 Polda bisa melakukan pelayanan tilang terkait dengan masalah ETLE. Sigit juga meminta seluruh Polres di daerah meningkatkan pelayanan publik secara dar-

ing. Antara lain, kata Sigit, pelayanan pengurusan STNK, SIM hingga SKCK.

"Hari ini ada 12 Polres yang telah melaksanakan hal tersebut. Tentunya ini menjadi komitmen kami bahwa tidak hanya sampai di 12 Polres, tapi terus kita tingkatkan. Sehingga ke depan Polres-Polres secara bertahap khususnya di wilayah perkotaan yang terdukung dengan teknologi informasi dan teknologi digital, mampu memberikan pelayanan secara online," ungkap Sigit.

Sigit juga menekankan, transformasi pelayanan dan penegakan hukum dari secara tatap muka menjadi serba daring untuk mengantisipasi penyalahgunaan jabatan personel saat bertugas. "Ini juga menjadi komitmen kami bahwa di dalam pelayanan publik dan di dalam pelaksanaan penegakkan hukum ke depan kita menghindari ter-





jadinya penyalahgunaan wewenang," ujarnya.

Sedangkan Kakorlantas Polri Irfan Pol Istiono menjelaskan rencana peluncuran tahap pertama adalah pemasangan 205 kamera ETLE tersebut tersebar di 10 Polda, yakni Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda DIY, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Barat, Polda Lampung dan Polda Sulawesi Selatan.

Sebagai tindak lanjutnya, Kapolri Sigit Prabowo, akan memimpin peresmian pemasangan 205 kamera tilang elektronik ETLE nasional tahap I di 10 Polda di Indonesia pada 17 Maret 2021. Rencananya, peresmian pemasangan ETLE akan dilaksanakan di Gedung Korlantas Polri dan diikuti oleh seluruh Dirlantas Polda Se-Indonesia secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan. Pemasangan kamera ETLE tersebut menindaklanjuti salah satu dari 16 program kerja 100 hari pertama Kapolri, yaitu mengandalkan sistem tilang elektronik.

Kemudian, peluncuran tahap II direncanakan akan berlangsung pada 28 April 2021. Sebanyak 12 Polda yang sudah mendaftar, yakni Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Selatan, Polda Banten, Polda Sulawesi Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Kepulauan Riau, Polda Kalimantan Utara, Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Jawa Barat, dan Polda Jawa Tengah.

Dukungan datang dari Komisioner Kopolnas, Irfan Pol (Purn) Drs Pudji Hartanto Iskandar, MM yang mengapresiasi kebijakan Kapolri tersebut. Menurut dia, inovasi layanan publik berbasis teknologi ini sudah tepat dalam era teknologi industri 4.0.

"Kopolnas sangat mendukung dan memberi apresiasi atas program prioritas kebijakan Kapolri dalam penjabaran dan implementasi dari transformasi Polri yang Presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan," ujar Pudji Hartanto, Minggu, 14 Februari 2021.

Namun, dia mengingatkan, beberapa hal yang perlu diperhatikan,

antara lain perlunya adanya pedoman dan standar operasional prosedur Kepolisian berbasis data dan teknologi informasi (TI) yang transparan dan akuntabel di bidang lalu lintas. "Hal ini segera diperlukan agar anggota tidak gamang atau ragu dalam bertindak, serta masyarakat tidak bingung terhadap penegakan hukum lalu lintas yang modern berbasis IT dengan menggunakan sistem ETLE ini," sambung Pudji.

Menurut dia, yang tak kalah penting lainnya adalah, perlunya penyatuan sistem informasi Kepolisian yang

dustri 4.0 yang serba memanfaatkan teknologi informasi atau IT ini", tandasnya.

Tanggapan positif juga datang dari ahli manajemen inovasi dan citra, M Fariza Y Irawady. "Ini merupakan langkah konkrit di masa 100 hari kerja Kapolri yang jika terealisasi dapat sangat terasa kehadirannya di masyarakat," ujar Fariza, Jumat, 19 Februari 2021.

Selain itu, Fariza juga mengapresiasi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang berkomitmen penuh mewujudkan program 100 hari Kapolri dengan menargetkan sistem tilang elektronik



terintegrasi dan segera revitalisasi menghidupkan command center infrastruktur yang diperlukan untuk mengkoordinasikan, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan dalam satu sistem informasi yang terintegrasi antar pemangku kepentingan terkait. Seperti pemerintah daerah dan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.

Yang tak kalah penting, sambungnyanya, perlunya sosialisasi yang masif terhadap rencana langkah Polri dalam hal ini Polantas dalam penegakan hukum lalu lintas di lapangan. Secanggih apa pun peralatan dengan modernisasinya yang digunakan, tetap penerapannya kepada sumber daya manusia atau personel Polantas yang juga harus sudah siap mereformasi budaya atau kultur.

"Di sisi lain, masyarakat juga harus sudah siap berada di era revolusi in-

bisa diterapkan secara nasional sehingga tidak ada lagi penilangan oleh polisi lalu lintas. "Saya juga mengapresiasi Korlantas yang dengan sigap merencanakan untuk merealisasikan ETLE ini dalam 100 hari kerja Kapolri," ucapnya.

Menurut dia, dalam berbagai pengalaman empiris, ETLE yang telah diterapkan di beberapa tempat di Indonesia ternyata mengurangi tingkat kecelakaan karena dengan menggunakan ETLE kamera pengawas, masyarakat jadi mengetahui serta menyadari bahwa kendaraannya dipantau secara ketat dan sangat berhati-hati untuk melakukan pelanggaran.

"Inovasi ETLE ini saya yakini akan memberikan dampak peningkatan kepuasan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan citra Polri," tandas Fariza. •



# PENYEBERANGAN JANGAN DILUPAKAN

Selama ini banyak yang terkurung oleh konsep tiga moda transportasi: darat, laut, dan udara. Padahal masih ada moda transportasi penyeberangan alias ferry yang menghubungkan dua daratan atau pulau dalam jarak relatif dekat, melalui selat atau sungai dan danau.

**N**amun, begitulah, karena terkurung tiga moda transportasi tadi, maka lalu lintas penyeberangan di Indonesia memang sangat kurang mendapat perhatian. Padahal, dengan 18 ribu lebih pulau di Indonesia, sekitar enam ribu antaranya berpenghuni, lalu lintas penyeberangan idealnya menjadi sarana

vital untuk meningkatkan mobilitas atau pergerakan manusia maupun produk lokal untuk menggerakkan ekonomi.

Terlebih di masa pandemi Covid-19, angkutan penyeberangan dapat menjadi alternatif jika tersedia lebih banyak karena kemungkinan penerapan protokol kesehatan di moda transportasi ini relatif lebih mu-

dah karena ruang yang lebih lapang dan terbuka.

Toh yang baru-baru ini terjadi justru musibah terbaliknya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Bili yang sedang membongkar muatan di dermaga Perigi, Pia, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kejadian[ada Sabtu siang, 20 Februari 2021 itu berlangsung relatif cepat sebagaimana tampak dalam tayangan rekaman video yang viral di media sosial.

Karamnya KMP Bili yang bertonase 261 GT berlangsung cukup cepat. Posisi kapal terlihat miring ke kiri, sesaat sebelum menurunkan ramp door atau pintu rampa. Saat pintu rampa belum terbuka sempurna, ka-



pal lalu karam.

Karamnya KMP Bili terjadi sekitar pukul 14:00 WIB. Saat karam, cuaca di sekitar dermaga terpantau cukup cerah.

Saat karam, kapal milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Ferry Indonesia itu sedang melayani rute Kecamatan Tekarang ke Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Rute ini sebenarnya relatif pendek karena menghubungkan dua pelabuhan terpisah oleh aliran Sungai Sambas Besar yang bermuara di sentra perikanan Pemangkat.

Namun, kecelakaan tetap kecelakaan. Tim SAR gabungan pun menurunkan tim penolong ke lokasi kejadian.

"Kejadian terbaliknya kapal feri itu cukup cepat dan saat ini tim rescue kami dari Pos SAR Sintete sudah di lokasi kapal feri yang terbalik tersebut," kata Kepala Kantor SAR Pontianak, Yopi Haryadi, di Pontianak, Sabtu, 20 Februari 2021.

Sedangkan Bupati Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) Atbah Romin Suhaili menyebut, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa terbaliknya kapal motor penyeberangan (KMP) Bili yang beroperasi di Dermaga Perigi Piai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

"Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Semua penumpang dan anak buah kapal (ABK) selamat," kata Atbah, dalam keterangannya di lokasi kejadian, Sabtu sore.

Saat kejadian, kapal motor penyeberangan (KMP) Bili berpenumpang 79 orang, anak buah kapal 15 orang. Kemudian, ada 40 sepeda motor, 11 truk mengangkut pasir dan batu, serta dua mobil pribadi. Atbah menuturkan, saat ini petugas gabungan masih melakukan pendataan.

"Sampai menunggu data-data kepastian, kami melakukan tindakan selanjutnya, melakukan pertolongan terhadap kendaraan yang tenggelam," ujar Atbah.

Toh ada juga penumpang yang terluka. "Hanya ada penumpang yang luka-luka, karena melompat dari kapal penyeberangan ini. Semuanya

sudah dibawa ke Puskesmas," sambung Bupati Atbah.

Sedangkan Izar, salah satu warga Tebas, mengatakan kapal feri penyeberangan dari Dermaga Tebas Kuale tujuan Perigi Piai itu terbalik atau karam. Saat kejadian, feri penyeberangan posisinya di Dermaga Perigi Piai

ini pihak kepolisian masuk melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan kapal penyeberangan Tebas Kuala-Perigi Piai. "Kami masih mendalami penyebab tenggelamnya kapal penyeberangan ini," ungkap Kapolres.

Jadi, dugaan awal, kapal penye-



atau arah Jawai.

"Dari informasi teman saya yang menjadi penumpang feri itu, kejadian terbaliknya feri itu, diduga karena kelebihan muatan," katanya.

Aparat kepolisian bersama Basarnas dibantu instansi terkait, pun turutan mengamankan sekitar lokasi kejadian dan berusaha mengeluarkan kendaraan yang belum sempat keluar dari palka.

Kapolres Sambas, AKBP Robertus B. Herry AP mengatakan, saat

berangan KMP Bili ini tenggelam lantaran gelombang yang kuat serta kelebihan muatan. Selain itu, kapal penyeberangan yang tenggelam ini diduga mengalami kebocoran, sehingga air masuk ke dalam kapal dan membuat kapal perlahan-lahan miring dan tenggelam.

Tapi itu semua berkaitan dengan kurangnya perhatian terhadap moda transportasi penyeberangan. Pesan utamanya, Transportasi penyeberangan jangan dilupakan. ●



# HENDY SISWANTO DAN RANTIS MAUNG BUATAN PINDAD

Sudah punya lima mobil, kemudian terpilih menjadi Bupati. Selanjutnya? Tambah satu mobil lagi untuk kendaraan operasional namun dari dana pribadi.

**B**egitulah Hendy Siswanto, Bupati terpilih Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia menegaskan akan menggunakan mobil Maung buatan Badan Usaha Milik Negara PT Pindad. Mobil yang dikenal sebagai kendaraan taktis lantaran desainnya untuk segala medan itu telah dikirim oleh PT Pindad ke alamat Hendy Siswanto Center, Jember, yang selama ini menjadi pusat kegiatan persiapan dan pemenangan Pilkada 2020.

"Senang rasanya berkesempatan beli dan menjadi bagian dari launching mobil Maung Pindad, produksi mobil asli dalam negeri buatan PT Pindad. Semoga ini dapat memotivasi warga Jember untuk



bisa ikut berinovasi membuat karya yang dapat membanggakan Jember ke depan,” kata Hendy seperti dikutip dari akun instagramnya pada Selasa, 16 Februari 2021, sehari setelah Rantis Maung sampai diantar oleh tim dari PT Pindad.

Hendy merupakan lulusan sarjana Strata-1 dari Universitas Mochammad Sroedji Jember. Ia mengambil jurusan Teknik Sipil dan lulus pada 29 Desem-

Kini ia telah menjadi seorang miliarder dan terpilih menjadi Bupati Jember. Boleh jadi latar belakang karir di Kementerian Perhubungan membuatnya gemar dengan otomotif yang berfungsi sebagai alat transportasi itu.

Sejauh ini Hendy sebenarnya bukan kekurangan mobil. Tapi, ia memang belum memiliki kendaraan jenis sport utility vehicle (SUV) yang berpenampilan untuk rally atau off road menerjang

75 juta.

Dua mobil lain yang dimiliki Hendy Siswanto ialah mobil MPV keluarga Toyota Innova. Dua mobil generasi penerus Kijang ini dimilikinya, pertama Innova lansiran tahun 2005 senilai Rp 200 juta, dan Innova tahun 2013 seharga Rp 365 juta.

Nah, Rantis Maung buatan Pindad ini adalah tambahan kekayaan Hendy, sekaligus menjadi mobil termahal di



ber 1986.

Sempat menjadi aparatur sipil negara selama 23 tahun di Kementerian Perhubungan, usai pensiun dini ia memilih melanjutkan usaha di Jember. Berbagai usaha telah ia rintis, mulai dari bisnis fashion hingga air mineral.

Hendy mengaku menjalani hidup dari nol. Saat masih muda, perjalanan karirnya dimulai dari penjual tape di Pasar Tanjung dan stasiun.

medan sulit.

Mengutip laporan kekayaan untuk maju Pilkada, Hendy Siswanto tercatat memiliki dua Mercedes-Benz yang tidak disebutkan jenisnya dengan nilai masing-masing Rp450 juta. Mobil ketiga Hendy berjenis van, Kia Pregio, yang mampu mengangkut hingga 12 orang penumpang. Bupati terpilih Jember ini memiliki Pregio lansiran tahun 2005 dengan nilai yang ditaksir Rp

antara aset Bupati Jember terpilih yang menurut laporan per September 2020 memiliki total kekayaan senilai sekitar Rp 27 miliar.

Hendy sendiri menyatakan, harga mobil tersebut relatif murah dibandingkan dengan mobil spesifikasi sekelasnya, yakni sekitar Rp 600 jutaan per unit. Apalagi jika dikaitkan dengan pengalamannya melintasi jalan yang rusak di beberapa pelosok di Jember selama





masa kampanye beberapa waktu lalu.

Sebagai perbandingan, Hendy menyatakan, Land Cruiser bekas tahun 1995 sama nilainya dengan Maung Pindad tersebut. "Jadi lebih baik pakai mobil Pindad. Sekalian kami ajak

masyarakat Jember suka mobil produk dalam negeri," katanya.

Untuk itu, kata Hendy, ia memilih mobil Rantis Maung Pindad sebagai kendaraan mobil operasional. "Karena dapat menembus daerah yang sulit

diakses oleh kendaraan biasa, di mana kondisi geografis Jember berupa pegunungan dan bukit-bukit," kata dia

Dalam video yang diunggah akun instagram@hendysiswantocenter, Hendy menyebut Maung buatan Pindad menjadi pilihan antara lain lantaran produk dalam negeri. Bahkan, dia berkomitmen untuk mempromosikannya.

"Buatan Pindad, dan kita akan mempromosikan kepada seluruh warga Jember dan Indonesia untuk memakai produk dalam negeri," kata Hendy yang memiliki empat anak buah pernikahannya dengan sang istri, Kasih Fajarini, pemilik Rien's Collection.

Sedangkan Inspektur Mutu PT Pindad (Persero), Suriyadi, mengatakan Hendy Siswanto merupakan bupati pertama di Indonesia yang membeli mobil Maung yang merupakan kebanggaan PT Pindad.

"Maung Pindad yang dibeli oleh Pak Hendy dipesan dengan warna khusus yakni hitam, kemudian diantar langsung dari pabrik sebelum dirombak secara khusus," tuturnya kepada media.

Menurut keterangan di akun instagramnya, Hendy Siswanto menjadi bupati pertama di Indonesia yang membeli mobil Maung Pindad untuk kendaraan operasional. "Selain berfungsi sebagai kendaraan taktis yang dirasa cocok untuk menempuh jalur perbukitan, pertimbangan untuk membeli mobil ini dari dana pribadi adalah sebagai bentuk apresiasi Haji Hendy atas karya anak negeri," tulis @hendy-siswantocenter.

"Semoga ini memotivasi para pemuda untuk bisa berinovasi membuat karya sejenis yang dapat membanggakan Jember ke depan," kata Hendy.

Rantis Maung buatan Pindad ini memang edisi untuk masyarakat sipil. Rantis Maung dilepas PT Pindad (Persero) dengan banderol harga di kisaran Rp600 juta. Tergantung tipe dan kelengkapannya nanti.

Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose, menyampaikan bahwa Pindad berkomitmen masuk ke pasar komersial untuk Rantis Maung versi sipil yang diperkirakan akan dirilis pada pertengahan tahun 2021.

Pindad juga saat ini masih dalam



tahap pemenuhan Kendaraan Taktis Ringan Maung versi militer yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan. Sebanyak 40 unit Maung telah dikirim dan diserahkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa di Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan pada Rabu, 13 Januari 2021 lalu. 40 unit Maung tersebut merupakan tahap pertama dari 500 unit Maung yang dipesan Kemhan.

Rantis Maung buatan Pindad didesain memiliki kemampuan manuver yang gesit dan andal untuk mendukung mobilitas penggunaannya di berbagai medan. Mobil dirancang memiliki kemampuan modular untuk difungsikan menjadi berbagai varian operasi.

Dari tampilannya, Rantis Maung tampak tangguh. Di bagian depan ada empat lampu kotak yang dilapisi dengan tralis, motor winch (tali untuk menarik kendaraan) hingga 4,5 ton, serta Hi Lift jack yang membuat Rantis Maung terlihat siap melahap semua medan.

Sedangkan pada tampak samping terlihat Rantis Maung memiliki kaki-kaki yang dirancang sangat kuat berkat pemasangan suspensi depan independen, Coilover shock, dan long arm. Pada bagian suspensi belakang, Maung menggunakan Rigid, Coilover shock, dan four link arm.

Selanjutnya kemudahan untuk mengubah penggerak roda dari 2 ke 4 wheels juga dirasakan siapa saja yang mengendarai Rantis Maung. Karena pada bagian center dashboard pengemudi cukup mengubah penggerak dari 2 Wheel menjadi 4 Wheel dengan memutar tombol.

Sedangkan Hendy sudah berniat mengoperasikan Rantis Maung miliknya jika sudah resmi menjadi Bupati. "Ini mobil pribadi. Bukan punya pemerintah. Saya beli sendiri. Nanti saya bawa, karena fasilitas pemerintah tidak ada mobil untuk gunung. Lokasi Jember kan bergunung," katanya.

Wah, bakal meriah warga pelosok Jember menyambut kedatangan Pak Bupati. Memberdayakan warga juga ya Pak Hendy. •

# BERNIAT MEMBENAH JEMBER

**N**iat Hendy menjadi Bupati Jember adalah ingin memperbaiki kabupaten tempat kelahirannya. Toh berkarir sebagai ASN Kemenhub di Ditjen Perkeretaapian Indonesia tuntas. Membangun bisnis bersama keluarga dan menjadi pengusaha kaya raya juga sudah.

Rupanya kemakmuran keluarganya di Jember masih harus berdampingan dengan para tetangga yang makan teratur tiga kali sehari saja masih kesulitan. Tambahan pula kondisi infrastruktur kabupatennya ia nilai masih ketinggalan. Bukan cuma jalan utama yang jarang mengalami perbaikan, bahkan kantor pemerintahan saja ada yang terancam roboh.

Ringkas cerita, Jember di mata Hendy mandek, padahal kabupaten lumbung padi Jawa Timur sejak lama. "Ada yang salah dan saya mendapat panggilan untuk memperbaikinya," kata dia.

Salah satu kelemahan Jember pada lima tahun terakhir adalah realisasi pembangunan yang seret. Indikasinya adalah Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (Silpa) Jember selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pernah malah pada 2018, Silpa berada di angka Rp713 Miliar sementara APBD pada tahun yang sama tercatat Rp3,5 triliun.

Masalah APBD Jember memang kerap menjadi pemicu kisruh politik lokal antara eksekutif dan legislatif. Bahkan untuk APBD 2021 saja masih kisruh hingga akhir Januari 2021 lalu.

Karena itulah Hendy siap maju sebagai calon Bupati meskipun pada survei awal masih belum meyakinkan. Ia memilih slogan 'Wes Wayahe Mbenahi Jember' (Sudah Saatnya Membenahi Jember). Putra ketiga pasangan Slamet Alwi dan Alfiah Tarsiyah kelahiran Kampung Ledok, Kaliwates, Jember ini berpasangan dengan calon wakil bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman, putra KH Achmad Siddiq yang pernah menjadi Rais Aam PBNU.

Setahun sebelum pemilihan, ia sudah memulai sosialisasi. Modal awalnya selama 12 tahun terakhir rajin membagikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam jumlah besar, terutama saat hari-hari raya Islam. Saat Ramadan, dia membagikan 7.500 kotak takjil ke 1.100 masjid di seluruh Jember. Hendy juga membangun Masjid Roudlotul Muchlisin dan menjadi ketua takmir beberapa masjid.

Segecap dukungan dari partai politik pendukung, calon wakil bupati, dan segecap pemilihnya mengantarkan Hendy menjadi bupati terpilih. Kini warga Jember menantikan realisasi janji-janji kampanyenya. Membenahi Jember. •





# SETELAH LIDO MENJADI KEK PARIWISATA

Dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru menjadi harapan membangkitkan ekonomi saat dan pasca pandemi. Masing-masing adalah KEK Pariwisata Lido, Bogor, Jawa Barat dan KEK Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE), Gresik, Jawa Timur.

**Y**ang lebih heboh memang KEK Pariwisata Lido. Di lokasi ini sudah terlacak jejak-jejak bisnis Donald Trump, Presiden Amerika Serikat 2016-2020, yang telah masuk ke Indonesia menggandeng mitra lokal MNC Land kelolaan taipan Hary Tanoesoedibjo.

Selain di Lido, bisnis properti mewah bernama Trump Residences memilih lokasi pengembangan di kawasan

Tanah Lot, Bali, destinasi pariwisata global yang sudah jadi. Sedangkan Lido merupakan kawasan pariwisata yang sejauh ini masih bersifat lokal. Status KEK pariwisata memang bisa memuncunya menjadi kawasan pariwisata global.

Trump Residences merupakan resor dan hunian ultra mewah yang terintegrasi pertama di Indonesia. Namun, wabah Covid-19 sudah jelas meng-

ganggu banyak sektor bisnis, tak terkecuali properti, termasuk proyek properti kelas atas kerja sama antara PT MNC Land Tbk dan Trump Hotel Collection: Trump Residences di Bali maupun Lido. Proyek kerja sama antara perusahaan milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Hary Tanoesoedibjo ini pun terkena pukulan corona sehingga mundur dari rencana semula.

Analisis Mirae Sekuritas Indonesia, Joshua Michael mengatakan pandemi corona membuat 2020 sebagai tahun yang sulit bagi para pengembang properti, termasuk MNC Land. Apalagi, Bali yang terkenal sebagai kawasan wisata sebagai wilayah yang paling ter-pukul selama pandemi.

"Peluncuran Trump Residences Bali





dan Lido akan tergantung pada seberapa cepat pandemi Covid-19 dapat mereda, lalu dilanjutkan 1 - 2 tahun periode konstruksi," kata Joshua dalam riset yang dipublikasikan pada awal Mei 2020 lalu.

Namun, status KEK Lido membuka harapan baru. Proyek Trump Residences milik MNC Land dan Trump Hotel Collection merupakan proyek properti kelas atas yang menyasar orang-orang terkaya di Tanah Air karena harganya yang premium. Harga jual rata-rata properti Trump Residences Bali dan Lido berkisar Rp 8 - 15 miliar per unit untuk kondominium, dan Rp 30 - 80 miliar untuk vila.

Menurut Joshua, harga jual setinggi itu hanya akan terjangkau bagi 10 persen orang berpenghasilan tertinggi di Indonesia. Menurut data Bank Dunia, 10 persen orang terkaya ini menguasai hingga 30 persen dari total pendapatan penduduk negeri ini atau masuk ke dalam kuartil pertama kelompok pendapatan dunia. "Karena Indonesia masih berada di kuartil kedua GNI (gross national income) dunia per ka-

pita," ujarnya.

Yang tak boleh dilupa pula, belum tentu pasar kedua proyek properti itu hanya untuk warga negara Indonesia. Katakanlah misalnya, untuk para investor luar negeri yang memerlukan tempat peristirahatan di wilayah tropis yang berarti sektor pariwisata, bukan semata properti.

Nah, gayung pun bersambut dengan persetujuan Dewan Nasional menetapkan KEK Pariwisata Lido di Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam rapat yang berlangsung pada 10 Februari 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Dewan Nasional KEK, menerangkan rencana di balik penetapan ini.

Usulan KEK Lido adalah KEK Pariwisata dengan sederet rencana bisnis. Dalam KEK tersebut bakal ada pengembangan atraksi seperti theme park kelas dunia, lapangan golf, serta retail and dining. Selain itu, ada pula pengembangan akomodasi, di antaranya six stars luxury resort, hotel berbintang lainnya, serta pengembangan

TOD.

Selanjutnya, direncanakan pula terdapat pengembangan ekonomi kreatif meliputi studio film dan festival musik. Dengan begitu, diharapkan kawasan ini benar-benar mendongkrak sektor pariwisata Tanah Air. "KEK Lido diharapkan betul-betul bisa mendorong pariwisata di Indonesia," kata Airlangga melalui keterangan resminya, Sabtu, 13 Februari 2021.

Kehadiran theme park yang akan dibangun di dalam KEK Lido diprediksi akan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman). Peningkatannya ditargetkan hingga mencapai 63,4 juta orang sampai 2038 atau rata-rata 3,17 juta wisatawan per tahun.

Inflow devisa dari wisman serta penghematan outflow devisa dari wisnus dapat mencapai 4,1 miliar dollar AS selama 20 tahun. "Hasilnya harus jelas, turis ke Jawa Barat juga harus yang berkualitas internasional. Ini harus menjadi yang premium juga, dan devisanya pun premium," tegas Airlangga.

Saat ini, MNC Lido City sedang mengembangkan kawasan hunian, komersial, destinasi wisata dan resort terintegrasi seluas 3.000 hektar di Lido, Bogor, Jawa Barat. Lokasi tersebut berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten, dikelilingi dengan lebih dari 70 juta penduduk.

Berlokasi sekitar 60 kilometer dari Jakarta, MNC Lido City dapat dicapai langsung melalui Tol Bocimi dengan waktu tempuh satu jam dari Jakarta. PT MNC Land Tbk bekerja sama dengan

bagai wahana, pertunjukan, dan atraksi. Rencana lain adalah membangun Luxurious International Resort, Golf Club & Residences Lido.

Inilah resor super-mewah dengan standard internasional yang menawarkan berbagai layanan personal, termasuk premium fine dining restaurant, spa, dan fasilitas conference, yang didesain oleh perusahaan internasional yang telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, Oppenheim Architecture, HBA, dan EDSA. International Golf Club Lido,

es yang menghadirkan desain modern berada di kawasan seluas 350 hektar. Lido Residences terdiri dari 281 hunian mewah dan 180 kondominium.

Perjalanan MNC berbisnis dengan Trump Hotel Collection lumayan panjang. Berawal dengan perjanjian manajemen kedua belah pihak pada 2015 untuk mendirikan resor pertama di Asia yang mengusung brand Trump, sebuah brand prestisius yang identik dengan kemewahan dan kualitas tak tertandingi.

Pada sisi MNC Land, proyeksi kawasan Lido kelak adalah menjadi kota mandiri sekaligus menjadi proyek unggulan MNC Land, "Pride of the Nation", yang menawarkan integrated lifestyle destination di lahan seluas 3.000 hektare. Proyek ini diharapkan dapat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Jawa Barat melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan vitalisasi sektor pariwisata dan properti, dan fasilitas penunjang lainnya.

Jadi, tak mengherankan jika Dewan Nasional KEK menyetujuinya sebagai salah satu yang akan mendapat fasilitas seperti KEK lainnya. Pengembangan KEK biasanya mendapat fasilitas keringanan pajak dengan harapan mendorong lokasi itu sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan kehadiran pebisnis global.

Dukungan juga datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta Bupati Bogor Ade Yasin. Gubernur Emil juga menekankan agar MNC Land lebih responsif dalam menyikapi keputusan tersebut.

"Saya hanya minta komitmen dari MNC Land yang memiliki KEK untuk merespons secepatnya. Jangan KEK didapat statusnya, tapi di lapangan tidak ada pergerakan yang signifikan, itu aja" kata Gubernur Emil yang juga seorang arsitek handal di Bandung, Senin, 15 Februari 2021.

Sedangkan Bupati Bogor Ade Yasin menginginkan dampak pertumbuhan ekonomi KEK Lido sampai ke warganya. "Saya harap KEK Lido ini akan meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah, mendorong investasi dan mempercepat pemulihan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor," ungkap Bupati Ade. ●



Pemerintah juga akan membangun transit-oriented development (TOD) sebagai sarana transportasi publik tambahan.

Dalam proyek ini bakal terdapat MNC World Lido, yang meliputi MNC Park, yakni theme park kelas dunia pertama di Indonesia dengan teknologi canggih. MNC Park akan menampilkan ber-

misalnya, dirancang oleh Ernie Els, salah satu pegolf tersukses dalam sejarah dan pemenang 'Designer of the Year 2015' dari World Golf Awards. Menghadirkan 18-hole lapangan golf kejuaraan standar PGA dengan panorama Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango yang terbentang luas.

Selanjutnya, ada pula Lido Residenc-



# ADA AKR DI BALIK KEK JIPE GRESIK

**M**emang tak seheboh KEK Lido. Namun, pengembang kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE) Gresik, Jawa Timur bukan sembarangan: PT AKR Corporindo Tbk, kelompok usaha yang berangkat dari bisnis kimia dan kian menggurita ke mana-mana termasuk bisnis bahan bakar minyak (BBM) dan properti. Di JIPE Gresik, kelompok usaha AKR (Aneka Kimia Raya) bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pelabuhan Indonesia III.

Rupanya, penjajakan JIPE Gresik menjadi KEK bukan rencana kemarin sore. Kabar kawasan itu akan menjadi KEK sudah sayup terdengar sejak November 2020. AKR pun langsung menyambut baik dukungan pemerintah untuk menjadikan JIPE Gresik sebagai KEK.

Direktur AKR Corporindo menyampaikan bahwa JIPE di Gresik merupakan aset berharga dalam meningkatkan nilai ekonomi melalui investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Dalam rangka mendorong pengusaha dan pemilik modal untuk berinvestasi di JIPE, jajaran manajemen pengembang dan pengelola kawasan industri JIPE yaitu PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BMKS) yang terdiri dari PT AKR Corporindo Tbk. dan PT Pelabuhan Indonesia III pun mengajukan wilayahnya sebagai KEK Teknologi dan Manufaktur.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambangi JIPE Gresik dan mengecek kendala proyek hilirisasi mineral saat pandemi di sana. PT Freeport Indonesia tengah membangun fasilitas pemurnian atau smelter di kawasan industri JIPE terse-

but.

Direktur Utama BMKS Bambang Soetiono menyampaikan bahwa JIPE adalah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 ha, yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan multiguna, area komersial dan perumahan.

Selain Freeport Indonesia, PT Waskita Beton Precast Tbk. dan PT Pangan Sari Utama Food Distribution sudah lebih dulu masuk ke JIPE Gresik. Pada tahun ini AKR Corporindo menargetkan penjualan lahan di JIPE mencapai 30 hektare. Target tersebut bisa saja bertambah sesuai dengan permintaan calon pembeli. Pertumbuhan investasi secara langsung akan mengerek permintaan lahan di kawasan industri. Oleh karena itu, dia yakin kontribusi lini usaha ini bakal bertumbuh sepanjang 2020.

Sekadar info saja, pendapatan AKR dari sewa Freeport pada 2020 saja mencapai Rp87 miliar. Selain itu, AKR bermitra dengan British Petroleum di bisnis eceran BBM. Mitra lainnya adalah Petronas Malaysia yang bersama AKR berbisnis distribusi bahan kimia metanol.

Sedangkan JIPE merupakan kawasan industri terbesar di Jawa Timur sekaligus yang terintegrasi pertama di Indonesia. Termasuk pelabuhan dan dermaga untuk kapal pesiar. Juga perumahan berkonsep kawasan industri yang ramah lingkungan, bernama GEM City, dengan berbagai fasilitas eksklusif, seperti lapangan golf dan pusat perbelanjaan yang ada dalam kawasan industri. ●





# KISAH MENDADAK MILIARDER DARI TUBAN

Desa Sumurgeneng di Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur tiba-tiba menyeruak di tengah suasana pandemi Covid-19. Bukan karena banyak yang terpapar Covid-19, melainkan lantaran warganya bagaikan terkena wabah memborong 176 mobil baru usai mendapat ganti rugi lahan kilang minyak dari pembebasan lahan bakal lokasi kilang bahan bakar minyak.

Jadi, desa itu kini dijuluki "Kampung Miliarder", di sisi lain warganya enggan membeli mobil murah untuk dipakai sendiri. Kepala Desa Sumurgeneng, Gianto bilang total mobil yang sudah dibeli warganya disebut 176 unit. Sedangkan Toyota, lewat dealer Auto2000 Tuban, jadi merek yang paling diminati para miliarder baru ini.

Kepala Cabang Auto2000 Tuban, Arie Soerjono mengatakan sejak April 2020, pihaknya sudah mengirim mobil 130 unit. Low Cost Green Car ataupun Low Multi Purpose Vehicles yang dikenal lebih ramah di kantong, ternyata kurang diminati kampung miliarder.

Bahkan di antara mereka ada yang memiliki 2-3 mobil baru. Jika yang dibeli mobil Low Multi Purpose Vehicle (LMPV, mobil serbaguna murahan) dan Low Cost Green Car (LCGC) mobil murahan hemat bahan bakar dan ramah

lingkungan, maka itu untuk sanak saudara, bukan dipakai sendiri. "Untuk segmennya, karena di sana adalah penerima duit besar, kendaraan mayoritas segmennya di Innova, ada sebagian di Fortuner, dan Rush," ungkap Arie

"Jarang sekali, hampir nggak ada beli LCGC, ada mungkin dia belikan untuk saudaranya. Tapi untuk dia sendiri tidak ada LCGC sama sekali, karena kan gengsi, mereka rata-rata terima uang minimal Rp 7 miliar," sambung Arie.

Hal unik lain ialah referensi pembelian mobil. Arie mengatakan sebelum membeli kebanyakan warganya melirik apa yang dibeli oleh tetangganya. "Coba kalau di awal banyak yang beli Alphard, rasanya banyak yang beli Alphard. Sistemnya kan dia melihat 'oh dia beli apa ya', dia ngikut," cerita Arie.

Pasar otomotif di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban meroket bahkan





empat kali lipat dari biasanya. Padahal market otomotif secara umum sedang anjlok lantaran pandemi Covid-19. "Market Jenu sendiri peningkatannya 400 persen, kalau yang sebelumnya itu marketnya sebulan cuma 15 jadi 60-an," kata Arie.

Kepala Desa Sumbergeneng Gianto membenarkan hal tersebut. "Ya memang kondisinya begitu, dapat uang lalu beli mobil, ada juga yang dibelikan tanah lagi maupun bangunan rumah juga," kata dia.

Warga, kata dia mendapatkan uang hasil penjualan tanah yang rata-rata mencapai Rp8 miliar. Bahkan ada warga yang menerima Rp26 miliar dan Rp 38 miliar atas kepemilikan beberapa hektare lahan.

Meski demikian Gianto mengaku khawatir jika warga tidak memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan jangka panjang. "Yang dibuat untuk usaha sedikit, banyak yang digunakan untuk beli mobil, sudah ada 176 mobil baru yang dibeli secara bertahap, kemarin baru datang 17 mobil," ujarnya.

Ali Sutrisno salah satu warga yang menjual tanahnya kepada PT Pertamina, misalnya, memborong empat mobil sekaligus yakni Toyota Avanza, Xpand-

er, HRV, dan L3000. Tak hanya empat mobil, ia juga membeli tanah seluas 8.000 meter persegi.

Sedangkan uang hasil pembebasan lahannya mencapai Rp15,8 miliar. Uang Rp15,8 miliar itu berasal dari pembebasan lahan seluas 2,2 hektar. Nilai ganti ruginya mencapai Rp 685.000 per meter persegi.

Alasannya membeli empat mobil sekaligus dan tanah karena ingin menikmati uang tersebut. "Masa dulu yang susah, sekarang uang banyak ya dinikmati," katanya, Kamis, 18 Februari 2021.

Ali mengaku, setelah uang ganti rugi dibayarkan, warga seperti sepakat membeli mobil bersama, tujuannya agar bisa viral. Tak hanya itu, kata Ali, agar dapat bertemu dengan Pak Presiden.

"Bersatu kita untuk membeli, jadi bareng-bareng gitu. Biar viral, biar ketemu sama Pak Presiden," ungkapnya.

Setelah mendapatkan uang ganti rugi dari Pertamina, kehidupan warga di desanya menjadi jauh lebih baik. Jika dulu banyak warga yang mempunyai banyak utang dan ekonominya kurang, kini sudah menjadi lebih baik.

Tak hanya itu, banyak juga warga

yang menggunakan uangnya untuk renovasi rumah dan modal usaha. Meskipun awalnya ada warga yang menolak menjual tanahnya ke Pertamina. Namun, karena kepentingan negara warga pun akhirnya mau menjual tanahnya.

"Awalnya itu ada yang setuju, ada yang enggak. Demi kepentingan negara kita merelakan," ujarnya.

Untuk proses ganti rugi, kata Ali, memakan waktu dua tahun. Awalnya tanah-tanah milik warga didata pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian datanya diserahkan kepada Pertamina. Setelah itu, baru turun harga tanah per meter perseginya. Kata Ali, harga awal dan akhir nominalnya tetap.

Lain lagi kisah Siti Nurul Hidayatin, 32. Perempuan ini menjual tanah seluas 2,7 hektare dengan nilai Rp 18 miliar. Dia pun memborong tiga mobil, yakni Innova, HRV dan mobil pikap untuk usaha.

"Dua mobil yaitu Innova dan HRV, lalu ada mobil pikap buat usaha. Bangun TPA dan Deposito juga," kata Nurul, Rabu, 17 Februari 2021.

Bahkan dia juga berencana berangkat haji ke Tanah Suci Mekah. Ada sembilan orang yang berangkat, antara

lain suaminya, sepupu dan orangtua. "Ya mau ke Tanah Suci, ini kan impian umat islam, Cita-cita lah. Doanya saja semoga berkah," jelasnya.

Sedangkan Kholikah, 50, mendapat uang Rp4,5 miliar dari penjualan tanah seluas 600 meter persegi. Kholikah memilih menggunakan uang tersebut untuk membuka usaha mebel.

"Uang saya investasikan ini, untuk usaha mebel juga yang kini buka di rumah. Alhamdulillah jalan," kata dia.

gan harga Rp 600 ribu sampai Rp 800 ribu per meternya.

Menurut dia, harga itu jauh lebih tinggi dari harga rata-rata tanah di wilayah tersebut. Rata-rata warga mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan Rp8 miliar. Sehingga banyak warga yang memutuskan untuk membeli mobil.

Dari pihak Pertamina muncul pengakuan bahwa warga setempat pernah menolak pembebasan lahan lantaran nilainya dianggap terlalu rendah. Per-

yasi di PN Tuban (tahun) kemarin," kata Koordinator Konsultan Pengadaan Tanah PT Pertamina M Triyono.

Kepala Dusun Pomahan, Sumurgeneng, Kasiyanto mengungkapkan, di wilayahnya ada 70 kepala keluarga (KK) di Dusun Pomahan yang mendapatkan uang penjualan tanah dari Pertamina. Dari 70 KK itu, sekitar 50 KK awalnya menolak keras menjual tanah untuk pembangunan kilang minyak new grass root refinery (NGRR).

"Mereka yang membeli mobil baru secara bersamaan kemarin itu kelompok yang dulunya menolak keras menjual tanahnya," kata dia. Setelah menemukan kecocokan, kini tanah mereka dibeli dengan harga bervariasi dan bernilai miliaran, bahkan ada yang



Kades Sumurgeneng, Gianto menjelaskan pembebasan lahan untuk pembangunan kilang minyak itu dilakukan Pertamina dan Rosneft, perusahaan asal Rusia. Tanah warga dibayar den-

tamina akhirnya menempuh upaya konsinyasi melalui Pengadilan Negeri (PN) Tuban untuk mendapatkan lahan yang tersisa pada November 2020 lalu.

"Jadi kami melakukan upaya konsin-

“  
Harga itu jauh lebih tinggi dari harga rata-rata tanah di wilayah tersebut. Rata-rata warga mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan Rp8 miliar.

mendapatkan uang di atas Rp 20 miliar.

Sedangkan Kepala Desa Sumurgeneng Gianto mengaku khawatir meskipun warganya mendadak menjadi miliarder. Sebab, sebagian besar warganya sedikit menggunakan uang itu untuk usaha.

"Ada rasa kekhawatiran karena sedikit yang dibuat usaha," kata Gianto. Sekarang, sambungnya, hampir setiap rumah yang mendapat uang pembebasan lahan memiliki satu hingga tiga mobil di garasinya. Selain membeli mobil, ada sebagian warga memilih membeli tanah dan membangun rumah.

"Warga yang menggunakan uangnya untuk usaha sangat minim. Jadi, jangan heran kalau di kampung sini cari warung makan aja susah," ungkapnya. ●





# HEDONISME MODEL KAMPUNG MILIARDER

**S**ecara ilmiah, gejala pembelian 176 mobil oleh warga di Sumurgeneng, Jenu, Tuban, Jawa Timur itu boleh dibilang sebagai perilaku hedon. Hedon, dari bahasa Yunani yang berarti bersenang-senang, secara lebih luas merupakan perilaku yang tindakan intinya adalah mencapai kenikmatan dan menghindari penderitaan.

Toh sebenarnya bukan dari desa Sumurgeneng saja. Pembebasan lahan yang membuat warga kaya mendadak mencakup pula Desa Wadung, dan Desa Kaliuntu, tetangga Sumbergeneng di Kecamatan Jenu, Tuban.

Nah, perilaku hedon biasanya bersanding dengan ungkapan *carpe diem*, nikmatilah hari ini. Soal besok dan masa depan, bagaimana nanti saja, bukan nanti bagaimana. Seperti Ali, warga Sumurgeneng, yang mengungkapkan, "Masa dulu yang susah, sekarang uang banyak ya dinikmati," katanya.

Malah Ali berharap perilaku hedonnya akan mengantarnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian.

Mudah dipahami jika kemudian Presiden Direktur PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia Kadek Ambara Jaya mengaku sedih dan khawatir warga yang mendadak

jadi miliarder itu terancam miskin jika tak bisa mengelola uang dengan baik. "Kalau ini terjadi, saya yang salah, karena tidak mengawal dan mendampingi mereka," kata Kadek Rabu, 17 Februari 2021.

Oleh sebab itu, Kadek berniat melakukan riset sosial untuk memetakan kondisi warga di tiga desa tersebut. Riset sosial itu akan dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga.

"Kita akan gandeng tim riset dari Lembaga Antropologi Untuk Riset dan Analisa dalam rangka membangun cetak biru CSR (corporate social responsibility) perusahaan berbasis kearifan lokal," ungkapnya.

Pihaknya juga ingin melibatkan warga dalam berbagai program padat karya. Program itu merupakan salah satu upaya kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tengah masyarakat. Sebelum melibatkan warga, Pertamina Rosneft akan memberikan pembinaan dan pelatihan. Sehingga, masyarakat memiliki skil yang baik.

"Kita punya kewajiban untuk membantu warga dari ring satu, apalagi warga saat ini kan mulai susah karena Covid-19," jelasnya.

Jadi, perilaku hedon belum tentu berarti bersenang-senang selalu. Apalagi pandemi Covid-19 belum juga berlalu. •



# SELAMAT DATANG DAN BERJUANG LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI

Menyusul pembentukan Indonesia Investment Authority (INA). lembaga pengelola ratusan triliun rupiah investasi global dengan model sovereign wealth fund, Presiden Joko Widodo memperkenalkan figur-figur yang tergabung sebagai anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA).

**P**erkenalkan para putra dan putri terbaik bangsa yang telah memiliki pengalaman internasional tersebut berlangsung di veranda Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 16 Februari 2021. "Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperkenalkan putra-putri terbaik bangsa yang duduk di jajaran Dewan

Pengawas dan Dewan Direktur Indonesia Investment Authority ini," ujar Presiden.

Anggota Dewan Pengawas INA, yang terdiri atas lima orang, sebelumnya telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden pada 27 Januari 2021 lalu. Kelimanya yang kali ini diperkenalkan Presiden ialah:

Menteri Keuangan (Sri Mulyani), sebagai ketua merangkap anggota; Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir), sebagai anggota; Haryanto Sahari, sebagai anggota; Yozua Makes, sebagai anggota; dan Darwin Cyril Noerhadi, sebagai anggota.

Sedangkan Dewan Direktur INA, juga terdiri atas lima orang yang semuanya berasal dari kalangan profesional, ialah sebagai berikut: Ridha Wirakusumah, sebagai Ketua Dewan Direktur; Arief Budiman, sebagai Wakil Ketua Dewan Direktur/Direktur Investasi; Stefanus Ade Hadiwidjaja, sebagai Direktur Investasi; Marita Alisjahbana, sebagai Direktur Risiko; dan Eddy Porwanto, sebagai Direktur Keuangan.

Lembaga Pengelola Investasi merupakan pengelola dana abadi inves-



tasi dalam negeri yang dibentuk oleh undang-undang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

"Pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, diperintah langsung oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020," ujar Presiden saat menjelaskan pentingnya pembentukan INA.

Dewan Pengawas LPI terdiri atas lima orang dengan dua di antaranya ditetapkan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Adapun tiga orang lainnya berasal dari unsur profesional dan independen yang sebelumnya telah melalui sejumlah proses seleksi serta memperoleh persetujuan DPR.

Dewan Pengawas LPI tersebut selanjutnya memilih dewan direktur yang berjumlah lima orang yang seluruhnya diisi oleh kalangan profesional sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo.

Keterlibatan unsur profesional dan independen tersebut diharapkan akan menjamin INA sebagai institusi profesional yang bergerak dan bekerja berdasarkan pertimbangan profesional dari pengalaman puluhan tahun para anggotanya. "INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh undang-undang dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. INA juga dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional yang dijaring oleh panitia seleksi dibantu oleh para headhunter profesional," kata Presiden.

Dengan fondasi hukum dan dukungan politik yang kuat serta dijalankan oleh dewan pengawas, jajaran direksi, dan jejaring internasional yang hebat, Kepala Negara meyakini bahwa INA

akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional. "Saya bersama jajaran pemerintah juga mengharapkan DPR, BPK, dan lembaga-lembaga negara lainnya juga mendukung penuh gerak Indonesia Investment Authority ini. Harus inovatif, harus berani ambil keputusan yang out of the box dengan tata kelola yang baik. Indonesia harus mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi Indonesia Maju," tandasnya.

Sedangkan Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja dengan integritas tertinggi dan tata kelola

yang baik. INA merupakan lembaga pengelola investasi yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk membantu membangun perkembangan Indonesia secara lebih menyeluruh.

"Beberapa hal yang kami akan tekankan dalam menjalankan INA ini adalah yang pertama kami akan secara tegas dan jelas menjalankan ini dengan the highest integrity dan governance yang berlaku sehingga kami dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar," ujar Ridha di veranda Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 16 Februari 2021.

Ridha juga menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya keras untuk



dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. "Kami akan berusaha keras untuk dapat menjaring investor-investor asing dan dalam negeri agar bisa berpartisipasi bersama dengan INA untuk mengembangkan lagi program-program pemerintah secara lebih cepat sehingga pembiayaannya akan lebih lancar dan menyeluruh, juga meringankan beban pembiayaan atau pinjaman yang tentunya merupakan bagian dari pembangunan," tuturnya.

Ridha Wirakusumah merupakan seorang eksekutif senior di industri per-

Ridha selaku Ketua Dewan Direktur INA akan bersama empat orang profesional lainnya dalam menjalankan tugas. Sosok profesional pertama ialah Arief Budiman sebagai Wakil Ketua Dewan Direktur atau Direktur Investasi INA. Arief merupakan seorang eksekutif di industri keuangan dan investasi dengan pengalaman internasional dan domestik selama 25 tahun.

"Dalam usia yang sangat muda beliau dipercaya sebagai Presiden Direktur McKinsey Indonesia, pernah menjadi konsultan Booz Allen Hamilton di Amerika dan di Asia, serta pernah menjadi Direktur Utama Danareksa dan Direktur Keuangan Pertamina," ucapnya.

internasional lebih dari 30 tahun.

"Beliau pernah menjabat sebagai Country and Corporate Risk Manager Citibank Indonesia selama 15 tahun dan merupakan WNI pertama yang memegang posisi tersebut sepanjang sejarah. Pernah juga sebagai Country and Corporate Risk Manager Citibank Thailand, Vietnam, dan Filipina," ujarnya.

Terakhir, ada figur Eddy Porwanto yang terpilih sebagai Direktur Keuangan. Eddy adalah salah satu profesional dengan pengalaman 30 tahun dalam pengelolaan keuangan dan turnaround kinerja berbagai perusahaan.



bankan, jasa keuangan, dan investasi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di berbagai institusi terkemuka internasional dan Indonesia. Ridha menjadi salah satu figur anggota Dewan Direktur INA yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Beliau sangat berpengalaman sebagai eksekutif senior di industri perbankan, jasa keuangan, dan investasi. Terakhir sebagai CEO di Bank Permata. Beliau pernah memiliki pengalaman panjang di berbagai perusahaan multinasional seperti Presiden dan CEO AIG Asia Pasifik, Presiden dan CEO General Electric di Asia Pasifik, serta CEO di Maybank Indonesia," kata Presiden saat memperkenalkan Ridha.

Selanjutnya, ada Stefanus Ade Hadiwidjaja sebagai Direktur Investasi yang merupakan seorang praktisi investasi profesional muda Indonesia dengan pengalaman di tingkat internasional.

"Berpengalaman sebagai konsultan internasional, CEO, dan komite investasi di berbagai perusahaan multinasional. Di antaranya sebagai Managing Director dan Country Head Creador untuk Indonesia dan Singapura," tutur Presiden.

Sebagai Direktur Risiko INA, terdapat Marita Alisjahbana yang merupakan profesional di bidang manajemen risiko yang disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai yang paling senior di Indonesia. Marita memiliki pengalaman

"Beliau expert di pengelolaan keuangan dan berpengalaman dalam turnaround kinerja dan value improvement di berbagai perusahaan multinasional. Punya banyak pengalaman sebagai direktur keuangan di berbagai sektor industri penerbangan, otomotif, dan consumer goods. Pernah juga di Northstar Pacific dan CFO General Motors Indonesia," ucap Kepala Negara.

Dengan figur-figur terbaik tersebut, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar INA mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional yang nantinya akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. ●



# TENTANG RIDHA DAN LPI

**R**idha Wirakusumah, merupakan putra rektor pertama Universitas Mulawarman (Unmul) Sambas Wirakusumah. Sosok Ridha Wirakusumah melambung setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai CEO Indonesia Investment Authority (INA).

Pria yang sebelumnya menjabat CEO Permata Bank tersebut memimpin lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund. Lembaga yang dipimpin Ridha diperkirakan akan menampung investasi ratusan triliun rupiah.

Ide membentuk Indonesia Investment Authority (INA), nama resmi lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund, muncul dari upaya pemerintah mencari dana pembangunan. Jika selama ini melalui utang luar negeri, tidak dengan INA yang berfokus kepada investasi asing.

Investor global bisa menanamkan modal di INA. Selanjutnya, INA mengelola investasi tersebut melalui kerja sama multipihak termasuk dengan BUMN. Dengan demikian, status d a n a

“  
Investor global bisa menanamkan modal di INA. Selanjutnya, INA mengelola investasi tersebut melalui kerja sama multipihak termasuk dengan BUMN.

yang masuk bukanlah pinjaman atau utang melainkan investasi alias modal.

Konsep menghimpun sumber dana pembangunan negara dari sovereign wealth fund atau SWF sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah negara maju telah menerapkan sejak lama. Arab Saudi, Singapura, Norwegia, adalah tiga antaranya.

Ridha lahir pada 26 April 1963 di Bogor, Jawa Barat. Nama lengkapnya adalah Ridha Djuanda Muliawibawa Wirakusumah. Ketika Prof. Sambas menjabat sebagai rektor Unmul pada 1972, ia masih berusia sembilan tahun.

Laki-laki yang kini berusia 57 tahun tersebut merupakan jebolan dari universitas luar negeri. Sebagaimana dicatat laman resmi Bank Permata, Ridha memperoleh gelar sarjana sains (bachelor of science) dari Ohio University, Amerika Serikat, pada 1985. Dua tahun kemudian, ia meraih predikatmaster administrasi bisnis (master

of business administration) dari universitas yang sama. Adapun gelar doktornya, diraih dari City University Hong Kong pada 2016 untuk bidang administrasi bisnis.

Ridha bukan orang sembarangan di sektor perbankan. Ia adalah bankir dengan jabatan mentereng. Di antaranya, Managing Partner di DNBCConsulting and Investments, Hong Kong (2014-2016), Anggota Dewan Komisaris PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2014-2016), Anggota Dewan Komisaris Postcard and Tag, Hong Kong (2015-2016), Anggota Dewan Komisaris PT Bayan Resources Tbk (2016), dan Direktur Utama PTMaybank Indonesia Tbk. (2009-2011).

Ayah Ridha, Prof. Sambas, adalah lulusan dan dosen Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, sekarang Institut Pertanian Bogor. Ia ikut mendirikanAkademi Ilmu Kehutanan (AIK) Jabar di Kabupaten Sumedang sekaligus direktur pertama pada 1967. Sementara itu, Unmul yang sudah 10 tahunberdiri belum memiliki rektor. Prof. Sambas pun ditugaskan sebagai rektor pada universitas negeri pertama di Kaltim tersebut pada 1972.

Selama delapan tahun di Kaltim, Prof. Sambas membangun Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida. Unmul juga menjadi pusat unggulanpendidikan hutan hujan tropika se-Asia Tenggara di bawah kepemimpinannya.

Jalinan ayah dan anak sudah kelihatan: Ekonomi berkelanjutan. ●





# BENDUNGAN TAPIN HARAPAN BARU EKONOMI LOKAL

Tuntas sudah proyek Bendungan Tapin. Presiden Joko Widodo pun meresmikannya

**T**erbang dari Jakarta pada Kamis pagi, 18 Februari 2021, dengan pesawat kepresidenan Indonesia-1, Presiden Joko Widodo dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Menuju Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dari Banjarbaru, Jokowi langsung

melanjutkan penerbangan ke arah timur laut menuju Kabupaten Tapin dengan helikopter Super Puma TNI AU. Begitulah cara cepat mencapai Bendungan Tapin yang berlokasi di Desa Pipitak Jaya, Piani, Tapin.

Di sanalah Presiden Jokowi meresmikan bendungan yang terwujud melalui proyek sinergi BUMN yakni Kerja Sama Operasi Brantas Abipraya, Waskita Karya I, dan didukung Barata





Indonesia. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine tanda mulai berfungsinya bendungan sesuai dengan rencana semula,

Dalam pidato peresmian, Jokowi mengungkapkan keberadaan bendungan bakal meminimalisasi dampak banjir di Kabupaten Tapin. "Pak Gubernur juga sampaikan, karena Bendungan Tapin ini, banjir di Kabupaten Tapin bisa dikurangi sangat drastis sekali. Kecil sekali daerah yang terkena banjir, karena Kabupaten Tapin memiliki bendungan ini," kata Jokowi.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal melaporkan bahwa bendungan yang merupakan proyek monumental di Kalimantan Selatan itu mampu mereduksi aliran banjir. Alhasil, Kabupaten Tapin menjadi satu dari sejumlah wilayah yang memperoleh dampak minim saat terjadi banjir Kalsel yang meluas beberapa

waktu lalu.

"Masyarakat bersyukur atas keberadaan Bendungan Tapin yang diresmikan Bapak Presiden hari RI ini. Sebelum diresmikan, bendungan ini telah bekerja dengan sangat efektif. Dalam banjir besar kemarin, bendungan ini berhasil menahan banjir sehingga kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten yang paling kecil mendapat efek banjirnya," tuturnya.

Sedangkan Jokowi mengemukakan, Bendungan Tapin memiliki kapasitas tampung hingga 56,77 juta m3 dengan luas genangan hingga 425 hektare. Menurut dia, dengan kapasitas tersebut, bendungan ini berperan penting dalam pengendalian banjir.

Selain untuk pengendalian banjir, Jokowi juga menyatakan Bendungan Tapin bisa untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah tersebut, karena dapat menyediakan air irigasi

untuk 5.472 hektare sawah. "Juga menyediakan air baku 0,5 m3 per detik dan juga menghasilkan tenaga listrik 3,3 megaWatts," imbuhnya.

Jokowi melanjutkan, pengerjaan Bendungan Tapin berlangsung selama lima tahun sejak 2015. Sedianya, pemerintah menargetkan bendungan tersebut rampung pada 2019, namun baru selesai 2020. "Biaya pelaksanaan dari Bendungan Tapin Rp986,5 miliar, hampir Rp1 triliun, dengan masa pelaksanaan lima tahun," lanjutnya.

Presiden juga menyinggung bencana banjir besar yang baru terjadi di Kalimantan Selatan. Menurutnya butuh penanganan komprehensif untuk bisa mengatasi persoalan banjir di Kalsel. Banjir besar di Kalsel pada awal tahun 2021 merendam sekitar 10 kabupaten/kota.

"Kita tahu, banjir di Provinsi Kalsel mencakup sebuah area yang sangat

luas, kurang lebih 10 kabupaten/kota (terdampak) dan ini memerlukan penanganan yang komprehensif dari hulu-hilir,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal dan Bupati Tapin Arifin Arpan untuk merehabilitasi lahan guna mencegah banjir. Menurut mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu, rehabilitasi lahan penting dalam upaya penanggulangan banjir.

“Saya titip pak Gubernur dan Bupati agar intervensi rehabilitasi lahan penting sekali, penghutanan kembali, penanaman kembali di lahan-lahan,” tutur Jokowi.

“Terutama terkait DAS (daerah aliran sungai) perlu segera dilakukan secara

70,52 meter kubik. Sehingga Bendungan Tapin berpotensi memberikan layanan optimal irigasi untuk warga di Kabupaten Tapin,” ucap Bambang.

Ia berharap bendungan ini dapat memberikan nilai lebih untuk masyarakat. “Dapat mendorong ketahanan pangan dengan meningkatnya pertanian di Tapin. Lalu juga sebagai baku untuk air minum dan kemudian yang terpenting juga untuk energi,” kata Bambang.

Sedangkan BUMN Barata Indonesia bertindak sebagai pelaksana beberapa bidang yang menjadi spesialisnya. “Dalam proyek Hidromekanikal tersebut, scope pekerjaan Barata Indonesia meliputi, Engineering, Fabrikasi Mekanikal, Elektrikal, Erection Hingga Commission-

Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. “Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Basuki.

Sebagai pelengkap, Kementerian juga membangun dan merehabilitasi Jaringan Irigasi Pitap di Kabupaten Balangan, Kalsel untuk meningkatkan suplai air ke area pertanian. Daerah Irigasi Pitap dibangun dengan biaya Rp 258 miliar yang akan menjadi penyuplai air irigasi untuk area seluas 4.755 Ha.

Ini akan melengkapi pembangunan Daerah Irigasi lain di Kalsel yang sudah selesai dibangun pada 2018. Pertama, Daerah Irigasi Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyuplai 5.000 Ha dengan biaya Rp 227 miliar. Kedua, Daerah Irigasi Aman-dit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyuplai area pertanian 5.472 Ha dengan biaya Rp 88 miliar.

Bendungan Tapin dilengkapi dengan akses jalan masuk sepanjang 21 km dengan lebar 7 meter, kantor pengelola, rumah dinas, tempat ibadah, toilet, gardu pandang, dan rumah genset. Untuk bendungan utama memiliki tinggi 70 meter dengan konstruksi terowongan pengelak sepanjang 430 meter, cofferdam setinggi 29 meter serta spillway (pelimpahan) sepanjang 234 meter dan lebar 10-19 meter.

Merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi unggulan Pemerintah, bendungan ini juga berpotensi menjadi tempat rekreasi yang dapat mengundang banyak wisatawan. Hal ini dikarenakan bendungan yang proses impounding-nya atau tahap pengisian awal telah dimulai sejak 2 Oktober 2020 lalu ini memiliki keindahan alam pegunungan Meratus sebagai daya tarik alamnya yang indah, sehingga wisatawan dapat berswafoto di sana.

Sekadar informasi, Tapin selama ini lebih banyak mengandalkan batu bara sebagai sumber daya alamnya. Apakah Bendungan Tapin yang baru diresmikan dapat mengimbanginya dengan produk pertanian dan industri ikutannya juga pariwisata? Kita saksi-kan perjalanannya bersama-sama. ●



besar-besaran kalau tidak mau kena banjir di masa datang,” ujarnya.

Hadir dalam peresmian bersama Presiden Joko Widodo antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA dan Komisaris Utama Brantas Abipraya, Haryadi serta Bambang E Marsono selaku Direktur Utama Brantas Abipraya.

“Ini merupakan bentuk komitmen Brantas Abipraya, sebagai salah satu BUMN konstruksi yang mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Bendungan ini dibangun dengan tipe Timbunan Batu Zonal Inti Tegak, kapasitas tampung yang dimiliki sebesar

ing,” ujar Direktur Utama Barata Indonesia, Fajar Harry Sampurno.

Harry mengatakan, Barata Indonesia akan terus mendukung upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan filosofi bisnis perseroan FEW+ (Food, Energy, Water), yang unsur pengelolaan sumber daya air merupakan hal penting dalam rangka mendukung produksi pangan berkelanjutan.

“Barata melalui kompetensi Divisi Sumber Daya Air akan terus mendukung penuh proyek pekerjaan hydromechanical tanah air bahkan hingga sisi tersiernya dalam upaya mengembangkan PLTA,” ujar Harry.

Sedangkan Menteri PUPR Basuki





## POTENSI WISATA BENDUNGAN TAPIN

**S**aat meresmikan Bendungan Tapin yang terletak di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Kamis, 18 Februari 2021, Presiden Joko Widodo sempat berdialog dengan salah seorang warga setempat yang dahulu tinggal di sekitar wilayah yang kini telah menjadi bendungan tersebut.

Atal Amos, warga yang memperoleh ganti untung dan dilakukan relokasi ke lokasi yang tidak jauh dari Bendungan Tapin tersebut, mengatakan bahwa dari biaya ganti untung yang diperoleh, ia bersama warga setempat lainnya memperoleh lahan dan membangun rumah baru dengan kualitas yang lebih baik.

"Sekarang sudah bangun rumah di bagian hilir dekat bendungan juga. Sekarang lumayan lebih bagus, nanti Bapak bisa lihat di sekitar pinggir jalan sana," tuturnya saat berdialog dengan Presiden.

Ia mengaku sangat bersyukur dengan adanya bendungan tersebut. Sebab, kehadiran Bendungan Tapin diharapkan secara bertahap dapat mengubah kehidupan masyarakat yang berada di sekitar area bendungan.

Bendungan Tapin, selain berfungsi sebagai pengendali banjir dan pengairan bagi sawah pertanian, juga berpotensi untuk menjadi area wisata. Ini juga akan memperkaya Tapin

dengan objek wisata baru.

Sejauh ini, objek wisata di Tapin didominasi oleh wisata alam antara lain Kanal Lok Buntar, Goa Baramban, beberapa riam atau air terjun, juga Bukit Mengginding dan Bukit Piani yang berada satu kecamatan dengan Bendungan Tapin.

Nah, untuk Bendungan Tapin, potensi wisata tampaknya hendak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sehingga dapat menjadi sumber mata pencaharian baru bagi mereka. "Dengan adanya bendungan ini kami berharap agar masyarakat di sini tidak hanya sebagai penonton, tapi kami ingin masyarakat diberdayakan melalui desa pariwisata di tempat ini karena nantinya akan terbuka usaha untuk masyarakat," tuturnya.

Mendengar penuturan warga dan dengan melihat langsung kondisi alam di sekitar area Bendungan Tapin, Kepala Negara tampak sependapat dan menyetujui harapan yang sekaligus menjadi usulan warga setempat tersebut.

"Setelah melihat kondisi keindahan di sekitar waduk ini, Bapak memang betul (memiliki potensi wisata). Ini juga bisa menjadi objek pariwisata tidak hanya di Kabupaten Tapin tetapi juga di Provinsi Kalimantan Selatan. Benar, saya setuju," ucap Presiden. ●



## Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2021



Istana Kepresidenan Jakarta, 11 Februari 2021

# AGENDA KOTA: VIRUS, VAKSINASI, DAYA BELI, DAN BANSOS

Pemerintah Kota di Indonesia hendaknya mengagendakan pengendalian sebaran virus Covid-19, kelancaran vaksinasi, dan pemulihan ekonomi dengan mendorong peningkatan daya beli. Yang keempat, bantuan sosial tetap perlu jalan juga.

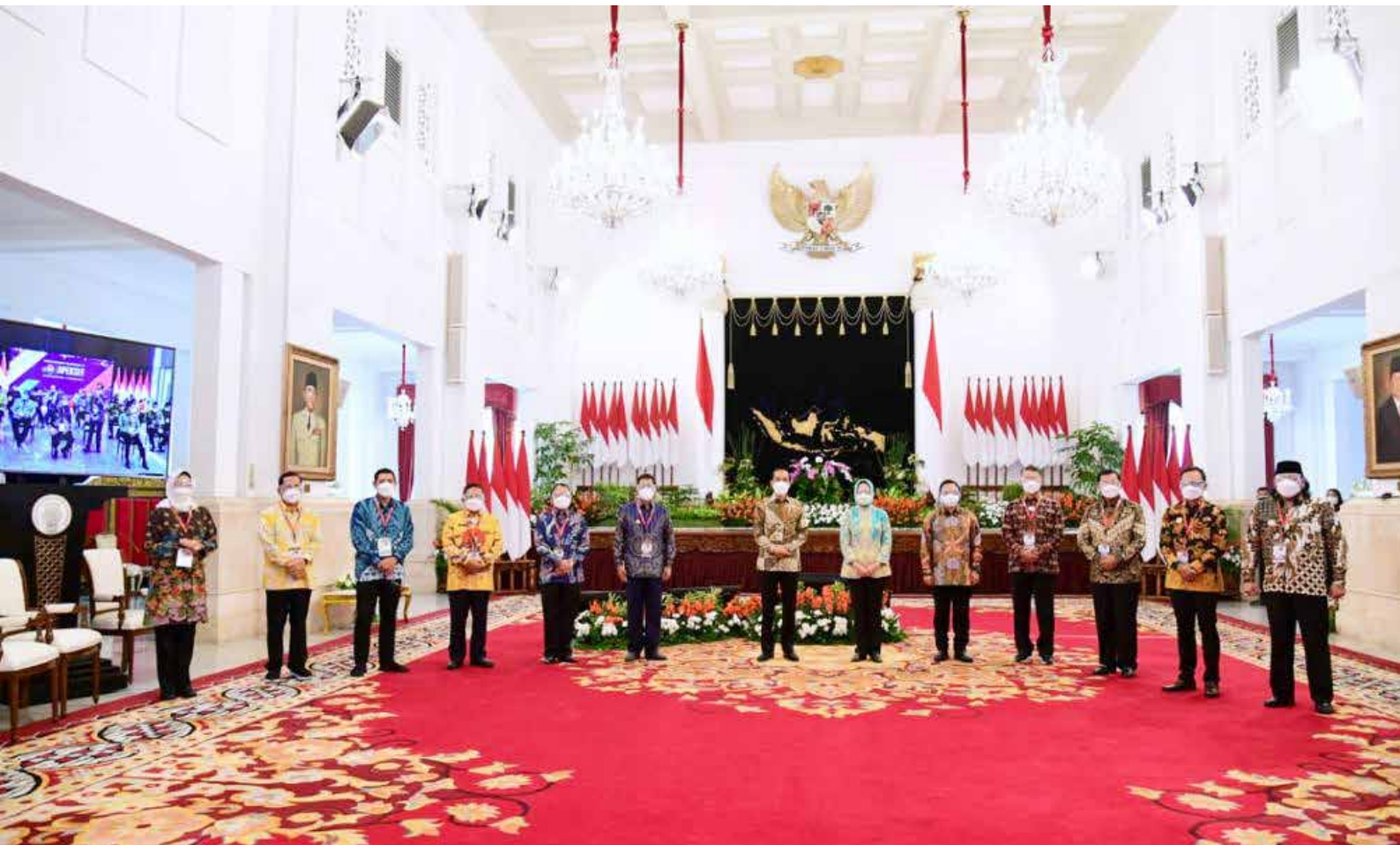
Sebaran virus corona yang menyebabkan wabah Covid-19 memang relevan untuk masyarakat perkotaan, tempat yang lebih merepotkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik protokol 3T (testing, tracing, dan treatment), maupun protokol 5M (mengunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau pergerakan).

Soal ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan para

Wali Kota yang berhimpun secara virtual dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2021. Ia menegaskan pengendalian penyebaran virus Covid-19 harus menjadi prioritas utama dalam upaya mengatasi pandemi saat ini.

"Pengendalian laju penyebaran virus harus menjadi prioritas utama kita," tegasnya saat menyampaikan sambutan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021. Sambil mengucapkan terima kasih kepada para Wali Kota





seluruh Indonesia yang dengan pemerintah pusat bergerak bersama-sama menangani pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan maupun dampak di bidang sosial dan ekonomi, ia menegaskan, pandemi belum berakhir.

Oleh sebab itu, lanjutnya, semua pihak harus terus bekerja keras dalam upaya untuk pulih dan bangkit. "Kita juga harus semakin detail untuk menemukan cara-cara baru dalam mengatasi permasalahan dan bahkan memanfaatkan kondisi krisis ini untuk meraih kemajuan yang signifikan," ujarnya.

Mendampingi Presiden, tampak antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Acara diikuti langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany selaku Ketua Dewan Pengurus Apeksi beserta jajaran pengurus Apeksi serta para wali kota/wakil wali kota dan pejabat pemerintah kota seluruh Indonesia yang hadir secara langsung maupun secara daring di 98 kota seluruh Indonesia.

Terkait upaya pengendalian laju penyebaran virus, Kepala Negara kembali menegaskan tentang pentingnya disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. "Saya kira berulang-ulang sudah saya sampaikan, disiplin 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) harus tetap digaungkan kepada masyarakat. Pemda, saya sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri, akan dibantu oleh aparat TNI dan Polri di daerah," tegasnya.

Lebih lanjut Presiden mencontohkan, imbauan disiplin protokol kesehatan seperti memakai masker harus diimbangi dengan pemberian masker bagi yang memerlukan. "Jangan hanya juga menyuruh pakai masker kepada masyarakat, tetapi harus sekarang saya tambah perintahnya, juga harus bagi masker karena banyak rakyat kadang juga tidak mampu untuk beli masker. Selain menyuruh pakai masker, mengimbau pakai masker, tapi juga bagi masker," ujar Presiden.

Dalam upaya pengendalian laju kasus COVID-19, Presiden juga men-

gungkapkan Pemerintah terus berupaya meningkatkan 3T (testing, tracing, dan treatment). "Tes, lacak, kemudian isolasi, ini penting. Ini sudah dua minggu ini saya tekankan terus masalah ini, tetapi yang paling penting adalah pelaksanaan di lapangan," ujarnya.

Presiden meminta pemerintah daerah (pemda) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, TNI, dan Polri dalam mengambil langkah jika terdapat kasus positif di wilayahnya. Kepala daerah juga diminta melakukan pemetaan zonasi penyebaran COVID-19 secara detail.

"Jika dirasa perlu ini PPKM bisa dilakukan tetapi dalam skala mikro, dalam lingkup yang kecil. Baik itu dalam skala kampung, skala desa, RW atau RT saja," ujarnya.

Pemda juga harus memperhatikan ketersediaan tempat tidur perawatan di rumah sakit dan obat-obatan maupun kesiapsiagaan tenaga medis dalam melakukan perawatan pada pasien COVID-19.

## Manajemen Vaksinasi

Dalam sambutannya, Presiden juga menegaskan pentingnya mempersiapkan manajemen untuk percepatan vaksinasi di daerah. Pemerintah telah memulai program vaksinasi COVID-19 yang diberikan secara gratis dengan target lebih kurang 181,5 juta penduduk Indonesia. Saat ini tengah dilaksanakan tahap pertama vaksinasi dengan prioritas tenaga kesehatan yang akan segera dilanjutkan untuk sektor lainnya.

"Mulai minggu depan ini (akhir Februari 2021) sudah mulai masuk ke pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat," ujar Presiden.

Vaksinasi segera dilakukan pada

manajemen vaksinasinya di lapangan," tandasnya.

Sedangkan untuk pemulihan ekonomi, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah (pemda) memperbanyak program padat karya untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat. "(Perbanyak) program padat karya agar ini bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat," ujar Presiden dalam sambutannya.

Kepala Negara menambahkan, belanja pemerintah baik pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah dengan APBD menjadi satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat sekarang ini. "Masyarakat

sehingga ada demand di ekonomi kita," ujarnya.

Pengerjaan yang dilakukan dengan program padat karya tersebut tidak hanya dapat memperbaiki infrastruktur pelayanan masyarakat tetapi juga memberikan penghasilan pada masyarakat.

Presiden menambahkan, pemerintah pusat juga melakukan program ini secara besar-besaran di semua kementerian yang ada. "Semua kita geser ke padat karya. Kita harus bergotong-royong (sehingga) semua warga yang sedang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan, golnya ke sana," tegasnya.

Ia meminta seluruh pemerintah kota (pemkot) di Indonesia untuk terus mel-



sektor dengan interaksi dan mobilitas tinggi dengan pendekatan klaster bukan orang per orang. "Perencanaan secara detail ini harus dimulai, dipetakan. Kalau vaksin datang dalam jumlah banyak itu siapa dulu yang didahulukan. Jangan lupa yang untuk yang rentan, utamanya yang lanjut usia itu menjadi prioritas," ujarnya.

Kepala Negara juga meminta pemerintah daerah untuk mempersiapkan secara matang vaksinator untuk pelaksanaan vaksinasi ini. "Pemerintah daerah, pemerintah kota, harus mempersiapkan betul vaksinator. Berapa jumlah vaksinator di kota kita dan juga

di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya," tuturnya.

Presiden menilai, banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota melalui program padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan kampung, perbaikan saluran air di pemukiman, perbaikan saluran air di kota, perbaikan puskesmas, perbaikan posyandu, hingga perbaikan sekolah.

"Saya kira banyak sekali, sehingga tercipta lapangan kerja dan kita bayar gajinya, mereka akan meningkat konsumsi, sehingga meningkat daya beli

lanjutan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. "Tetap lanjutkan terus pemberian bantuan sosial, terutama sembako pada masyarakat lapisan bawah dan kelompok masyarakat bawah yang tidak bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari program padat karya. Ini perlu dibantu dengan bansos," tandas Jokowi.

Sekali lagi. Pertama, protokol kesehatan menekan penyebaran Covid-19, vaksinasi, pemulihan ekonomi dengan program padat karya, dan bantuan sosial. Kita lihat hasilnya bersama-sama. ●



# MUNAS KILAT DI MASA PANDEMI

**A**PEKSI menyelenggarakan Munas bertema "Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan dan Pasca Pandemi COVID-19" yang dihadiri langsung sesuai dengan protokol kesehatan dan melalui daring/online. Usai rangkaian pembukaan acara di Istana Negara, kegiatan Munas berlanjut dengan sidang-sidang pleno.

Berawal dengan Pleno I, Ketua Dewan Pengurus 2016-2020 Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sebagai Ketua dan Direktur Eksekutif sebagai Sekretaris. Pleno berikutnya dipimpin oleh Walikota Balikpapan dan Walikota Bontang sebagai Sekretaris.

Alhasil, Munas kali ini berlangsung kilat. Sebelumnya panitia telah menetapkan 3 calon ketua pengurus Apeksi untuk empat tahun kedepan. ketiga calon itu masing - masing, Walikota Bogor Bima Arya, Walikota Gorontalo Marten Taha dan Walikota Jambi Syarif Pasha.

Meski sempat Alot, proses pemilihan melalui rapat formatur berjalan lancar tanpa hambatan. hasilnya menetapkan Walikota Bogor Bima Arya sebagai Ketua Pengurus APEKSI 2021 - 2024 menggantikan Airin Rachmi Diany Walikota Tangerang, yang telah mengakhiri masa periodenya di APEKSI.

Walikota Gorontalo Marten Taha dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi, dan Walikota Jambi Syarif Pasha terpilih menjadi menjadi Ketua Dewan Pengawas APEKSI.

Meski tak menjadi Ketua, Marten mengucapkan rasa syukur atas terselenggaranya Munas VI Apeksi dengan baik. ia juga secara terbuka menerima apa yang telah menjadi keputusan bersama hasil MUNAS, dan siap menjalankan program kerja Apeksi kedepan. "Apa yang diputuskan dalam Munas, itulah suara kita bersama. yang terpenting adalah tetap menjaga keutuhan, dan memelihara kekompakan" ucap Marten.

Selain melakukan pemilihan pengurus baru, dalam agenda munas juga turut membahas program kerja APEKSI periode 2021-2024. "Banyak pekerjaan

yang menanti di depan, disinilah peran Apeksi sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan nasib daerah khususnya di perkotaan" ujar Marten.

Selanjutnya, Wakil Ketua Bidang Kerja sama adalah Wali Kota Semarang, Jawa Tengah. Wakil Ketua Bidang Pembangunan, Wali Kota Banda Aceh, Aceh. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Perkotaan, Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, Wali Kota Kediri, Jawa Timur. Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi dan Hukum adalah Wali Kota Pangkalpinang. Sedangkan Bendahara APEKSI adalah Walikota Batu, Jawa Timur.

demi COVID-19" tanggal 25-28 Januari 2021 secara daring.

Dialog Nasional pada 25 Januari 2021 menghadirkan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur Dana Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Agenda lain adalah pembahasan Program Kerja Apeksi 2021-2024 dan Mekanisme Rapat Formatur Pemilihan Dewan Pengurus Apeksi Periode 2021-2024 pada 26 Januari 2021. Selanjutnya, pembahasan Rekomendasi Munas VI APEKSI 2021 pada 27 Januari 2021. Hari berikutnya,



Maka, kegiatan Munas diakhiri dengan Pengukuhan Ketua Dewan Pengurus 2021-2024 oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus menutup rangkaian Munas secara daring. Sebelumnya, berlangsung pula kegiatan Pra Musyawarah Nasional VI APEKSI 2021 dengan tema "Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan dan Pasca Pan-

presentasi Laporan 2020 dan Rencana Kerja 2021 Ketua Komwil I - VI dan Presentasi serta Pemilihan Calon Tuan Rumah Rakernas Apeksi Tahun 2022 pada 28 Januari 2021.

Kota Padang, Sumatera Barat telah terpilih menjadi Tuan Rumah Rakernas XV APEKSI 2022. Sambil melihat kondisi pandemi tentu saja. ●



# RISIKO TEKNOLOGI DARI SORIK MARAPI

Teknologi pada prinsipnya adalah alat tambahan di luar panca indra manusia. Tujuan penerapannya agar hidup lebih mudah. Namun, teknologi memerlukan penguasaan rinci untuk mitigasi risiko yang justru berpotensi merugikan manusia. Seperti yang terjadi dengan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi.

**L**ima warga Sibanggor Julu telah tiada. Niat warga desa di Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal (Madina), Sumatera

Utara itu untuk memitigasi dampak negatif kebocoran gas yang baunya menyengat malah beracun, H<sub>2</sub>S (hidrogen sulfida), di instalasi PLTP se-

tempat berakhir tragis.

Kebocoran terjadi di PLTP Unit II yang masih dalam pengembangan menyusul Unit I yang sudah beroperasi. Pada tengah hari Selasa, 26 Januari itu, Deden Darmawan, seorang karyawan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), pengembang PLTP Sorik Marapi, membuka katup sumur dengan mengalirkan steam (uap) ke silencer (peredam bising) untuk membersihkan sebelum dialirkan ke PLTP.





Namun sekitar setengah jam berlalu, muncul laporan warga mulai pingsan. Pada saat itu, warga sedang berada di sawah yang berjarak sekitar 300-500 m dari lokasi sumur panas bumi.

Ada juga warga yang mendatangi lokasi meminta pekerja SMGP menutup keran karena telah mengeluarkan gas beracun dari sumur T02. "Malah warga pun mencoba menutup sumur yang mengeluarkan gas beracun itu. Akibatnya 20 orang pingsan dan dilarikan ke Puskesmas Sibanggor Jae," kata Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi. Lebih dari pingsan, kata Kombes Hadi, dua anak dan balita, seorang remaja, dan satu warga dewasa telanjur kehilangan nyawa.

Nah, dalam situasi seperti itu, 216 warga lain di dekat lokasi kebocoran gas mengungsi ke masjid yang lokasinya berjauhan dari proyek. Jaraknya sekitar 10 kilometer

"Mereka ada kekhawatiran lah ya, kita ungsikan di lantai 2 Masjid Agung di Panyabungan (Ibu Kota Kabupaten Madina). Masyarakat yang minta ke sana, karena di sana kan lebih aman," kata Kepala BPBD Madina, M Yasir Nasution, Selasa, 26 Januari 2021.

Yasir menuturkan, keinginan mengungsi itu permintaan masyarakat. Mereka rata-rata berasal dari penduduk Desa Purba Julu, Sibanggor Julu dan desa lainnya yang berdekatan dengan proyek pembangunan pipa gas.

"Campur (dari berbagai desa) mereka yang merasa ketakutan, kan seperti itu," ujar Yasir. Namun, ia belum bisa memastikan sampai kapan masyarakat akan mengungsi. Namun pihaknya memastikan kebutuhan masyarakat yang mengungsi.

Kisah lanjutannya, Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ida Nuryatin Finahari lang-

sung menerbitkan surat penghentian sementara seluruh kegiatan atau aktivitas PT SMGP di lapangan. Termasuk penghentian operasi PLTP Unit I yang berkapasitas 45 MW, kegiatan pengeboran dengan 2 unit rig, dan seluruh aktivitas pengembangan PLTP Unit II.

"Kejadian tersebut saat ini dalam proses investigasi oleh Inspektur Panas Bumi yang dijadwalkan berangkat menuju lokasi hari ini," tandas Ida dalam pernyataan resmi pada Selasa, 26 Januari 2021.

Hasil investigasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyimpulkan perencanaan kegiatan yang tidak matang oleh pengembang PLTP Sorik Marapi. "Tidak matang karena secara waktu berubah-ubah tanggalnya. Ada kesan bahwa ini dikejar waktu," ujar Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam rapat



dengar pendapat dengan Komisi VII DPR pada Rabu, 3 Februari 2021.

Dadan menjelaskan, jadwal kegiatan buka sumur SMP-T02 pada proyek PLTP Sorik Marapi Unit II (berkapasitas 45 megaWatts) mengalami perubahan yang awalnya akan dilaksanakan pada 24 Januari 2021 ditunda menjadi 25 Januari 2021. Selain itu ditemukan adanya pelanggaran prosedur, peralatan, dan instalasi penunjang yang belum siap atau lengkap, lemahnya koordinasi antartim pelaksana kegiatan, pelaksanaan sosialisasi kepada

sana kegiatan,” kata Dadan

Kompetensi personel, kata dia, juga tidak memadai. “Kepala sekuriti tidak paham H2S beracun, tidak dijelaskan ke masyarakat,” ungkapnya.

Dadan menuturkan bahwa berdasarkan SNI 8868:2020 ‘Pelaporan Kejadian Berbahaya dan Kecelakaan Panas Bumi’, maka kejadian tersebut dikategorikan sebagai kejadian berbahaya kategori berat dan kecelakaan panas bumi kategori cedera. Oleh karena itu, PT SMGP sebagai pemegang izin panas bumi bertanggung jawab

dilakukan, tapi tidak semasih tanggal 22 dan 23. Pemberitahuan hanya ke kepala desa,” ujarnya.

Adapun, penundaan jadwal kegiatan disebabkan adanya permintaan dari warga sekitar. Selain itu, dia juga mengakui bahwa tim keamanan perusahaan yang bertugas untuk mensterilkan area sekitar lokasi sumur SMP-T02 tidak memahami potensi bahaya kegiatan pembukaan sumur.

“Dari investigasi, tim sekuriti kami yang melakukan penyisiran ada tujuh orang, tapi yang ikut pre-job safety meet-



masyarakat yang tidak memadai, serta kompetensi personel pelaksanaan kegiatan yang tidak memadai.

Persiapan keselamatan, kata Dirjen Dadan, tidak diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat, misalnya, sekuritinya yang hadir hanya kepala sekuriti. “Jadi, yang lain tidak dengar harus ngapain. Peralatan dan instalasi penunjang yang belum siap. Misal, alat komunikasi tidak dipakai semua. Kalau ada bisa segera dikomunikasikan, detektor [gas H2S] berbunyi, misalkan, ini kan tidak dibawa detektornya. Ini akibat lemahnya koordinasi antartim pelak-

sepenuhnya terhadap peristiwa yang telah terjadi.

Sedangkan Chief Technology Officer PT SMGP Riza Glorius Pasikki mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar sejak tiga hari sebelum kegiatan pembukaan sumur dilakukan, yakni sejak 22—24 Januari 2021.

“Rencana awal dibuka 24 Januari sudah sosialisasi dilakukan lewat pamflet dan ke desa. Tidak hanya ke kepala desa, tapi juga masyarakat. Namun, tanggal 24 Januari di-cancel jadi tanggal 25 Januari dan sosialisasi

ing hanya satu orang. Lainnya keliling dan memang ketemu masyarakat yang tengah kerja di sawah dan ladang. Pengakuan sekuriti kami ketemu warga mereka bilang buka sumur yang disampaikan hanya bahaya kebisingan dan bukan bahaya gas H2S,” katanya.

Sekali lagi, teknologi memang memerlukan penguasaan rinci untuk mitigasi risiko yang justru berpotensi merugikan manusia. Seperti yang terjadi dengan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi. Apalagi jika ingin memiliki pembangkit bertenaga nuklir. ●



# SORIK MARAPI SEJAK 2008

**B**oleh jadi banyak yang belum mengenal PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) pengembang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi itu. Mayoritas (95 persen) saham SMGP berada dalam genggaman KS Orka Renewables Pte Ltd, perusahaan pengembang dan operator panas bumi yang berbasis di Singapura.

SMGP memulai proyeknya di Madina pada pertengahan 2016. Dalam tiga setengah tahun operasi di PLTP Sorik Marapi, SMGP telah menyelesaikan pengeboran sejumlah 23 sumur pada enam tapak pengeboran dan menghubungkan Unit 1 sampai dengan 45 megaWatts pada akhir 2019, menjadikan PLTP Sorik Marapi sebagai proyek panas bumi tercepat berdasarkan durasi sejak pengeboran sumur pertama (15 Oktober 2016) hingga operasi (COD 1 Oktober 2020) untuk unit I.

Target pengembangan selanjutnya yaitu Unit 2 berkapasitas 45 MW adalah mulai beroperasi pada akhir 2020. Selanjutnya, Unit 3 berkapasitas 50 MW target operasi pada akhir 2021, lanjut Unit 4 berkapasitas 50 MW pada akhir 2022 dan Unit 5 berkapasitas 50 MW pada akhir 2023.

Jadi, target mulai mengoperasikan Unit II pada akhir 2020 sudah meleset dari jadwal. Tambahan pula terjadi insiden kebocoran yang menelan korban. Namun lebih banyak yang berharap situasi akan pulih dan bisnis berjalan sesuai dengan harapan.

Sedangkan Program Forest (PROFOR) Bank Dunia mencatat, Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Marapi pada 2008 mencakup lahan seluas 62.900 hektar dengan perkiraan cadangan energi hingga 200 MW. Sisi barat WKP berbatasan dengan Taman Nasional Batarang Gadis, dan juga berisi kawasan Hutan Lindung yang luas dan beberapa kawasan yang diklaim masyarakat kehutanan (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, PIAPS). Sisanya adalah lahan non hutan yang digunakan untuk kawasan pertanian dan industri kehutanan.

Masih dari catatan PROFOR, Bupati Mandailing Natal mengeluarkan SK untuk pengembangan tenaga panas bumi pada 2010, dan perjanjian jual beli listrik dengan PLN telah ditandatangani pada 2014. Namun, kemudian Bupati mencabut izin tersebut pada Desember 2014, menyusul protes masyarakat tentang potensi bahaya lingkungan, terkait dengan pengembangan tenaga panas bumi. Pada 11 November 2014, puncaknya adalah protes yang melibatkan ribuan orang yang memblokir jalan trans-Sumatera, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan puluhan penangkapan warga lainnya.

Selanjutnya, perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertemu dengan perwakilan masyarakat, dengan alasan bahwa energi panas bumi adalah cara yang ramah lingkungan untuk menghasilkan listrik lokal, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Izin untuk mengembangkan proyek panas bumi dikeluarkan oleh Kementerian ESDM pada April 2015,

dan pada April 2016 KS Orka Renewables Pte Ltd mulai masuk di PT SMGP. Pengeboran di Sorik Marapi dimulai pada Oktober 2016.

Dalam catatan PROFOR Bank Dunia, tiga titik potensi panas bumi di WKP Sorik Marapi, yakni Sampuraga, Roburan, dan Sorik Marapi mendapatkan skor risiko rendah, tinggi dan sedang. Masing-masing sebesar 3, 8, dan 6 dari segi lingkungan dan risiko sosial. Tidak ada titik yang benar-benar masuk dalam taman nasional atau dalam kawasan perhutanan sosial.

Namun, PROFOR mencatat, ada dua titik yang terletak di Hutan Lindung yang salah satunya sangat dekat dengan Taman Nasional. Baik titik risiko menengah maupun tinggi juga berada di kawasan hutan sekunder dengan tingkat deforestasi tinggi di sekitarnya yang meningkatkan risiko tersebut. Tidak ada satu pun titik yang masuk ke dalam areal perhutanan so-



sial, atau kawasan tanah adat, meskipun lokasi perhutanan sosial terletak di dekatnya.

Risiko lingkungan hidup dan sosial tampaknya sudah terdangani dengan beroperasinya Unit I PLTP Sorik Marapi. Namun, keterlambatan pengoperasian unit 2 memang masih memerlukan penjelasan, apakah lantaran kendala lingkungan hidup dan sosial atau hal lain.

Tambahan pula insiden kebocoran gas H<sub>2</sub>S yang terjadi pada akhir Januari 2021. Ini termasuk kategori risiko teknologi yang dampaknya juga menjangkau lingkungan hidup dan sosial. Tentu saja ini menjadi pelajaran bagi puluhan PLTP yang sudah beroperasi maupun masih dalam pengembangan di Indonesia. ●



# UPAYA MENGGULIRKAN KOMPETISI DI TENGAH PANDEMI

Kompetisi olahraga dan segenap rentetan dampaknya sangat terpengaruh oleh pandemi global Covid-19. Komunitas olahraga Indonesia belakangan mengupayakan agar kompetisi dapat kembali berlangsung. Bagaimana rinciannya?

**S**epak bola, cabang olahraga paling populer di Indonesia, seperti kehilangan daya. Komite Eksekutif (Exco) PSSI, misalnya, secara aklamasi memutuskan menunda kompetisi Liga 1, 2, dan 3 pada tahun 2020 dalam sebuah ra-

pat .pada akhir Oktober 2020.

Rencana PSSI melanjutkan kompetisi Liga 1 dan 2 pada Oktober 2020 pun terhenti. Alasannya, pihak kepolisian belum memberikan izin, kompetisi akhirnya ditunda.

"Rapat Exco PSSI menghasilkan

keputusan bahwa PSSI menunda seluruh kompetisi yakni Liga 1, 2, dan 3 pada tahun 2020 ini. Selanjutnya kompetisi akan dimulai lagi pada awal 2021 mendatang," kata Plt Sekjen PSSI, Yunus Nusi dalam pernyataan resmi.





Selanjutnya, kata Yunus, "PSSI akan memberikan kewenangan kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi Liga 1 dan 2 untuk mencari formula, format, dan sistem kompetisi terhadap keputusan PSSI tersebut."

Sebelumnya PSSI berharap kompetisi dapat bergulir dengan protokol kesehatan yang ketat karena masih dalam masa pandemi Covid-19. Panduan protokol kesehatan untuk kompetisi sudah dibuat regulasi tersendiri dan diserahkan kepada klub. Ketua PSSI Mochamad Iriawan pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah dan kepolisian untuk memberikan izin Liga 1 2020 dilanjutkan kembali pada 1 November.

PSSI juga pernah menghadap langsung kepada Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas, Selasa 20 Oktober 2020. Namun, pemerintah hingga kini belum mau ambil risiko dan tetap tak mengeluarkan izin keramaian.

Kompetisi Liga 1 2020 sempat ber-

gulir beberapa pertandingan pada 29 Februari 2020 dan dijadwalkan berakhir pada minggu pertama November 2020. Namun kompetisi dihentikan sementara pada 15 Maret 2020 karena pandemi Covid-19.

PT Liga Indonesia berencana menggulirkan kembali kompetisi di masa pandemi mulai pada 1 Oktober 2020 dan dijadwalkan akan berakhir pada 28 Februari 2021. Toh rencana tersebut urung terlaksana karena tak mendapat persetujuan dari pemerintah.

Musim kompetisi yang berakhir Februari 2021 telah berlalu. Para pemangku kepentingan kompetisi pun berupaya lagi menggulirkannya.

Tak kurang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menemui Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Senin, 8 Februari 2021. Pertemuan ini membahas masalah kompetisi baik sepakbola, bola basket dan bola voli yang belum bisa bergulir karena tak adanya

izin dari pihak Kepolisian.

Dalam pertemuan itu, Menpora mengatakan Kapolri masih ingin membahas lebih rinci lagi sebelum akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan izin resmi. "Saya menyampaikan ke Bapak Kapolri untuk mendiskusikan jalan keluar terbaik penerapan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat tapi kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan itu tetap bisa berjalan," kata Menpora usai pertemuan dengan Kapolri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

"Nah ini yang diinformasikan dan salah satu yang kita sepakati tadi yakni setelah ini kami akan pertemuan lanjutan, akan lebih detail, lebih teknis lagi untuk membicarakan beberapa hal khususnya kegiatan-kegiatan keolahragaan yang tentu masyarakat Indonesia sekarang sedang merindukan kegiatan keolahragaan supaya bisa bergulir kembali.

"Tapi kami harus juga paham situasi sekarang situasi yang tidak mudah, upaya pemerintahan untuk segera mengatasi penyebaran covid-19, harus kami dukung maka kami akan berdiskusi lagi," jelasnya.

Sedangkan Kapolri Listyo Sigit menyatakan, Polri ingin lebih tahu secara rinci bagaimana teknis kompetisi berjalan di tengah pandemi Covid-19 seperti ini. Bahkan, nantinya kalau izin resmi turun, pihaknya akan membuat komitmen dengan Kemenpora atau penyelenggara kompetisi perihal

pemerintah betul-betul bisa melaksanakan program penurunan Covid ini bisa berhasil sehingga aktivitas termasuk pertumbuhan ekonomi bisa pulih," ujarnya.

Di mata pengamat sepak bola nasional, M Kusnaeni, terhentinya roda kompetisi adalah pertanda kemunduran dari sisi persepakbolaan Indonesia. "Kondisi ini membuat Indonesia bukan hanya ketinggalan, tapi sebuah kemunduran karena tidak ada kompetisi tahun ini. Mulai dari kualitas Timnas baik di level junior sampai

kompetisi.

Meski demikian, Kusnaeni menilai tidak berlanjutnya Liga 1 2020 bukan sepenuhnya kesalahan operator dan federasi. "Ini keputusan kolektif bukan yang bergantung pada satu pihak, ini keputusan bangsa. Tapi tidak juga kita bergantung pada pihak keamanan saja, kan ada pihak yang mengajukan permohonan itu. Bisa tidak mereka berkomunikasi dengan baik? Mulai dari pemerintah pusat, Kemenpora, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PSSI, Kepolisian harus bisa berbicara untuk membangun pemikiran yang sama," ujar Kusnaeni.

Menurut Bung Kus, gambaran paling utama dari kondisi ini adalah citra negatif bagi persepakbolaan Indonesia. "Situasi Covid-19 di ASEAN menurut saya sama parahnya jika dilihat jumlah kasus dan jumlah penduduknya di tiap negara. Di Indonesia kasus tinggi Covid-19 berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk."

"Yang menarik, justru karena kita termasuk negara yang tidak bisa menyelesaikan kompetisi. Itu gambaran negatif wajah citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Padahal kita calon tuan rumah Piala Dunia U-20," ungkap Kusnaeni.

Selama ini, lanjut Kusnaeni, Indonesia dianggap sebagai negara yang maju kompetisinya. Itu dinilai dari kompetisi yang berjalan meriah, antusiasme suporter, tim kuat yang menang dan mampu berjuang di kompetisi level Asia walaupun sekadar di kasta kedua.

Dengan bekal citra positif tentang kompetisi sepakbola Indonesia, sejumlah pemain mencoba mengadu nasib ke luar negeri. Sebut saja Ryuji Utomo asal Persija Jakarta yang dipinjamkan ke klub Malaysia, Penang FC. Selain itu, Syahrin Abimanyu yang kontraknya tidak diperpanjang Madura United hijrah ke Johor. Sedangkan Darul Ta'zim dipinjamkan ke klub Australia, Newcastle Jets.

Tercatat pula Todd Rivaldo Ferre juga pindah dari Persipura Jayapura ke Lamongan FC. Sedangkan Witan Sulaiman yang resmi berkarier di Serbia bersama FK Radnik Surdulica. ●



adanya pelanggaran protokol kesehatan.

"Oleh sebab itu, tadi kami berdiskusi dan kemudian kami dari kepolisian membuka ruang untuk dibicarakan lebih lanjut, terkait dengan hal-hal yang perlu disiapkan baik yang bersifat administrasi, mengutamakan penegakan aturan terkait protokol kesehatan," kata Kapolri.

"Namun demikian juga kegiatan terkait kepemudaan dan olahraga bisa terlaksana oleh karena itu perlu adanya kesepakatan-kesepakatan yang tentunya apabila kemudian hari itu dilanggar tentunya akan berdampak dengan terlaksananya kegiatan tersebut,

"Ini yang akan kami bicarakan lebih lanjut secara lebih detail, intensif sehingga yang pertama bagaimana

senior maupun citra Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar," ungkap Kusnaeni.

Penundaan kompetisi musim 2020 itu membuat Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang tidak melanjutkan kompetisi di 2020. Timor Leste baru menyelesaikan kompetisi 2020 atau Brunei Darussalam yang memilih tegas untuk meniadakan kompetisi tahun ini.

Sedangkan Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura dan Laos sudah mulai melanjutkan kompetisi sepak bola masing-masing di tengah pandemi Covid-19. Kondisi ini membuat Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tetangganya dalam hal pengelolaan





# RETURN TO PLAY MODEL UEFA

**A**sosiasi Sepakbola Uni Eropa (UEFA) berhasil mengulirkan kembali kompetisi di kawasannya. Satu hal yang paling menentukan adalah keselarasan pemangku kepentingan sepakbola dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19. Selanjutnya asosiasi nasional di seluruh Eropa telah beradaptasi dengan 'normal baru' sepak bola. Banyak yang melanjutkan kejuaraan domestik mereka secara tertutup.

Dalam praktiknya, Komite Eksekutif UEFA mengumumkan format, kalender, dan tempat yang direvisi untuk hampir semua kompetisi klub dan tim nasional kami, dimulai dengan Liga Champions UEFA 2019/20, Liga Eropa UEFA, Liga Champions Wanita UEFA, dan Liga Pemuda UEFA. Dalam hal ini, Program Return to Play (kembali bertanding) akan memastikan bahwa UEFA siap menyelenggarakan kompetisi klub dan tim nasionalnya, di semua level, sambil melindungi kesehatan semua orang yang terlibat.

Mengingat situasi COVID-19 yang selalu berubah di seluruh Eropa dan berbagai tahapan tanggapan pemerintah, tantangan utama UEFA adalah mengidentifikasi protokol dan prosedur yang memastikan pertandingannya dapat berlangsung dengan tingkat keamanan yang sama di seluruh 55 asosiasi nasional. Setiap pertandingan / turnamen harus mematuhi sejumlah aturan tentang perjalanan internasional, pertandingan yang dimainkan secara tertutup, jarak sosial, aturan hygiene, dan peraturan masing-masing tuan rumah kompetisi. Penanggung jawab Program Return to Play mengkoordinasikan semua turnamen UEFA, yang mencakup hampir semua urusan: pelatihan, pengujian, pengorganisasian, bermain, dan kegiatan resmi lainnya.

tan resmi lainnya.

Untuk sementara,, semua pertandingan UEFA akan berlangsung secara tertutup. Namun, UEFA menilai situasi secara teratur di seluruh negara Eropa dan berhubungan dengan otoritas lokal untuk melihat kapan penonton dapat kembali secara bertahap. Untuk melindungi kesehatan semua peserta di dalam dan di luar lapangan pertandingan kami, Komite Eksekutif juga telah menyetujui prinsip-prinsip utama protokol medis UEFA. Panduan terperinci dibuat untuk memastikan bahwa rencana sanitasi yang menyeluruh akan diterapkan, di mana pun pertandingan dimainkan.

UEFA juga menyesuaikan pedoman operasional hari pertandingan, baik di level klub dan tim nasional, sehingga lebih disesuaikan dengan realitas baru sepakbola. Sejauh ini protokol kesehatan UEFA sudah menerapkan versi 2 sejak Oktober 2020. Alhasil, protokol Return to Play UEFA menjadikan sepak bola profesional menjadi salah satu yang teraman di dunia. Antara 5 Agustus dan 15 Oktober 2020, total 526 pertandingan dimainkan dalam sepuluh kompetisi UEFA: Liga Champions, Liga Europa, Liga Champions Wanita, Liga Pemuda, Piala Super, Liga Champions Futsal, Liga Nasional, play-off EURO 2020, Under-21 dan Kualifikasi EURO Putri.

Di seluruh pertandingan itu, 61.851 tes COVID-19 dilakukan dengan hanya 341 kasus positif (0,55% dari yang diuji). Protokol tersebut menjabarkan dengan sangat jelas langkah-langkah yang diambil jika tim melaporkan kasus virus corona. Sebagai contoh, selama kualifikasi untuk kompetisi klub putra musim ini, 213 pertandingan dimainkan: dari itu, tiga dijadwal ulang, tiga dimainkan di tempat netral karena virus, dan hanya tiga yang dibatalkan. •



# RUANG GERAK PARIWISATA MASIH TERSEDIA

Semakin jelas sekarang, di masa pandemi Covid-19, industri pariwisata masih bisa bergerak pada jenis tertentu. Kombinasi jual-beli online dengan produk kreatif seperti kerajinan tangan dan kuliner khas masih dapat tumbuh meskipun memerlukan semacam mobilisasi.

*"Memetik mangga jangan diraba  
Melihat singa mengejar rusa  
Banggalah kita dengan Danau Toba  
Karya Tuhan kebanggaan Indonesia."*

Begitulah pantun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Ia melantunkan pantun

itu dalam pembukaan Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2021 bertajuk 'Beli Kreatif Danau Toba', Sabtu, 20 Februari 2021.

Setelah pantun itu, Sandiaga bertanya kepada audiens untuk pantun

kedua. "Tambah ciek (tambah satu lagi)?" tanya Sandiaga yang dibalas dengan pekikan, "Tambah ciek!" dari para pemirsa. Sandiaga pun menyambutnya dengan pantun kedua:

*"Ke Pasar Minggu naik kereta  
Beli mangga bareng Raisa  
Ayo maju negeri kita  
Dengan Bangga Buatan Indonesia."*

Seperti itulah antara lain suasana pembukaan kampanye Gernas BBI kali ini. Kampanye kali ini adalah kelanjutan dari acara serupa pada tahun lalu seiring pandemi Covid-19 yang hingga





kini belum berlalu.

Dalam sambutannya, Sandiaga mengatakan pandemi Covid-19 memberikan dampak luar biasa, tak terkecuali di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satunya dampaknya adalah turunnya roda perekonomian nasional. "Dan kita perlu waktu untuk pulih kembali. Tapi kita tetap semangat," ujarnya

Situasi dan kondisi sekarang, kata Sandi, membuat semua pihak berhadapan dengan dua tantangan, yaitu mencegah dan mengendalikan virus Corona. Namun, tetap harus menjaga laju perekonomian agar masyarakat mampu bertahan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta memberikan penghasilan bagi masyarakat.

"Karena itu Kemenparekraf menyusun tiga strategi utama, yaitu inovasi adaptasi dan kolaborasi. Kita ingin

gairah sektor parekraf menggema dan terimplementasi dalam rangkaian kegiatan harian," ujar Sandiaga.

Berkaitan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga ingin semua bangga dengan buatan Indonesia, bangga berwisata di Indonesia, dan membeli produk kreatif Danau Toba.

"Beli kreatif lokal kita on boarding sudah diluncurkan presiden awal 2020 dan kita berharap dalam kurun waktu enam bulan ke depan dan seterusnya produk ekonomi kreatif Danau Toba bisa berkembang," tutur Sandiaga.

Kesan mobilisasi, pengerahan secara serentak sumber daya, sarana, dan prasarana untuk mencapai target, memang jelas. Dalam hal ini mobilisasi ekonomi menghadapi merosotnya pertumbuhan akibat terdampak pandemi. Presiden Joko Widodo dan

sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju tampak berpartisipasi dalam acara yang berlangsung dalam jaringan maupun luar jaringan.

Adalah Presiden Joko Widodo yang meluncurkan langsung kampanye 'Beli Kreatif Danau Toba'. dalam konteks Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia kali ini. "Tahun ini BBI akan fokus mengembangkan potensi daerah," ujar Jokowi.

Pada 2020, kata Jokowi, Gernas BBI berhasil mengajak lebih dari 3,8 juta pelaku kreatif serta Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah yang masuk ke platform e-commerce untuk bisa meluaskan potensi pasar hingga nasional, bahkan mancanegara. Sedangkan Kawasan Danau Toba, kata Jokowi, merupakan destinasi pariwisata super prioritas yang memiliki potensi luar biasa yang layak dikembangkan.



## • INFO WISATA

"Para pelaku kreatif dan UMKM Danau Toba sudah sangat dikenal. Misalnya, Ulos yang sudah mendunia, dan kopi Sidikalang yang sangat kesohor," ujarnya

Di samping itu, menurut Jokowi, kawasan tersebut juga cantik dengan danau vulkaniknya dan merupakan paduan pariwisata serta hasil ekonomi kreatif yang layak digaungkan ke Nusantara dan dunia. Kampanye itu diharapkan akan mampu membangun

juga memperkenalkan aplikasi jaringan pariwisata hub atau JP Hub," tutur Jokowi.

Menurut dia, aplikasi ini akan menjadi pintu pengetahuan, pencarian, hingga pemesanan destinasi, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, lengkap dengan atraksi wisatanya." Dengan begitu, sambung, Jokowi, saat ini adalah waktunya pariwisata Indonesia tumbuh bersama ekonomi kreatifnya.

secara terintegrasi. Tidak bisa dikerjakan sendiri. Dan menurut saya itulah kesalahan kita paling besar berpuluh-puluh tahun," ujar Luhut dalam peluncuran kampanye 'Beli Kreatif Danau Toba', Sabtu, 20 Februari 2021.

Luhut mengatakan saat ini kerja pemerintah dan para pemangku kepentingan sudah terkoordinasi dan terintegrasi. Sehingga, mulai terlihat hasil yang menggembirakan. Ia mengatakan semangat gotong royong



kitkan ekonomi Indonesia melalui industri digital.

Jokowi berujar kampanye itu nantinya akan dilengkapi dengan edukasi dan pendampingan bagi para pelaku kreatif dan UMKM untuk bisa benar-benar maju di industri digital, bukan sekadar on boarding di market place.

"Bersamaan dengan peluncuran Beli Kreatif Danau Toba, pemerintah

Tak kurang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan urun rembuk di acara itu. Malah dalam sambutannya ia mengungkapkan kesalahan yang bertahun-tahun dilakukan Indonesia. Kesalahan itu adalah bekerja sendiri-sendiri dalam membangun negeri.

"Saya juga ingin garis bawahi pada semua kita disini, Kalau kita mau bangun negeri ini semua harus kerja

adalah kekuatan bangsa Indonesia yang harus dijaga terus.

"Kemarin kita mengunjungi pameran seperti Beli Kreatif Danau Toba, saya jelaskan tadi di Summarecon Mall Serpong. Belum pernah ada pameran semacam ini yang dikreasikan oleh Kementerian. Dan saya lihat hasilnya tadi cukup menggembirakan," ujar Luhut.

Program tersebut, menurut dia, bisa menjadi salah satu bentuk kampanye



dan promosi daerah untuk memperkenalkan diri dan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli produk Indonesia.

Ke depannya, Luhut meminta adanya promosi produk dari daerah pariwisata prioritas lainnya, misalnya dari Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, maupun daerah lain seperti Banyuwangi.

Kampanye Beli Kreatif Danau Toba, tutur dia, bisa mengenalkan potensi pariwisata dan produk kreatif dari para artisan lokal terhadap ekosistem digital. "Ini adalah contoh sebuah kolaborasi kerja dalam membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia secara bersamaan," ujarnya.

Luhut berharap ke depannya semua pihak menentukan target-target yang bisa dicapai dengan program tersebut. Ia mencontohkan program Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan tahun lalu telah tercatat menghubungkan 3,8 juta pelaku UMKM ke ekosistem digital.

"Pada Januari 2021 terdapat 342 ribu yang boarding dengan omzet penjualan lebih dari Rp 55 miliar," ujar Luhut. Ia mengatakan peningkatan pelaku UMKM yang masuk ekosistem digital harus dikejar lantaran merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. "Ada 64 juta UMKM yang harus betul-betul nanti kita kawinkan kepada program Berwisata di Indonesia Saja dan Bangga Buatan Indonesia."

Sejumlah pejabat negara memborong produk-produk dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peluncuran kampanye 'Beli Kreatif Danau Toba'. Salah satunya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate yang membelanjakan Rp 100 juta untuk membeli produk kopi Sidikalang dari Koperasi Kopi Cimata Makmur Dairi.

Johnny mengatakan kopi tersebut nantinya akan dibagikan untuk jajarannya kementerian. "Saya beli yang bubuk biar gampang digunakan. Ini kopi saya ingin beli cukup banyak untuk Kominfo seluruhnya. Jadi saya beli ekuivalen Rp 100 juta kopinya," ujar dia dalam siaran langsung, Sabtu, 20 Februari 2021.

Menurut Johnny, kopi Indonesia

telah beberapa kali menjuarai kontes kopi dunia. Hal itu dibuktikan kala ia berkunjung ke London, Inggris; dan Frankfurt, Jerman. Menurut dia, kopi kelas dunia itu datang dari Flores dan Sumatera.

"Kopi tidak sekadar aroma dan rasa, karena dia representasi Indonesia di arena dunia. Melalui Beli Kreatif Danau Toba, ini wujud konkret dan nyata keberpihakan kami kepada produksi dalam negeri," ujar dia.

Tak ingin kalah dari koleganya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga ikut memborong produk UMKM. Hanya saja, ia membelanjakan duit setara dengan Johnny untuk empat produk UMKM, antara lain dari

tradisional.

Seperti halnya Luhut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga memutuskan membeli kain tradisional. Ia membeli kain songket Deli produksi Songket IR&IR.

Perry menceritakan bahwa ia dan istrinya adalah penggemar songket.

Sebab itu, dalam kesempatan tersebut, ia memutuskan membeli songket motif terbaru. "Saya juga pakai Songket Deli untuk pakaian saya dan istri saya, jadi kalau boleh saya beli motif yang terbaru," ujar dia.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memilih produk olahan andaliman buatan Andaliman Mangintir. "Saya akan beli yang sambal. Dan yang bubuk kalau ditaruh di



Dame Ulos, Songket IR&IR, Andaliman Mangintir, dan Koperasi Kopi Cimata Makmur Dairi.

"Saya nggak boleh kalah dari Pak Johnny, jumlahnya sama tapi dibagi empat UMKM," tutur Sandiaga.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga ikut belanja. Dia membeli kain ulos buatan Dame Ulos. Adapun motif yang ia beli adalah Ulos Ragidup yang diklaim sudah punah.

"Saya beli yang sudah punah saja agar tidak punah," tutur Luhut. Ia mengapresiasi Renny Katrina selaku pemilik Dame Ulos. Pasalnya, menurut dia, sangat bagus apabila anak muda mulai memperkenalkan kembali kain

atas makanan enak sekali, apalagi di musim hujan seperti ini, jadi bisa menghangatkan badan. Luar biasa," ujarnya.

Benar-benar mobilisasi. Namun, jelas bukan manipulasi. Pariwisata daerah lain, silakan bergerak juga. Intinya, ekonomi kreatif terutama kerajinan tangan dan produk kuliner yang tahan lama dapat menjadi pilihan.

Bukan hanya rendang padang dan sulam emas karancang. Mulai dari gulai pl'u dan kopiah aceh, tempuyak dan pempek Palembang, gudeg dan batik yoga, hingga papeda dan totem asmat, bahkan buah merah papua. Asal tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, mengapa tidak? •



# SANDI DI DAIRI, ANGELA DI JAKARTA

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berada di Dairi, Sumatera Utara. Sedangkan wakilnya, Angela Tanoesoedibjo berada di Jakarta. Masih dalam konteks Beli Kreatif Danau Toba.

**S**epertinya Sandi mendorong produktivitas sentra produksi industri kreatif dan destinasi wisata. Sementara wakilnya, Angela Tanoesoedibjo bagaikan ahli pemasaran yang mempromosikannya.

Begitulah, Sandi mendatangi langsung masyarakat untuk menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk lokal termasuk produk asal Sumatera Utara melalui gerakan Beli Kreatif Danau Toba. Rasa bangga tersebut ditunjukkan Menparekraf Sandiaga Uno saat Peluncuran Beli Kreatif Danau Toba di Debang Resort, Dairi, Sabtu, 20 Februari 2021.

Mengenakan pakaian adat songket Tapak Catur dengan motif Ulos Simalungun, rancangan desainer Irsan, motif ini biasanya digunakan untuk acara pernikahan dan digunakan sebagai abut atau sarung. "Saat ini saya hadir secara langsung dari Kabupaten Dairi dengan menggunakan pakaian

songket Tapak Catur, berkat kreativitas desainer, pakaian ini menjelma menjadi sebuah produk ekonomi kreatif yang istimewa," ujarnya.

Sandi menjelaskan pandemi COVID-19 mau tidak mau menghadapi pada pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi, harus bergerak cepat menentukan segera langkah-langkah pencegahan dan pengendalian virus, di sisi lain harus menjaga laju perekonomian agar masyarakat tetap mampu bertahan.

"Beli Kreatif Danau Toba sendiri bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap pembelian dan penggunaan produk Sumatera Utara. Sehingga kita dapat berpartisipasi pada pemulihan perekonomian nasional," ujarnya.

Dalam Peluncuran Beli Kreatif Danau Toba tersebut hadir pula, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Bank

Indonesia, Perry Warjiyo, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo yang hadir dari Balige Sumatera Utara dan Bupati Kabupaten Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu.

Beli Kreatif Danau Toba, ujar Sandiaga Uno, memiliki dua program utama, yakni pendampingan berupa peningkatan up-skilling serta pemasaran berupa on boarding ke marketplace atau e-commerce, sehingga artisan mampu memperluas pasar domestik maupun ekspor dan meningkatkan omzet sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.

Untuk mendukung program tersebut, sejak awal Februari 2021, Kemenparekraf/Baparekraf melakukan rangkaian kegiatan Beli Kreatif Danau Toba mulai dari pre hingga post launching, di antaranya kampanye dan



publikasi di owned dan paid media, showcase produk ekonomi kreatif di 5 bandara internasional, BKDT Fair dan Pesona Kuliner Danau Toba di Mall di Serpong, on boarding dan pemasaran, pelatihan dan upskilling pada Maret hingga November 2021.

"Keseluruhan rangkaian program ini memfasilitasi 5.700 artisanal ekonomi kreatif Sumatera Utara. terlaksananya program ini merupakan wujud kolaborasi antar K/L, Pemerintah Daerah, marketplace, komunitas UKM, dan para pelaku ekonomi kreatif yang berhimpun untuk mendukung dan bersinergi demi pengembangan sektor ekonomi," kata Sandiaga Uno.

Gayung bersambut, Wakil Menparekraf Angela malah mendorong artisan unggulan untuk mempromosikan karyanya melalui Kampanye Beli Kreatif Danau Toba Fair 2021. "Kampanye ini diinisiasi dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun lalu dan kita teruskan di tahun ini. Untuk itu, Kemenparekraf mendukung gerakan tersebut dalam program Beli Kreatif Danau Toba," ujar Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, saat mengunjungi Beli Kreatif Danau Toba Fair 2021, di Summarecon Mall Serpong, Tangerang, Jumat, 20 Februari 2021.

Menurut dia, hal ini dilakukan untuk membangun dan meningkatkan minat masyarakat agar lebih mencintai, membeli, dan menggunakan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh pelaku UMKM Indonesia atau yang disebut artisanal. Karena pelaku UMKM memiliki peran yang besar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Secara statistik pelaku UMKM memberikan kontribusi kepada PDB sebesar 60 persen dan menyerap 90 persen tenaga kerja.

"Maka dari itu, mari kita cintai produk lokal Indonesia," ujarnya.

Wamenparekraf Angela juga menjelaskan terpilihnya Danau Toba dalam program ini, karena menjadi salah satu bagian dari 5 destinasi super prioritas (DSP) yang memiliki potensi alam dan produk kreatif yang luar biasa. "Hal ini akan terus kita support dan kita dorong pengembangannya," kata Angela.

Dalam program Beli Kreatif Danau

Toba, Angela menuturkan Kemenparekraf/Baparekraf akan melakukan pendampingan bagi artisan untuk go digital dan membuat berbagai macam festival untuk memperkenalkan karya-karya Danau Toba dan wilayah di Sumatera Utara lainnya.

Pada kunjungannya kali ini, Wamenparekraf Angela berkesempatan men-

Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memberikan apresiasi kepada Kemenparekraf/Baparekraf atas terselenggaranya kegiatan ini. "Beli Kreatif Danau Toba Fair ini merupakan upaya Kemenparekraf/Baparekraf dalam mempromosikan salah satu dari 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, serta mendorong produk-produk kreatif UMKM. Dan ternyata cukup banyak yang



dampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, untuk meninjau tenant-tenant yang ada di Beli Kreatif Danau Toba Fair 2021, seperti Solu Ulos, Mejukuhibiniu Butik, House of Damiten, Bolu Medan CF, dan produk kreatif lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan

mendatangi acara ini," ujarnya.

Ia juga menjelaskan ke depan Beli Kreatif Danau Toba Fair rencananya akan dibuat per kabupaten. Jadi, tidak hanya di Medan saja, tetapi kota-kota lain yang ada di Sumatera Utara juga. Begitupun, destinasi super prioritas lainnya seperti Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. ●



# ASHANTY POSITIF COVID-19, PESOHOR LAIN MULAI PEMULIHAN

Ashanty menjadi pesohor yang banyak menjadi perbincangan di awal Februari 2021 lantaran tertular Covid-19 sekaligus juga menyandang autoimun. Beberapa pesohor lainnya mulai sembuh dan menjalani pemulihan.

Tertular Covid-19 menjadi kian repot jika ternyata juga menyandang autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh seseorang melepaskan protein yang disebut autoantibodi untuk menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Autoimun juga lebih rentan terserang infeksi, termasuk Covid-19. Pesohor Ashanty salah satunya.

Sambil berdoa Ashanty sanggup mengatasi masalah kesehatannya, sejumlah pesohor berhasil menjadi penyintas Covid-19. Namun, para penyintas Covid-19 tetap harus menerapkan protokol kesehatan 5 M 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau pergerakan) meski telah pulih. Alasannya, kemungkinan tertular masih terbuka.

Vaksinasi memang menjadi harapan mengatasi penularan Covid-19. Toh untuk menerima vaksin, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Penyan-

dang autoimun termasuk dalam daftar komorbid (sakit bawaan) yang perlu memenuhi syarat khusus saat divaksin Corona. Kementerian Kesehatan mengimbau penyandang autoimun sistemik menunda dulu vaksinasi COVID-19. "Bagi penderita penyakit autoimun sistemik, vaksinasi harus ditunda dan harus dikonsultasikan pada dokter yang merawat," ungkap pedoman terbaru Kemenkes soal syarat vaksinasi.

Seiring dengan itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI) juga menjelaskan beberapa kriteria pengidap autoimun yang tak boleh divaksin Corona antara lain, penyandang autoimun sistemik semisal systemic lupus erythematosus (SLE), Sjogren, Rheumatoid Arthritis, Vaskulitis. Sementara penyandang autoimun yang boleh divaksin Corona meliputi tiroid autoimun, autoimun hematologi, dan inflammatory bowel disease (IBD).

Penyandang autoimun yang masih boleh menerima vaksinasi Covid-19 tetap harus memenuhi syarat tertentu. "Layak vaksinasi selama remisi dan terkontrol, konsultan dengan dokter di bidang terkait," demikian rekomendasi PAPDI.

Bagaimana dengan penyintas Covid-19? Untuk penyintas Covid-19, Kemenkes kini memperbolehkan vaksinasi Corona sepanjang sudah sembuh dari Covid-19 selama tiga bulan dan tak mengeluhkan gejala Corona apapun.

Nah, sepanjang Januari 2021, tercatat sejumlah pesohor yang menjadi penyintas Covid-19. Untuk menerima vaksinasi Covid-19, mereka harus menunggu tiga bulan sejak dinyatakan sembuh. Berikut beberapa antaranya:





## Anji



Pesohor yang terlahir dengan nama Erdian Aji Prihartono dinyatakan positif Covid-19 pada 8 Januari 2021 setelah melakukan perjalanan ke Gunung Puntang dan Kota Bandung, Jawa Barat. Pelantun lagu "Bidadari Tak Bersayap" itu curiga bisa terpapar saat berada di Kota Bandung karena banyak melakukan tatap muka. Toh Anji mengaku tidak mengalami gejala apapun. Setelah menjalani isolasi mandiri selama 12 hari di studio musiknya, Anji akhirnya dinyatakan negatif virus corona.

## Boy William



Malam pergantian tahun, Boy William masih harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit karena terjangkit virus corona. Ia dinyatakan positif Covid-19 setelah melakukan swab test PCR ketika hendak pergi ke Bali. Boy mengakui saat melakukan tes PCR tidak merasakan gejala apapun yang mengarah ke Covid-19. Bahkan, saat itu dia merasa sangat sehat.

Saat ini, Boy William sudah kembali sehat dan sudah menjalankan aktivitas normalnya kembali. Salah satunya, kembali tampil menjadi pembawa acara Indonesian Idol Special Season.

## Donna Agnesia

Meski cukup ketat menerapkan protokol kesehatan dan selalu mengingatkan seluruh anggota keluarganya,

Donna Agnesia tetap tak terhindar dari Covid-19. Istri Darius Sinathrya itu menyebut dirinya sebagai orang yang terpilih untuk merasakan langsung virus tersebut.

Donna mengetahui kondisinya positif Covid-19 tanggal 21 Januari 2021, tapi dua hari kemudian, yaitu tanggal 23 Januari 2021, dia sudah dikatakan negatif Covid-19. Saat ini, Donna Agnesia masih dalam masa pemulihan.



## Fanny Fabriana



Pada akhir 2020, pesohor Fanny Fabriana juga terpapar Covid-19, malah bersama beberapa keluarga dekatnya. Fanny terdeteksi positif Covid pada 24 Desember 2020. Hasil pelacakan (tracing) dan pengujian kesehatan (testing) menemukan pula sebaran Covid-19 kepada anggota keluarga yang lain beberapa hari kemudian.

Pemeran film 3 Dara 2 itu termasuk pasien Covid-19 yang mengalami gejala, mulai dari batuk, mual, badan pegal-pegal, napas terasa tak nyaman, hilang indera penciuman dan rasa, serta menggigil. Namun, Fanny dan keluarga kini dinyatakan pulih dari Covid-19.

## Gilang Dirga

Gilang Dirga, pesohor yang banyak menjadi pembawa acara (presenter) rupanya sempat dinyatakan positif Covid-19. Dalam pengakuannya,



Gilang sudah terpapar virus corona pada akhir tahun 2020. Suami Adiezty Fersa itu mengaku tidak mengalami gejala apapun atau yang biasa disebut Orang Tanpa Gejala (OTG) sebelum dinyatakan positif Covid-19.

Namun, sehari setelah dikatakan terjangkit virus corona, Gilang Dirga baru merasakan hal yang berbeda, seperti kehilangan indera penciuman dan perasa. Setelah menjalani isolasi mandiri selama sembilan hari, Gilang Dirga dinyatakan negatif Covid-19 melalui hasil swab test PCR pada awal Januari 2021.

## Irfan Hakim



Pembawa acara (presenter) lainnya yang sempat tertular Covid-19 adalah Irfan Hakim Firmansyah. Ia mengumumkan kondisi positif Covid-19 pada Kamis, 7 Januari 2021.

Irfan mengatakan, dia dinyatakan terpapar virus corona setelah melakukan swab test PCR pelacakan, pasca satu mitra kerjanya dinyatakan positif Covid-19. Gejala khas Covid-19 pun ia alami: badan lemas dan suhu tubuh yang terasa panas. Kini, Irfan Hakim sudah dinyatakan negatif Covid-19 setelah melakukan isolasi mandiri. ●



# FAKTOR EKONOMI POLITIK DAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Belum ada simpulan seragam tentang hasil disiplin protokol kesehatan (prokes) untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dan hasilnya. Mungkin ada faktor lain mengganggu disiplin prokes sehingga upaya penanggulangan Covid-19 kian jadi tanda tanya.

**S**ebuah riset ekonomi politik terhadap komunitas bisnis di Ukraina (pecahan Uni Soviet), Mesir (Afrika Utara), dan Venezuela (Amerika Latin), mengungkapkan, bisnis dengan koneksi politik membuat lebih mudah melanggar kebijakan protokol kesehatan (prokes).

Alhasil, upaya memutus mata rantai Covid-19 makin sukar dan lama.

Simpulan penting riset ini antara lain, rancangan langkah-langkah untuk mengurangi Covid-19 akan kurang efektif di negara-negara dengan aturan hukum yang lemah. Konkretnya, jika perusahaan yang memiliki koneksi

dengan penguasa dapat menghindari kebijakan pembatasan kegiatan memanfaatkan relasinya, perlakuan istimewa pun diperoleh. Dampaknya, disiplin prokes terabaikan

Selain itu, perusahaan yang memiliki hubungan politik tidak mungkin lagi, malah terkadang sangat kecil kemungkinannya, terlibat dalam kebijakan jarak sosial untuk mengurangi pandemi. Bisnis dengan relasi kekuasaan politik itu tampaknya bebas beroperasi sambil mengabaikan prokes 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan men-



gurangi mobilitas atau pergerakan di luar rumah).

Riset ini merupakan kerja sama antara Robert Kubinec (New York University Abu Dhabi, Uni Emirat Arab), Haillie Na-Kyung Lee (Seoul National University, Korea Selatan), dan Andrey Tomashevskiy (Rutgers University, Brunswick, New Jersey, Amerika Serikat). Hasil penelitian mereka menjadi materi webinar atau seminar virtual di dua acara pada pertengahan November 2020 lalu. Pertama, Webinar "Public Policy, Opinions, Behavior, and Health Outcomes during the COVID Pandemic" yang mendapat sponsor dari European Union Center. Kemudian, tampil lagi di webinar International Political Economy Society (IPES) menggunakan perangkat zoom dari Ohio State University, Columbus, AS.

Latar belakang studi Kubinec dan rekan adalah kesenjangan antara seruan untuk menerapkan protokol kesehatan oleh para ahli kesehatan masyarakat dan praktik di lapangan. Namun, eksekutif pemerintah sering memanfaatkan kebijakan pembatasan yang mereka buat sendiri untuk memetik keuntungan atau memanfaatkannya demi kepentingan politik.

Sejauh ini, sudah banyak hasil penelitian menunjukkan bagaimana COVID-19 telah berdampak ekonomi lebih parah pada individu berpenghasilan rendah. Namun, relatif sedikit yang diketahui tentang apakah dampak negatif serupa terjadi di tingkat perusahaan. Dari sudut pandang efisiensi, perusahaan yang harus menanggung beban pembatasan COVID-19 tentu yang memiliki uang tunai ekstra dan jalur kredit stabil untuk menahan gangguan pada bisnis mereka.

Namun, Kubinec, Haillie, dan Tomashevskiy mengungkapkan bahwa perusahaan dapat menggunakan koneksi politik untuk menghindari pembatasan COVID-19 sehingga bisnis tanpa koneksi justru menanggung beban kebijakan yang dirancang untuk memerangi pandemi. "Saat kami mempelajari masalah ini di negara-negara yang diketahui memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan lembaga negara yang relatif lemah, kami yakin

bahwa masalah yang sama ini kemungkinan besar terjadi di negara lain yang tidak memiliki negara yang kuat dan otonom," kata Kubinec dalam presentasinya.

Untuk menentukan bagaimana perusahaan yang berkoneksi politik telah terpengaruh secara berbeda oleh COVID-19, para peneliti menerapkan survei online terhadap 2.567 karyawan dan manajer bisnis di Ukraina, Venezuela, dan Mesir selama akhir musim semi dan musim panas 2020. Rangkaian data yang kaya informasi pun terhimpun. Antara lain mencakup berbagai ukuran untuk perusahaan berkoneksi politik, sejarah interaksi perusahaan dengan birokrat (negatif dan positif).

Rupaya data itu juga



mengetahui pola aktivitas politik seperti mendanai kampanye, memerintahkan karyawan untuk memilih calon, dan menggelar aksi unjuk rasa atas nama partai politik. "Dengan menggabungkan data historis tentang perusahaan dengan pertanyaan mengenai kepatuhan mereka terhadap arahan protokol COVID-19, kami dapat memahami dengan sangat tepat sejauh mana koneksi politik memungkinkan perusahaan menghindari pembatasan bisnis terkait pandemi," lanjutnya.

Hasilnya tidak menggembirakan dalam hal kewajaran penerapan kebijakan COVID-19. Data menunjukkan bahwa hubungan politik perusahaan, diukur baik melalui skala yang dilaporkan sendiri atau dalam kaitannya dengan hubungan yang diamati antara politisi dan perusahaan, sangat berkorelasi dengan perusahaan yang

tetap buka selama pandemi. Perusahaan-perusahaan ini juga cenderung lebih besar secara rata-rata.

Namun, meski diharapkan bahwa perusahaan-perusahaan ini akan lebih mungkin untuk menerapkan jarak sosial dan tindakan lain untuk karyawan mengingat mereka tetap terbuka, penelitian menemukan bahwa ini tidak terjadi, dan untuk beberapa jenis tindakan jarak sosial, secara politis karyawan perusahaan berkoneksi cenderung tidak mematuhi.

Karena alasan ini, penelitian Kubinec dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa perusahaan yang menggunakan koneksi politik untuk melindungi diri dari pembatasan COVID-19, berpotensi meningkatkan infeksi di negara mereka dan meneruskan beban pembatasan bisnis ke bisnis yang kurang terhubung, lebih kecil dan lebih rentan. Hasil ini memiliki ekuitas dan konsekuensi kesejahteraan karena perusahaan yang terhubung secara politik tidak selalu harus tetap buka dari sudut pandang efisiensi.

Penelitian ini juga selaras dan mendukung simpulan penelitian lain tentang program tanggap bencana pemerintahan dengan korupsi ekstensif "Hasil penelitian kami semakin mengembangkan referensi tentang hubungan antara politik, korupsi, dan tanggap bencana. Kami menunjukkan bahwa pemerintah dengan aturan hukum yang lemah tempat hubungan negara-bisnis yang didorong oleh hubungan informal kurang efektif dalam menerapkan tanggapan kebijakan publik terhadap peristiwa alam yang mengganggu seperti pandemi COVID-19," tandas Kubinec.

Selain itu, sambungnya, perusahaan-perusahaan yang berkongsi dengan penguasa politik dapat meraih pangsa pasar lebih besar melalui akses preferensial ke barang klub (barang publik tertentu biasanya berbayar), seperti pengecualian dari pembatasan kesehatan masyarakat. Pengalaman beragam perusahaan dalam mengakses barang klub semacam itu menimbulkan pertanyaan tentang hubungan ikatan bisnis dengan kekuasaan negara dan ketidaksetaraan di negara dengan tingkat korupsi tinggi. ●



# PANDEMI DAN KONEKSI KEKUASAAN DALAM BISNIS

Hubungan negara dan bisnis yang mengarah korupsi memang bisa terjadi. Namun, tidak terjadi begitu saja. Ada dinamikanya.

**S**egera setelah pandemi dimulai, upaya ilmiah yang relatif besar-besaran berlangsung untuk mengukur konsekuensi ekonomi dari pembatasan akibat Covid-19. Banyak alur simpulan penelitian yang relatif sama. Namun, jika pun tidak banyak, sebagian besar dari hasil penelitian ini tetap tidak diterbitkan. Sementara bahan-bahan pustaka

yang tersedia sulit untuk dikarakterisasi, Kubinec dan rekan berupaya menghimpun sejumlah temuan tentang pengaruh Covid-19 terhadap bisnis dari sejumlah penelitian terdahulu. Antara lain dari Brodeur, Grey, Islam dan Bhuiyan.

Brodeur dan rekan menawarkan gambaran paling tegas di antara berbagai penelitian ini. Simpulannya antara

lain mengungkapkan bahwa pembatasan bisnis memiliki konsekuensi negatif yang mendalam bagi perusahaan dan karyawannya. Pada satu titik di awal pandemi, setiap tambahan 10 hari pembatasan lockdown akan meningkatkan 1,7 persen pengangguran di Amerika Serikat. Angka-angka seperti ini belum pernah terdengar di luar bencana alam besar seperti tsunami





mengalami kemerosotan secara keseluruhan, kebijakan lockdown telah merugikan pekerja miskin lebih parah. Ini adalah penelitian Adams-Prassl dan rekan. Sedangkan Bonaccorsi dan rekan menyimpulkan, pekerja yang mengandalkan upah harian dan pekerjaan langsung lebih terpengaruh oleh pembatasan perjalanan. Di sisi lain, pekerja yang dapat bekerja dari jarak jauh dari rumah, dalam banyak kasus berpenghasilan tinggi, telah terpengaruh oleh pandemi secara lebih terbatas --tak terlalu dalam dampaknya.

Mengingat parahnya efek pembatasan Covid-19 pada bisnis, masuk akal jika para pebisnis mencari celah dan cara lain untuk menghindari pembatasan. Namun, data yang terbuka dan informatif mengenai perusahaan yang mencari celah memanfaatkan Covid-19 memang terbatas. Dalam satu kasus, mantan penggalang dana politik AS mencapai kesepakatan untuk menjual sekitar 630 juta dolar AS pasokan medis Covid-19 ke entitas pemerintah setelah menggunakan koneksi politik Partai Republik untuk memfasilitasi bisnis. Sumber penelitian yang mengungkapkannya.

Selama musim panas 2020, sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat AS melayangkan surat kepada pemerintahan Trump yang mengeluhkan kontrak lain, termasuk produksi masker dan paket alat uji Covid-19, yang diduga mengutamakan pebisnis yang memiliki hubungan baik. Dengan nada yang berbeda, Presiden Brasil Bolsonaro telah menyelamatkan gereja-gereja evangelis dari pembatasan Covid-19, yang diyakini banyak orang disebabkan oleh koneksi politik kelompok ini. Titik-titik data ini, meskipun terisolasi secara individual, setidaknya menunjukkan bagaimana kebijakan Covid-19 dapat dimanipulasi untuk kepentingan mitra politik yang memiliki hubungan baik.

### Dinamika Negara dan Bisnis

Kubinec dan rekan memperkirakan bahwa kemampuan kalangan bisnis menghindari pembatasan adalah fungsi atau gabungan dinamika faktor-faktor kapabilitas negara, pukulan balik pelanggan potensial dan

dan gempa bumi.

Penelitian Brodeur dan rekan juga mencatat, selain dampak langsung kebijakan, ada juga dampak tidak langsung. Antara lain ancaman langsung karena ketakutan tertular virus, konsumen menghindari toko eceran dan restoran. Selanjutnya, yang tidak langsung, ketidakpastian jangka panjang atas keadaan ekonomi dan pandemi dapat menekan investasi dan menyebabkan pengangguran kronis tergantung pada bagaimana pemulihan dari pandemi terjadi, dengan asumsi pandemi berakhir di beberapa titik dalam waktu dekat.

Karena ancaman langsung dan tidak langsung ini, penelitian lain menyebutkan pandemi menjadi ancaman mematikan bagi banyak perusahaan, meskipun beberapa akan jauh lebih terpengaruh daripada yang lain

segera setelah pandemi. Penelitian Bartik, Bertrand, Cullen, Glaeser, Luca dan Stanton misalnya, Bartik dan rekan mengungkapkan bahwa sebanyak 53 persen ritel AS dan 70 persen bisnis seni dan hiburan tutup pada minggu pertama April 2020. Namun, hanya 19 persen perusahaan keuangan dan 21 persen perusahaan jasa profesional melaporkan penutupan. Dengan demikian, dampak dari pembatasan awal pada Covid-19 sangat heterogen dan sangat merugikan industri tertentu, meskipun seiring waktu, muncul perkiraan bahwa gelombang kejut makroekonomi dapat mengganggu kinerja perusahaan yang semula tidak ikut sengsara.

Heterogenitas efek Covid-19 di berbagai perusahaan ini sejalan dengan efek pandemi yang tidak setara pada pekerja. Meskipun pasar tenaga kerja

keyakinan bisnis tentang apa yang mungkin dilakukan pesaing mereka. Preferensi konsumen sering kali tidak jelas karena beberapa antaranya lebih memilih jarak sosial, sementara yang lain mengabaikannya, sehingga pasar kurang pasti tentang perilaku konsumen. Pengetahuan tentang apa yang dilakukan pengusaha lain, menurut Kubinec dan rekan, tidak diragukan lagi memainkan peran dalam kepatuhan bisnis melalui permainan koordinasi dan pelengkap strategis, tetapi relatif sulit untuk mengetahui dengan tepat bagaimana keyakinan ini berubah. Terakhir, variabel dengan pengaruh positif atau negatif paling jelas terhadap perilaku bisnis adalah kebijakan negara yang mewajibkan kepatuhan.

Sementara pandemi Covid-19 adalah fenomena baru, upaya bisnis untuk menghindari kebijakan negara yang

menyimpulkan, dalam pemerintahan dengan institusi yang lemah, tradisi supremasi hukum yang juga lemah, plus tingkat korupsi yang tinggi, hubungan negara-bisnis ditandai dengan tingkat informalitas yang tinggi. Interaksi antara perusahaan dan agen pemerintah dipengaruhi oleh koneksi informal, seperti ikatan keluarga, klan atau geografis, sejarah profesional dan politik dari pemilik usaha, dan anggota dewan, atau pertukaran keuangan informal/ekstralegal yang sedang berlangsung antara perusahaan dan pejabat pemerintah.

Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa pengalaman perusahaan di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi bervariasi sebagai fungsi dari kekuatan dan efektivitas koneksi politik mereka. Hal ini tercermin tidak hanya dalam akses preferensial ke barang publik seperti pinjaman pemerintah, tetapi juga dalam akses ke barang

tinggi karena praktik konstruksi di bawah standar yang tersebar luas. Koneksi politik dan hubungan informal juga berperan dalam distribusi bantuan bencana. Sehubungan dengan pembatasan Covid-19, masuk akal untuk menduga bahwa pola serupa akan berlaku, dan ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa informalitas dan kronisme telah memburuk sebagai akibat dari birokrasi yang kewalahan menghadapi pandemi sebagaimana simpulan penelitian Gallego, Prem dan Vargas pada tahun lalu.

Sedangkan Kubinec dan rekan, melihat bahwa perusahaan yang terhubung secara politik dapat memanfaatkan koneksi politik mereka untuk melewati batasan lockdown maupun pembatasan dan tetap beroperasi tanpa mematuhi ketentuan. Perusahaan yang terhubung secara politik juga cenderung tidak mematuhi batasan yang tidak terlalu ketat, seperti pem-



dirancang untuk menangkal bencana alam dan lainnya tentu saja cerita lama. Menurut Kubinec dan rekan, sejauh pembatasan Covid-19 membebankan biaya pada bisnis, perusahaan berkepentingan untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan ini. Tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghindari ongkos pembatasan sangat bergantung pada hubungan negara-bisnis.

Dalam kaitan ini, banyak penelitian

klub, seperti pengecualian dari peraturan pemerintah. Penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan jenis barang klub yang terhubung secara politik ini secara langsung memengaruhi respons bencana di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi.

Karena perusahaan yang terhubung secara politik dapat menghindari penegakan standar pemerintah, pemerintah yang korup dikaitkan dengan kematian akibat gempa yang

“  
sejauh pembatasan Covid-19 membebankan biaya pada bisnis, perusahaan berkepentingan untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan ini.

batasan jumlah pelanggan atau karyawan dalam ruangan.

Karena perusahaan yang secara politis tidak terhubung lebih cenderung untuk mematuhi pembatasan dan menutup atau mengurangi kapasitas dan output mereka, perusahaan yang memiliki koneksi politik kemudian diposisikan akan meraih pangsa pasar yang lebih besar. Mengingat bahwa koneksi politik sering kali berasal dari hubungan sosial yang dikelompokkan oleh ketidaksetaraan sumber daya, Kubinec dan rekan melihat bahwa



distribusi ulang peluang pasar ke perusahaan-perusahaan ini kemungkinan besar akan memperburuk ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan yang sudah timpang sebelumnya.

### Simpulan

Kubinec dan rekan menemukan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik secara signifikan lebih kecil kemungkinannya mematuhi pembatasan terkait Covid-19. Karena koneksi politik dikaitkan dengan ukuran perusahaan, penelitian Kubinec, Haillie, dan Tomashevskiy menemukan bahwa efek koneksi dimediasi melalui ukuran perusahaan.

Temuannya menyiratkan bahwa, pertama, pemerintah dengan kelemahan yang lemah dan tingkat korupsi yang tinggi cenderung tidak secara efektif menjalankan langkah-langkah kesehatan masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19. Karena perusahaan yang terhubung secara politik memanfaatkan koneksi mereka untuk menghindari pembatasan kesehatan masyarakat, kepatuhan terhadap langkah-langkah terkait bisnis cenderung rendah di negara-negara dengan tingkat korupsi yang mirip dengan yang terjadi di Ukraina, Mesir, dan Venezuela. Distorsi dan inefisiensi yang terkait dengan korupsi dan lemahnya kelemahan berdampak pada parahnya bencana alam dan krisis kesehatan masyarakat tidak hanya dengan melemahkan standard mitigasi bencana, tetapi juga dengan melemahkan kebijakan tanggap bencana.

Kedua, temuan penelitian Kubinec menunjukkan bahwa celah pembatasan Covid-19 yang terkait dengan koneksi politik cenderung berkontribusi pada konsentrasi pasar di sektor-sektor dengan sejumlah besar perusahaan yang terhubung secara politik, meningkatkan ketimpangan secara lebih luas. "Karena perusahaan besar lebih cenderung terhubung secara politik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung tidak mematuhi batasan bisnis," ungkap simpulan penelitian ini.

Jika perusahaan besar dan memiliki koneksi politik menghindari pem-

batasan dan tetap buka, sedangkan perusahaan yang lebih kecil dan tidak memiliki koneksi tutup, maka perusahaan besar dengan demikian dapat menangkap pangsa pasar lebih besar. Perusahaan kecil dan tidak memiliki koneksi lebih mungkin untuk mundur dari bisnis karena mereka menghadapi risiko penutupan paksa, di samping masalah kegalakan (predation) pemerintah yang sudah ada sebelumnya. "Jenis penegakan pembatasan yang tidak merata ini kemungkinan besar akan berkontribusi pada peningkatan ketimpangan karena perusahaan kecil gulung tikar dan perusahaan besar semakin menggurita," sambung Kubinec dan rekan.

Hasil ini relevan untuk penelitian tentang korupsi, koneksi politik, kesehatan masyarakat, dan tanggap bencana. Meskipun sebagian besar penelitian tentang korupsi dan bencana alam berfokus pada faktor-faktor yang mening-

katkan kerusakan akibat bencana yang melibatkan dampak fisik, seperti gempa bumi atau angin topan maupun tsunami, ungkap penelitian ini, "temuannya juga menunjukkan bahwa korupsi dan lembaga yang lemah memengaruhi tanggapan terhadap peristiwa seperti pandemi yang tidak melibatkan kerusakan fisik secara langsung."

Memang Kubinec dan rekan mengakui, perlu lebih banyak penelitian tingkat perusahaan untuk memahami bagaimana korupsi dan koneksi politik berdampak pada respons bencana di sisi pemerintah. Antara lain, bagaimana perusahaan yang memiliki hubungan politik mendapatkan keuntungan dari bantuan pemulihan bencana? Apakah jenis koneksi penting? Bagaimana hubungan ini berbeda-beda di setiap jenis peristiwa alam? "Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat berguna dalam memahami interaksi pemerintah-bisnis selama dan setelah bencana alam," ungkap Kubinec.

Selanjutnya, Kubinec, Haillie, dan Tomashevskiy menyarankan beberapa cara tambahan pendalaman di masa depan. Berdasarkan temuan di tiga negara dalam penelitian: Mesir, Ukraina, dan Venezuela, tersirat bahwa inkonsistensi dalam penegakan lockdown dan pembatasan dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan dan konsentrasi



katkan kerusakan akibat bencana yang melibatkan dampak fisik, seperti gempa bumi atau angin topan maupun tsunami, ungkap penelitian ini, "temuannya juga menunjukkan bahwa korupsi dan lembaga yang lemah memengaruhi tanggapan terhadap peristiwa seperti pandemi yang tidak melibatkan kerusakan fisik secara langsung."

Memang Kubinec dan rekan mengakui, perlu lebih banyak penelitian

pasar. Tentu saja hal ini baru akan terlihat agak lama bahkan setelah pandemi berlalu. Ujungnya akan terlihat apakah terjadi monopoli atau oligopoli.

Saran lain, perlu penelitian lagi untuk lebih memahami seperti apa dan bagaimana korupsi memengaruhi ketimpangan dan konsentrasi modal di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Bagaimana dengan Indonesia? ●

# CELAH KOLUSI KALA PANDEMI

## ► Tantangan Bisnis dan Koneksi Politik di Indonesia

Dari penelitian sederhana tentang koneksi politik dalam bisnis di masa pandemi, justru terungkap banyak implikasi serius bahwa muara dari alur dampak negatifnya justru sangat merugikan sebuah negara sebagai entitas ekonomi yang memerlukan persiapan pemulihan pasca pandemi. Bukan koneksi politik yang sebenarnya menjadi masalah, melainkan bagaimana hubungan itu menjadi korupsi.

**S**ekadar contoh saja, negeri tetangga Singapura. Negeri ini memiliki perusahaan induk badan usaha milik negara. Namanya Temasek Holding.

Temasek Holding dipimpin oleh seorang perempuan yang menjabat Chief Executive Officer setara dengan Presiden Direktur. CEO Temasek Holding adalah Ho Ching yang juga istri

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. PM Lee sendiri merupakan putra pendiri Singapura Lee Kuan Yew.

Di Singapura, negara dan bisnis jelas terkoneksi. Tapi dalam praktiknya, Singapura adalah salah satu negara terbaik dalam bisnis dan penegakan hukum terhadap korupsi. Tak ada keaduan dalam koneksi antara politik dan bisnis, pertanda asas-asas bis-

nis yang fair (fairness) dan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) berlangsung mendekati ideal.

Lebih dari itu, kesejahteraan warga menjadi fokus, termasuk di kala pandemi Covid-19. Pemerintah Singapura memiliki program bantuan keuangan yang relatif merata bagi segenap warganya sepanjang 2020 tahun pertama wabah Covid-19. Para pemimpin du-





nia dan eksekutif perusahaan berskala global pun memilih Singapura sebagai tuan rumah pertemuan tahunan World Economic Forum 2021 pada Mei mendatang.

Sekarang, bayangkan jika istri Kepala Negara di Indonesia menduduki jabatan Menteri BUMN misalnya. Jika dapat lebih baik dari Singapura, sebenarnya bukan masalah. Jadi, masalah Indonesia adalah korupsi yang terjadi ketika bisnis memiliki koneksi politik. Termasuk di kala pandemi. Sejumlah kasus korupsi mewarnai kehidupan sehari-hari Indonesia: korupsi Bansos dan korupsi ekspor lobster, juga korupsi Asuransi Jiwasraya dan Asabri. Semuanya terkait dengan bisnis yang memiliki koneksi politik, dan korupsi tetap terjadi di kala pandemi tiba.

Dari sisi normatif, panduan apa yang baik dan buruk, sebenarnya Indonesia sudah memiliki pedoman bagus untuk

mencegah korupsi di kala pandemi. Misalnya kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Sayangnya strategi ini tampaknya tak lagi menjadikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai sasaran.

Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional, yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi, digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Kebijakan ini berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK yang menggantikan aturan lama yaitu Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Bila pada Perpres No. 55 Tahun 2012 disebutkan salah satu indikator keberhasilan Stranas PK adalah peningkatan IPK; peningkatan kesesuaian antara pengaturan antikorupsi di Indonesia dan klausul United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) secara utuh; dan peningkatan indeks Sistem Integritas Nasional, maka Perpres No. 54 tahun 2018 menetapkan sasaran Stranas PK berdasarkan tiga fokus.

Berdasarkan lampiran Perpres No. 55 tahun 2018, disebutkan ketiga fokus utama tersebut adalah Perizinan dan Tata Niaga; Keuangan Negara; serta Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum, yang dilakukan dalam 11 aksi. Pertama, perizinan dan tata niaga menjadi fokus karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Korupsi di sektor perizinan pun dinilai akan menghambat berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja. Dampak dari korupsi di tata niaga adalah tingginya biaya ekonomi untuk penyediaan komoditas pokok sehingga menjadi beban terutama bagi masyarakat ekonomi lemah.

Kedua, keuangan negara dijadikan sasaran karena menyangkut dua sisi yakni penerimaan dan belanja. Korupsi pada sisi penerimaan negara menjadi fokus karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran sementara korupsi di

sektor belanja negara yaitu pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional.

Ketiga, penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi fokus karena korupsi di sektor tersebut sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara.

Regulasi stranas PK kemudian diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh lima kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Stranas PK yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri pada 19 Oktober 2018. Pada Hari Anti-Korupsi Dunia 2020 16 Desember 2020, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mewakili Tim Nasional Stranas PK melaporkan sepanjang 2019-2020 timnya sudah bekerja sama dengan 87 kementerian/lembaga, 542 Pemerintah Daerah (Pemda), media, masyarakat sipil, asosiasi pengusaha untuk menjalankan 11 aksi selama dua tahun.

### Sebatas Kertas

Meski sudah bekerja menyusun rencana, strategi dan penandatanganan SKB para menteri, ternyata pengukuran upaya pemberantasan korupsi melalui IPK malah melorot. Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2020 mengalami penurunan yaitu melorot tiga poin dari skor 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020. Skor IPK dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. IPK 2020 tersebut bersumber pada 9 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori yang dilakukan pada periode Oktober 2019-Oktober 2020. Peringkat Indonesia juga ikut menurun yaitu dari peringkat 85 pada 2019 menjadi 102 dari 180 negara yang ikut disurvei.

"Komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan dua periode ini patut



## • INFO KHUSUS

dicatat ya masih komitmen di atas kertas. Faktanya data IPK (Indeks Persepsi Korupsi) tidak berubah banyak bahkan naiknya rata-rata tidak sampai 0,9 poin dan rata-rata di angka 37,” kata Manajer Riset TII Wawan Heru Suyatmiko

dalam diskusi publik “Memaknai Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020”.

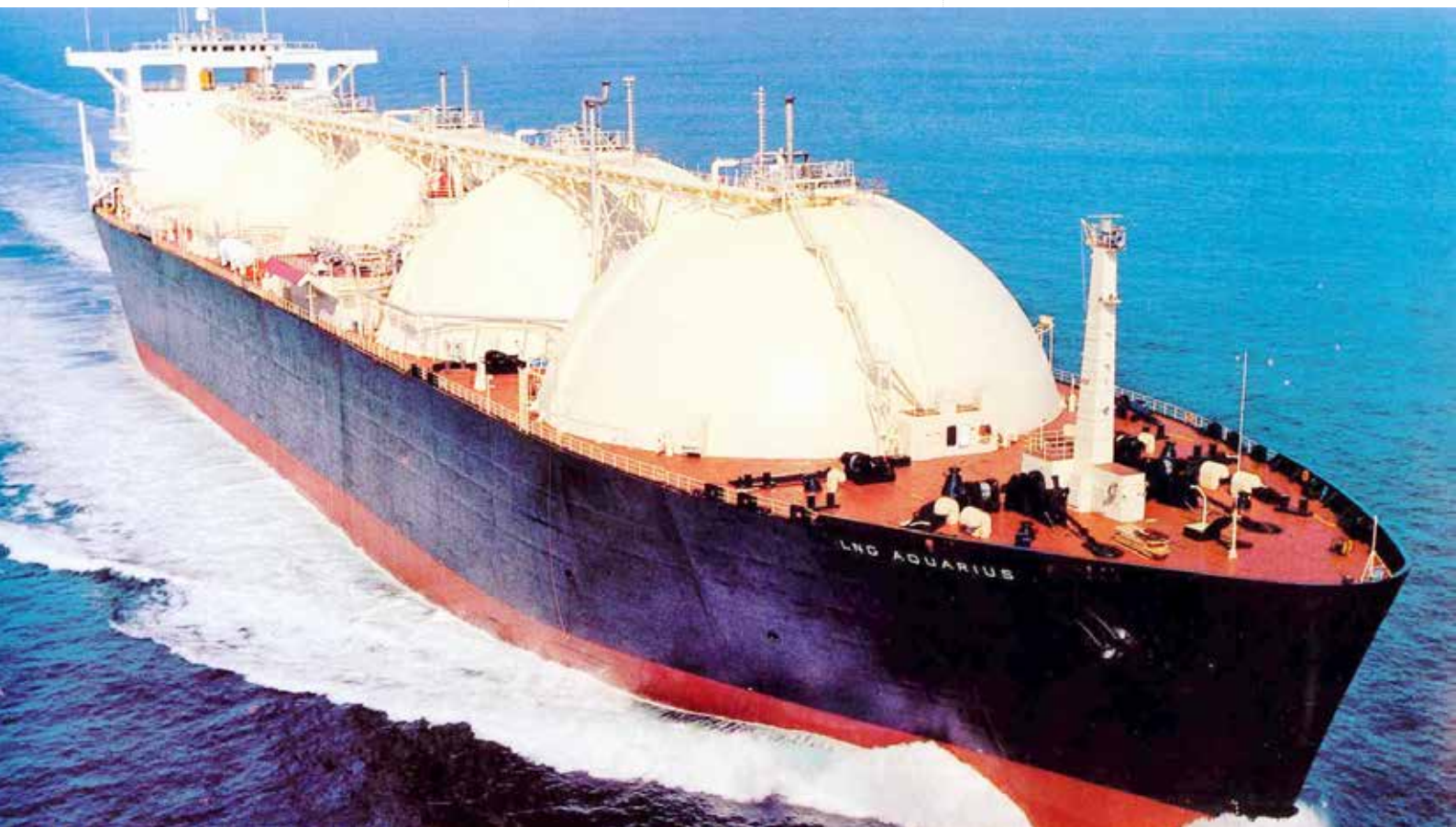
TII menyebutkan ada lima indikator yang merosot sepanjang 2020. Pertama,

disurvei sedang bekerja saat ini serta “Varieties of Democracy” yang mengukur kedalaman korupsi politik, korupsi politik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, korupsi di birokrasi, korupsi besar dan kecil yang memengaruhi kebijakan publik.

“Di bidang ekonomi dan investasi secara umum, IPK Indonesia mengalami stagnasi ditunjukkan dengan indikator ‘World Economic Forum’,

mist Intelligence Unit Country Ratings”. Sedangkan indikator yang menunjukkan politik dan demokrasi yaitu “Varieties of Democracy” (VDem) juga turun, artinya menurut Wawan sektor politik masih rentan terhadap kejahatan korupsi.

“Yang perlu dicatat memang kemudahan berusaha dalam rezim pemerintahan Presiden Jokowi pada enam tahun terakhir perlu diapresiasi. Tetapi



“Political Risk Service” (PRS) yang mengukur persepsi korupsi dalam sistem politik, pembayaran khusus dan suap ekspor-impor dan hubungan mencurigakan antara politikus dan pebisnis.

“Kemudian IMD World Competitiveness Yearbook” yang mengukur persepsi terjadinya suap dan korupsi dalam sistem politik; selanjutnya “Global Insight Country Risk Ratings” yang mengukur risiko individu/perusahaan dalam menghadapi praktik korupsi dan suap untuk menjalankan bisnis.

“Ukuran lainnya, Political and Economic Risk Consultancy” (PERC) Asia Risk Guide yang mengukur masalah korupsi di negara tempat pihak yang

bahkan ‘Global Insight Country Risk Ratings’, ‘Political and Economic Risk Consultancy’, ‘IMD World Competitiveness Yearbook’ turun, jadi ternyata selama ini upaya kemudahan berusaha kita makin dipersepsikan korup oleh pelaku usaha sebagai responden,” ungkap Wawan.

Di sektor penegakan hukum, meski salah satu indikator naik yaitu WJP-ROL (World Justice Project-Rule of Law), menurut Wawan perbaikan kualitas layanan/birokrasi dengan kaitannya terhadap pemberantasan korupsi mengalami stagnasi yaitu ditunjukkan dengan indeks “Bertelsmann Foundation Transformation Index”, “Econo-

meninggalkan sektor penegakan hukum juga tidak bagus untuk upaya pemberantasan korupsi karena perbaikan iklim usaha harus diimbangi dengan situasi politik hukum yang kondusif,” tutur Wawan.

Menurut Wawan, pelaku ekonomi dan pebisnis yang disurvei dalam pengumpulan data IPK menilai korupsi masih acap kali terjadi atau masyarakat pun masih permisif terhadap penegakan hukum sebagaimana persepsi korupsi di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian maupun militer.

### Perbaikan IPK

Untuk meningkatkan skor IPK,



menurut Wawan perlu ada perubahan signifikan yang cepat dan terukur. Pertama adalah faktor penegakan hukum yaitu penguatan lembaga otoritas antikorupsi dan lembaga pengawas lain termasuk aparat penegak hukum yang memiliki sumber daya dan kemandirian memadai dalam menjalankan tugasnya agar penegakan hukum berjalan adil dan imparial.

Persoalannya menurut Wawan,

politik adalah memastikan peran serta warga negara dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Penegakan integritas dan mekanisme akuntabilitas politik di lembaga-lembaga politik agar tidak toleran terhadap korupsi politik.

Ketiga, di sektor ekonomi investasi dan kemudahan berusaha adalah menambahkan dari resep debirokratisasi,

memastikan adanya akses warga secara partisipatif dalam upaya pemberantasan korupsi sepanjang pandemi baik dalam program pemulihan kesehatan, sosial maupun ekonomi harus bebas korupsi. Pelonggaran aturan saat pandemi malah dapat menjadi bumerang, misalnya, dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam suap pengadaan bantuan sosial



dasar hukum lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi yaitu KPK sudah berubah melalui revisi Undang-Undang KPK No. 19 tahun 2019 ditambah dengan pemilihan komisioner KPK 2019-2023 yang memiliki kepentingan politik. "Di satu sisi, UU KPK sudah berubah dan yang tidak boleh dilupakan adalah pada masa pemilihan komisioner di Komisi III DPR ditanyakan kepada seluruh kandidat apakah setuju dengan revisi UU KPK, semua kandidat yang setuju baru dipilih, bayangkan mereka yang tidak setuju akhirnya memang tidak terpilih," ungkap Wawan.

Kedua, di sektor demokrasi dan

deregulasi dan resentralisasi dengan norma dan nilai integritas oleh penyelenggara negara dan dipromosikan kepada pelaku usaha.

"Memang kemudahan berusaha dalam rezim pemerintahan Presiden Jokowi pada enam tahun terakhir perlu diapresiasi, namun misalnya dalam pelaksanaan 'online single submission' atau peralihan sistem dari 'offline' ke 'online' seperti apa orang di belakang sistem itu, hal ini yang harus dipromosikan ke pelaku usaha bukan hanya di atas kertas," tambah Wawan.

Keempat adalah faktor pandemi COVID-19. Pemerintah diminta me-

pada akhir 2020. "Korupsi bansos oleh Mensos jadi pukulan telak yang menunjukkan bahwa pelonggaran aturan dan menjauhkan partisipasi publik malah menciptakan korupsi," ucap Wawan.

Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum serta seluruh elemen masyarakat untuk mengubah persepsi pemberantasan korupsi di Indonesia yang lambat dan bahkan melorot. Indonesia dapat belajar dari Singapura yang diakui memiliki upaya pemberantasan korupsi paling tinggi di Asia Tenggara berdasarkan nilai IPK 2020 yaitu 85. • Rio T Adam

# SCHENGEN

Gunawan Effendi

**D**i kawasan Eropa, tersebutlah sebuah wilayah bernama Schengen (sebut saja Sengen). Sejatinya Schengen adalah nama sebuah desa pengolah anggur untuk menjadi minuman beralkohol. Lokasinya di kawasan tenggara Luksemburg, negara kecil yang terkunci oleh tiga raksasa di sekelilingnya: Belgia di barat dan utara, Jerman di timur, dan Prancis di selatan.

Namun, secara geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi, Schengen adalah lokasi penandatanganan kesepakatan yang mulai dirintis pada 1985. Isi kesepakatannya, menghapus segala pemeriksaan paspor maupun pengawasan perbatasan lainnya di antara negara-negara yang menandatangani perjanjian itu. Penerapan bebas visa dan pemeriksaan di perbatasan itu mulai berlangsung pada akhir Abad XX, Maret 1995. Yang pertama kali adalah raksasa di sekeliling Luksemburg (negara berpenduduk sekitar 626 ribu jiwa per 2020). Ya Belgia, Jerman, dan Prancis.

Di awal Abad XX, pada 2008, Swiss mulai menerapkan kesepakatan itu dan menggenapkan kawasan Schengen mencakup 26 negara. Selain negara-negara yang telah disebutkan tadi (Luksemburg, Belgia, Jerman, Prancis, dan Swiss), kawasan ini meliputi pula Austria, Belanda, Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malta, Norwegia, Poland, Portugis, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, juga Yunani. Tambahan pula Monaco, San Marino, dan Kota Vatikan menerapkan kebijakan imigrasi yang sama dengan negara-negara Schengen yang sebagian besar tergabung dalam Uni Eropa.

Dihitung-hitung, kawasan Schengen dihuni oleh lebih dari 417 juta jiwa dengan luas wilayah hampir 4,19 juta km persegi. Bandingkan dengan Indonesia yang 1,9 juta km<sup>2</sup> terbagi dalam 34 provinsi dengan total penduduk 270 juta jiwa.

Baik negara-negara Schengen maupun Indonesia terdampak oleh pandemi Covid-19 yang mengglobal. Di kawasan Schengen, kebijakan imigrasi yang semula seragam pun berubah sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing negara.

Beberapa negara termasuk Belgia, Prancis, Portugal, dan Finlandia mengumumkan protokol perjalanan atau imigrasi baru. Kebijakan ini menyusul diskusi antara para pemimpin Uni Eropa tentang pembatasan perjalanan tidak penting melintasi perbatasan internal blok itu untuk menahan laju penyebaran virus corona. Jenis-jenis baru perubahan karakter virus (*mutant strains*) terutama yang muncul dari Inggris, Afrika Selatan, dan Brasil menjadi perhatian serius.

Meski perjalanan ke UE sudah sangat dibatasi, mulai Minggu 24 Januari 2021, siapa pun yang datang dari luar UE - hanya mungkin bagi mereka yang memiliki alasan penting - harus menjalani tes Covid-19 sebelum keberangkatan. Untuk memerangi strain virus dari Inggris yang ganas, UE memblokir semua perjalanan kecuali barang atau pelancong dengan perjalanan penting dari Inggris yang keluar dari UE melalui amandemen Brexit.

Dewan UE pun memperbarui daftar negara yang pembatasan perjalanannya dicabut setiap dua pekan sekali setelah evaluasi terhadap negara-negara itu. Untuk awal Februari 2020, negara-negara Schengen secara bertahap mencabut pembatasan perjalanan di perbatasan luar bagi penduduk negara ketiga yaitu Australia, Selandia Baru, Rwanda, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand. Untuk China, Hong Kong, dan Macau, tunduk pada konfirmasi timbal balik.

Toh setiap negara UE memiliki standardnya sendiri untuk memutuskan apakah dan bagaimana warga negara ketiga dapat masuk jika mereka sudah berada di kawasan Schengen. Setiap negara anggota UE juga memutuskan dan menerapkan langkah lanjutannya sendiri dalam mengekang penyebaran pandemi. Antara lain karantina saat masuk dari wilayah atau negara lain. Peraturan daerah juga sangat berbeda dalam berbagai ukuran jarak sosial, jam malam dan persyaratan pemakaian masker.

Tentu pelanggaran keluar-masuk penduduk dari negara ketiga berdasarkan penilaian kualitas penanganan Covid-19 untuk kesehatan dan kepentingan ekonomi. Tapi pertimbangan kesehatan memang lebih utama. Amerika Serikat, India, dan Jepang misalnya, belum terlihat di daftar itu. Indonesia juga. ●





# info indonesia

www.infoindonesia.id



Lautan  
informasi  
di dunia maya  
melalui jaringan  
internet  
memberikan  
banyak  
referensi  
INFO  
kepada  
masyarakat

**ALAMAT REDAKSI/  
IKLAN/PEMASARAN:**  
**JL. RAYA KALIBATA NO. 8,**  
**JAKARTA SELATAN 12750**  
**TELP / FAX : 021-79196781/**  
**021-79196786**

# 2023 SUMSEL PUNYA TOL LAUT



**SUMSEL MAJU  
UNTUK SEMUA**